

ft
ft-2
DIS.E.09/10
Fit
P

DISERTASI

PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FITRIADI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008

**PENGARUH PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENYERAPAN TENAGA
KERJA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

**Pada hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2008
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

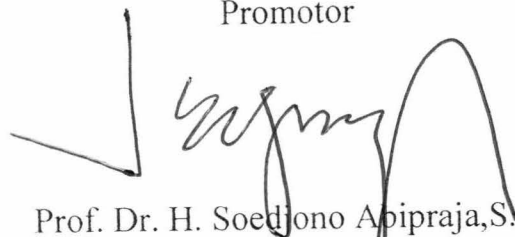
Oleh :

**FITRIADI
NIM. 090114491 D**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : 13 Juni 2008

Oleh
Promotor



Prof. Dr. H. Soedjono Apipraja, S.E.
NIP. 130 445 343

Ko-Promotor I



Prof. Dr. H. Effendie, S.E.
NIP. 130 531 816

Ko-Promotor II



Prof. Dr. I Ketut Rahyuda, S.E., MSIE
NIP. 131 273 601

Telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)
Tanggal : 8 Mei 2008

PANITIA UJIAN AKHIR DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Ketua : : Prof. Dr. H. Imam Syakir, S.E.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Soedjono Abipradja, S.E.
2. Prof. Dr. H. Effendie, S.E.
3. Prof. Dr. I Ketut Rahyuda, S.E., MSIE.
4. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., M.Ec.
5. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E.
6. Dr. Agus Suman, S.E., DEA.
7. Dr. Solimun, Ir., M.Sc.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 4457 /J03/PP/2008
Tanggal 19 Mei 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga disertasi dengan judul Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) serta Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan.

Selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan hati yang tulus dan ikhlas perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku promotor, penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi (PJMKPD), tim penguji dan penilai usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (ujian tertutup) dan ujian tahap II (ujian terbuka), staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Ketelitian dan keluasan wawasan ilmu pengetahuan, kesabaran, kearifan dan keikhlasan beliau telah mengarahkan, memotivasi dan memberi saran-saran kepada penulis untuk senantiasa mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dan bersikap rendah hati tanpa kehilangan jati diri.

Prof. Dr. H. Effendie, SE, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku ko-promotor I, tim penguji ujian kualifikasi, tim penguji dan penilai usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (ujian tertutup) dan ujian tahap II (ujian terbuka), staf pengajar dan ketua program pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ketelitian dan kesabaran yang luar biasa sebagai ilmuwan dalam memberikan koreksi, arahan dan motivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Prof. Dr. I Ketut Rahyuda, SE, MSIE, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, selaku ko-promotor II, tim penguji ujian kualifikasi, tim penguji dan penilai usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (ujian tertutup) dan ujian tahap II (ujian terbuka), staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Udayana.. Ketelitian dan kesabaran yang luar biasa sebagai ilmuwan dalam memberikan koreksi, arahan dan motivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Fasich, Apt dan mantan rektor Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr.,Sp.BTKV. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,MS dan mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., SpP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku pembimbing Akademik (PA), sebagai tim penguji ujian kualifikasi, tim penguji dan penilai usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (tertutup), staf pengajar dan mantan ketua program pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Dengan penuh kesabaran dan kearifan serta keikhlasan mengarahkan serta

memberikan dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, sebagai tim penguji ujian kualifikasi, penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi (PJMKPD), tim penguji dan penilai usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (tertutup), staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Dengan penuh kesabaran, keterbukaan serta keikhlasan mengarahkan serta memberikan dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Prof. Dr. Ida Bagus Made Santika, SE., Prof. Dr. H. Hari Susanto., Prof. Dr. H. Sarmanau, drh, MS., Prof. Kuntoro, dr.MPH.,Dr.PH, Prof. Dr. Kunto Wibisono., staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah memberikan pemahaman mendasar tentang berbagai teori ekonomi, filsafat ilmu, metodologi penelitian dan telah menjadi bekal penulis dalam menyusun dan menyelesaikan disertasi.

Prof. Budiman Christiananta, Drs.Ec.M.Sc., Ph.D., sebagai tim penguji ujian kualifikasi, staf pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof Dr. Sri Maemunah Soeharto, SE, sebagai tim penguji ujian kualifikasi, Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec.,M.Ec., sebagai penguji ujian tahap I (tertutup), Prof. Dr. H. Umar Nimran, MA, sebagai tim penguji ujian kualifikasi, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherianto, MA, sebagai penguji usulan penelitian, Dr. Ir. Solimun, M.Sc, sebagai penguji usulan penelitian, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (tertutup), Dr. Agus Suman, S.E.,DEA, tim penilai kelayakan naskah disertasi, ujian tahap I (tertutup),

Prof. H. A. Waris, SE, penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi (PJMKPD). Dengan tulus ikhlas telah memberikan arahan dan pemahaman yang mendasar, terhadap teori-teori ekonomi yang menjadi bahan-bahan penulisan disertasi.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan, sehingga dapat meringankan biaya yang harus penulis tanggung dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Prof. H. Zamruddin Hasid, SE,SU., yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Bapak dan Ibu guruku yang telah memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan, dengan kesabaran dan ketulusan serta telah memberikan yang terbaik mulai dari pendidikan SD Negeri 6 Kampung Jawa Samarinda, SMP Negeri 1 Samarinda, SMA Negeri 1 Samarinda, penulis menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya atas jasa-jasanya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang diajarkan.

Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran, bimbingan dan motivasi kepada penulis di Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (UNMUL), Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), di Magister pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (UNMUL), yang telah memberikan dorongan untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi. Bapak Drs.H.Darminto,MS., mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Bapak Drs. Muhammad Alwi Abdullah (Almarhum), Drs. H. Sugian Noor (Almarhum), Prof. Dr. Suharno,MM, Dr.H. Djoko Setyadi,M.Sc, Dr. H. Ardi Paminto,M.S, Dr.Michael,MS, Dr.Hj.Sri Mientarti,MS, Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida,MS, Dr. Rusdiah Iskandar, MS Ak, Dr. Theresia Militina,MS, Dr. H. Priyagus,S.E.,M.Si, Dr. Sukisno S.Riady,S.E.,MM, H.Zainal Ilmi,S.E.,MBA, Irwan Gani,S.E.,M.Si, Akhmad Noor,S.E.,MS, Hairul Anwar S.E,M.A, penulis mengucapkan terima kasih atas simpati, perhatian dan bantuannya.

Terima kasih penulis kepada Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur beserta staf, yang telah memberikan konfirmasi data terkini dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman-teman Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga angkatan 2001/2002, atas kerjasama dan bantuannya Dr. H. Moehariono, MM., Dr. H. Teman Koesmono, MM., Dr. Tina Melinda, MM., Dr. Wilopo, MS SE Ak., Dr. Hj. Indi Djastuti, MS., Dr.Sayekti Suindiyah, MM., Dr.H.Sasongko, MS., Dr.Youbert Maramis, MS, Dr. Ellia Mustikasari, SE, MS. Dr. Windijarto, Drs.Ec.M.Sc.

Dengan penuh kasih sayang penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada istri tersayang **Yulvira Ariyani**, serta anak-anakku tersayang: **Muhammad Rakan Aufar**, dan **Muhammad Fayad Nawar** dengan penuh pengertian dan kesabaran, terus menerus memberikan dorongan dan semangat

untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kedua orang tua penulis ayahanda **H. Masyhud Djapar** dan ibunda **Hj. Hartiah** (Almarhumah) dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketulusan dalam mendidik, membesarkan dan memberikan doa yang tiada hentinya, agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Bapak mertua **Rustam Oesin** (Almarhum) dan ibu mertua **Hj. Siti Noordjenah** dengan tulus dan ikhlas serta kesabaran memberikan bantuan dan perhatian kepada anak-anak dan istri, selama mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian, dukungan dan bantuan moril dan spiritual kepada keluarga saya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, atas semua perhatian dan bantuan yang penulis terima serta menjadikan sebagai amal jariah dengan pahala yang tiada putus-putusnya, Amin ya Robbal Alamin

RINGKASAN

RINGKASAN

Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah dalam waktu tertentu. Indikator tersebut ditandai dengan kenaikan *output* dan meningkatnya pendapatan per kapita yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi serta perubahan struktur penggunaan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi atau susunan sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian perubahan ini diikuti pula oleh perubahan proporsi penggunaan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

Pembangunan ekonomi, juga sering diukur berdasarkan kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) yang diupayakan secara terencana (Todaro, 2003:19); biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian menurun dan diikuti dengan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa-jasa, sehingga strategi pembangunan berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara cepat. Tolok ukur pembangunan yang bersifat ekonomi tersebut harus pula didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan perumahan dan sebagainya (Todaro, 2003:19), sejalan dengan itu Persatuan Bangsa-Bangsa telah menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai indikator sosial yang dapat digunakan untuk mendampingi indikator pendapatan per kapita.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Mutu Hidup (IMH) atau *Physical Quality Life Index* (PQLI).

Sumber pendapatan daerah di antaranya adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber lainnya yang sah, secara keseluruhan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Biasanya, kenaikan pembiayaan pembangunan terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah, mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur ekonomi. Dengan demikian bila terjadi perubahan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai akibat perubahan produk domestik regional bruto (PDRB), maka dapat diketahui elastisitas pendapatan asli daerah (PAD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atau tingkat kepekaan pendapatan asli daerah (PAD) jika terjadi perubahan pada produk domestik regional bruto (PDRB). Selanjutnya transformasi tata pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik harus pula diikuti oleh transformasi fiskal, elemen penting dalam era desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah untuk mengenakan pajak (*taxing power*) kepada penduduk lokal untuk penyediaan layanan publik lokal (Khusaini, 2006:222).

Tujuan Studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menguji, pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Studi dilakukan dengan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Studi ini menganalisis pengaruh perubahan struktur ekonomi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini menggunakan data sekunder yang berbentuk runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) atau data panel (*pooled data*). Data runtut waktu (*time series*) akan menggambarkan data perubahan struktur sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier serta pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial ekonomi selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, sedangkan data silang (*cross section*) menunjukkan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 (tiga belas) daerah.

Studi ini menemukan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), berarti kedua sektor ini merupakan variabel yang berperan penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), berarti sektor ini belum berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), artinya kedua sektor ini merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Sebaliknya perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), berarti sektor ini belum berperan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), artinya pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Perubahan struktur ekonomi sektor primer, sektor sekunder dan sektor

tersier berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), artinya secara keseluruhan sektor ini berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), berarti pendapatan asli daerah berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), artinya penyerapan tenaga kerja berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi.

SUMMARY

The Effects of Economic Structure Changes on Local Own Revenue, Employment and Socio-Economic Welfare of East Kalimantan Province

Economic growth has been a macroeconomic indicator used to assess the performance of economic development of a country/region during a certain period of time. The indicator is characterized by increasing output as well as income per capita accompanied by the change in structures of economy and labor utilization. Economic structure change indicates the change in the economic sector composition or structure on Gross Regional Domestic Product (GRDP), which is then followed by change in the proportion of labor utilization in each sector.

Economic development is also often being measured based on the well-planned improvement in the production structure and employment utilization (Todaro, 2003: 19). In general during the process of development, the role of agricultural sector typically decreases and followed by the increases of manufacturing and service sectors, so that development strategy is focused on the fast growth of industrialization. The economic development indicators have to be supported by social indicators such as literacy and educational rates, quality of health care, the capacity to fulfill basic needs such as housing (Todaro, 2003: 19). In this case the United Nations (UN) has established a Human Development Index (HDI) as social indicators to be a supporting indicator of income per capita. Another indicator to measure the welfare of a society is Physical Quality of Life Index (PQLI).

Source of regional income includes local government income and other legitimate sources, which is in return this income is to finance the local

government development. Normally the increase of development expenditure is at the same time will increase the local government development. The regional income which is rooted from local own revenue is highly affected by local economic potentials includes natural resources, human resources and economical infrastructure. Therefore if there is a change in local revenue resulted from a change in the Gross Regional Domestic Product (GRDP), it is possible to measure the elasticity rate local own revenue against the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Furthermore the transformation of the centralized government to decentralized government system has to be facilitated with transformation on fiscal policy, an important element in fiscal decentralized era which is the power of local government to impose tax (taxing power) to finance the local public services (Khusaini, 2006:222).

The goal of this study is to find out and analyze as well as to examine the effects of economic structure change on the local own revenue, employment absorption rate and socio-economic welfare in East Kalimantan Province. It is an explanatory research; that is a research to find out and explain the effects of predetermined between-variables followed by hypothetical test.

This study analyzed the effects of change on primary, secondary, and tertiary sectors of economic structure against local own revenue, employment absorption, and socio-economic welfare in East Kalimantan Province. Time series data will reflects structure change data on primary, secondary and tertiary sector and also local own revenue, employment absorption, and socio-economic welfare during a period of 5 years (from 2001 to 2005), while cross section data shows the number of regency/municipalities of East Kalimantan Province, which is thirteen.

The study found that changes in the primary and tertiary sectors of economic structure significantly affect local own revenue , which means that these two sectors play an important role in the local own revenue. In the other hand changes in the secondary sector of economic structure do not significantly affect the local own revenue, meaning this sector has no significant role in the local own revenue.

The change in the primary and tertiary sectors of economic structure has significant effects on the employment absorption rate which means that these two sectors play an important role in the absorption of employment. The change in the secondary sector of economic structure, on the other hand, has an insignificant influence to employment, meaning that this has not yet played a role there. Furthermore, local own revenue significantly affects the employment, leading to an understanding on the first's essential role to the latter. The study also showed that changes in the primary, secondary, and tertiary sectors of economic structure collectively holds significant influence on the social economical welfare of the society. The local own revenue also significantly affects the social economic welfare. This is also true with employment, which leads to conclusion that employment significantly influences the socio-economic welfare.

ABSTRACT

ABSTRACT

The Effect of Economic Structure Changes on Local Own Revenue, Employment and Socio-Economic Welfare of East Kalimantan Province

The objective of this research is to analyze effect of economic structure change on local own revenue, employment and socio-economic Welfare of East Kalimantan Province.

The data collected in the research is secondary data using panel method (pooling data). The analytical units consist of all regencies/municipalities in East Kalimantan Province with time series during 2001 to 2005. The data is analyzed using Partial Least Square (PLS).

The research findings show that economic structure change of primary and tertiary sector has significant effect on local own revenue while secondary sector has insignificantly effect on local own revenue.

The economic structure change of primary and tertiary sector has significant effect on employment, secondary sector has insignificant effect on employment, while the local own revenue has significant effect on employment.

The economic structure change of primary, secondary and tertiary sectors have significant effect on socio-economic welfare.

The local own revenue significantly affects socio-economic welfare, employment significantly affect socio-economic welfare.

Keyword : *Economic Structure Change, Local Own Revenue, Employment, Socio-Economic Welfare.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Penetapan Panitia Ujian	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	xii
Summary	xvi
Abstrack	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Studi	20
1.4 Manfaat Studi	21
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	23
2.1.2 Perubahan Struktur Ekonomi	25
2.1.3 Teori Keuangan Negara	29
2.1.4 Teori Ketenagakerjaan	34
2.1.5 Kesempatan Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja	38
2.1.6 Teori Kesejahteraan Sosial	40
2.1.6.1 Teori Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>) dan Kesejahteraan Ekonomi (<i>Economic Welfare</i>).....	40
2.1.6.2 Pengukuran Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>) dan Kesejahteraan Ekonomi (<i>Economic Welfare</i>)	50

2.2 Penelitian Terdahulu	53
2.2.1 Penelitian Terdahulu Perubahan Struktur Ekonomi	53
2.2.1.1 Penelitian Chenery dan Syrquin	53
2.2.1.2 Penelitian Zadjuli	54
2.2.1.3 Penelitian Yantu	54
2.2.1.4 Penelitian Rozenov	55
2.2.1.5 Penelitian Udjianto	55
2.2.1.6 Penelitian Zagler	55
2.2.1.7 Penelitian Zweimuller	56
2.2.1.8 Penelitian Mulyadi	56
2.2.2 Penelitian Terdahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD)	57
2.2.2.1 Penelitian Mansfield, Wilford dan Wilford	57
2.2.2.2 Penelitian Bahl dan Prest	57
2.2.2.3 Penelitian Wirasmita	58
2.2.2.4 Penelitian Nersiwad	58
2.2.3 Penelitian Terdahulu Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)	59
2.2.3.1 Penelitian Sulistyaningsih	59
2.2.3.2 Penelitian Cahyono	59
2.2.4 Penelitian Terdahulu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) ...	59
2.2.4.1 Penelitian Harmini	59
2.2.4.2 Penelitian Rochaida	60
2.2.4.3 Penelitian Darussalam	60
2.2.4.4 Penelitian Rahma	61
2.2.4.5 Penelitian Soegiarto	61
2.2.4.6 Penelitian Priyagus	62
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	63
3.1 Kerangka Konseptual	63
3.2 Hipotesis	66
BAB 4 METODE PENELITIAN	68
4.1 Rancangan Penelitian	68
4.2 Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel	69
4.3 Variabel Penelitian	70
4.3.1 Klasifikasi Variabel	70
4.3.2 Definisi Operasional Variabel	71

4.4	Prosedur Pengumpulan Data	75
4.5	Teknik Analisis	76
BAB 5	ANALISIS HASIL PENELITIAN	83
5.1	Deskripsi Umum Penelitian	83
5.2	Deskripsi Variabel Penelitian	91
5.2.1	Perkembangan Struktur Ekonomi	91
5.2.2	Pendapatan Asli Daerah	93
5.2.3	Penyerapan Tenaga Kerja	94
5.2.4	Kesejahteraan Sosial Ekonomi	96
5.3	Uji Asumsi PLS : Linieritas	98
5.4	<i>Goodness Of Fit Model</i> Hasil Analisis dengan PLS.....	98
5.5	Hasil Pengujian Hipotesis	99
BAB 6	PEMBAHASAN	104
6.1	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104
6.1.1	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	105
6.1.2	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	110
6.1.3	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	112
6.2	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)	114
6.2.1	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)	114
6.2.2	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).....	116
6.2.3	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).....	117
6.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	120
6.4	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)	121

6.4.1 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE))	121
6.4.2 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE).....	124
6.4.3 Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE).....	125
6.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)	127
6.6 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi	129
6.7 Temuan	131
6.8 Keterbatasan Studi	135
BAB 7 PENUTUP	137
7.1 Kesimpulan	137
7.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	149

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	5
Tabel 1.2	Distribusi Presentase PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 s.d 2005	7
Tabel 1.3	PDRB Per Kapita Dan Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	8
Tabel 1.4	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	9
Tabel 1.5	Kontribusi Dan Peringkat PDRB ADH Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 dan 2005	11
Tabel 1.6	Pekembangan nilai Investasi menurut sektor ekonomi Atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2001 s.d 2004	12
Tabel 1.7	Perkembangan PAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	16
Tabel 1.8	Perkembangan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	16
Tabel 1.9	Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	17
Tabel 4.1	Klasifikasi Variabel Penelitian	71
Tabel 5.1	Luas Wilayah Daratan dan Luas pengolahan Laut	84
Tabel 5.2	Perkembangan Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	92
Tabel 5.3	Perkembangan PAD Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	94
Tabel 5.4	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 s.d 2005	95

Tabel 5.5	Tingkat Kesejahteraan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2001 s.d 2005	97
Tabel 5.6	Pengujian Asumsi Linearitas Variabel Penelitian	98
Tabel 5.7	Koefisien Jalur dan Hasil Pengujian Hipotesis	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perekonomian	36
Gambar 2.2 Kurva Transformasi Dalam Teori Ekonomi Kesejahteraan	46
Gambar 2.3 Ruang Utilitas	47
Gambar 2.4 Kurva Batas Kemungkinan Utilitas Lain	48
Gambar 2.5 Kurva Indiferens Sosial (Fungsi Kesejahteraan Sosial)	49
Gambar 2.6 Titik Kesejahteraan Sosial Maksimum	50
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	63
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	65
Gambar 4.1 Langkah-Langkah PLS	78
Gambar 4.2 Inner Model Pada Analisis PLS	79
Gambar 4.3 Diagram Jalur Lengkap Dengan Outer Model	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pernyataan	149
Lampiran 2 Peta Teori	150
Lampiran 3 Data	163
Lampiran 4 Hasil Analisis Deskriptif	166
Lampiran 5 Hasil Analisis PLS	176

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah dalam waktu tertentu. Indikator tersebut ditandai dengan kenaikan *output* dan meningkatnya pendapatan per kapita yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi serta perubahan struktur penggunaan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi atau susunan sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian perubahan ini diikuti pula oleh perubahan proporsi penggunaan tenaga kerja pada masing-masing sektor. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang disertai perbaikan distribusi pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi, demikian pendapat *Chenery and Srinivasan* dalam *Sarwedi* (2001:1); *Nafziger*, (1997:9-10).

Pembahasan mengenai perubahan struktur produksi yang menyertai pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh *Fisher and Clark* dalam *Chenery and Syrquin* (1975:32), berdasarkan data persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Terungkap bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja serta terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja menurut sektor. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya industrialisasi, selanjutnya dengan industrialisasi ini maka muncul kegiatan lain seperti jasa angkutan. Perubahan struktur juga dapat dilihat dari sudut pergeseran dalam kesempatan kerja, yaitu mengenai jumlah dari angkatan kerja yang mendapatkan nafkah pencahariannya di

masing-masing sektor. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian cenderung menurun sebagai persentase dari jumlah angkatan kerja secara menyeluruh. Sebaliknya jumlah tenaga kerja di sektor sekunder dan sektor tersier mengalami kenaikan.

Pembangunan ekonomi, juga sering diukur berdasarkan kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) yang diupayakan secara terencana (Todaro, 2003:19); biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian menurun dan diikuti dengan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa-jasa, sehingga strategi pembangunan berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara cepat. Tolok ukur pembangunan yang bersifat ekonomi tersebut harus pula didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan perumahan dan sebagainya (Todaro, 2003:19), sejalan dengan itu Persatuan Bangsa-Bangsa telah menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), sebagai indikator sosial yang dapat digunakan untuk mendampingi indikator pendapatan per kapita. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Mutu Hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI).

Dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian, yang meliputi kebijakan makro, kebijakan sektoral/regional serta kebijakan mikro (Tambunan, 1996:233-234). Dilihat dari peranannya, dapat dipilah beberapa peranan pemerintah yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, peranan stabilisasi dan peranan dinamisasi (Dumairy, 1996:158-160); dari peranan tadi, bagaimana seharusnya pemerintah melakukan alokasi anggaran (belanja) pembangunan untuk tiap-tiap sektor pembangunan. Pemerintah dapat melakukan kebijakan terhadap penerimaan dan pengeluaran agar tercapainya

kestabilan ekonomi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nasional. Penerimaan pemerintah dapat bersifat kontraksi terhadap pendapatan nasional (*contraction budget*), sedangkan pengeluaran bersifat ekspansi terhadap pendapatan nasional (*expantionary budget*).

Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi secara nasional, dengan semakin membaiknya indikator makro ekonomi nasional mempunyai pengaruh terhadap perekonomian suatu daerah, terutama bila dilihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keadaan ini berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja beberapa indikator makro ekonomi, merupakan fundasi yang kuat bagi perkembangan perekonomian tahun 2005. perekonomian pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh lebih cepat dan stabilitas ekonomi semakin terjaga. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor, sehingga mampu mendukung pencapaian tingkat pertumbuhan yang lebih baik.

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 2,95 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat sebesar 1,75 persen (BPS, 2006d:1). Potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam baik berupa bahan tambang maupun hutan dengan segala hasilnya merupakan aset Provinsi Kalimantan Timur yang sangat berharga. Sumber daya alam tersebut sebagian besar merupakan komoditi ekspor yang memiliki daya jual tinggi di pasar internasional, sehingga peranan ekspor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur menurut penggunaan menjadi primadona dan dominan. Pada periode Tahun 2000 sampai

dengan Tahun 2005, total nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku meningkat drastis, yakni dari 91,92 triliun rupiah di tahun 2000 menjadi sebesar 182,52 triliun rupiah di tahun 2005, walaupun pada tahun 2002, nilai ekspor antar negara Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena turunnya volume ekspor terutama di sektor migas dan juga turunnya kurs dari 9.730,17 rupiah per US\$ tahun 2001 menjadi 8.835,72 rupiah per US\$ pada tahun 2002. Sedangkan komponen ekspor antar provinsi sejak tahun 2000 sampai 2005 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti, atau dengan kata lain ekspor Provinsi Kalimantan Timur dominan (BPS, 2006d:25).

Perkembangan ekonomi suatu daerah merupakan gambaran kinerja perekonomian daerah seperti yang dapat diukur dari indikator makro ekonomi di antaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi dan perkembangan ekspor – impor. Daerah yang memiliki karunia sumber daya alam (*initial endowment*) berlimpah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibanding daerah lain yang relatif miskin *initial endowment*nya. Daerah yang memiliki aneka ragam *initial endowment* seperti Provinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah yang dapat mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dalam jangka waktu tertentu, mengingat *initial endowment* yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur, pada umumnya bersifat sulit untuk diperbaharui (*unrenewable resources*).

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005, relatif membaik yakni mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku seperti terlihat pada Tabel 1.1. halaman 5, Pada tahun 2001 besaran Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 91,89 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2002

yang mencapai Rp 93,77 triliun dan pada tahun 2003 besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 106,45,02 triliun, Selanjutnya memasuki tahun 2004 besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 133,70 triliun, akibat peningkatan harga hasil-hasil industri pengilangan yang meningkat sebesar 23,08 persen, harga pada industri barang kayu dan hasil-hasilnya sebesar 18,51 persen serta pada harga industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 28,53 persen. Kemudian pada tahun 2005 semakin mengalami peningkatan mencapai Rp 176,13 triliun, kenaikan ini dipicu oleh semakin meningkatnya harga dari produk pertambangan migas sebesar 10,50 persen dan hasil produk dari barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 18,06 persen di pasar internasional. Demikian pula nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan mengalami kenaikan dari Rp 86,35 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 87,85 triliun pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 mencapai sebesar Rp 89,48 triliun, sedangkan pada dua tahun terakhir 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp 91,05 triliun dan Rp 93,76 triliun. Secara keseluruhan menggambarkan peningkatan produksi pada sektor-sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001 s.d 2005 (TRILIUN RUPIAH)

Tahun	PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)	PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
2001	91.890,39	86.348,10	—
2002	93.769,93	87.850,40	1,74
2003	106.453,60	89.483,54	1,86
2004	133.704,07	91.050,43	1,75
2005	176.132,17	93.735,46	2,95

Sumber: PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2000 s.d 2005.

Periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur terus bergerak kearah positif. Laju pertumbuhan

ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2002 sebesar 1,74 persen, lalu meningkat pada tahun 2003 yang mencapai 1,86 persen. Pada tahun 2004 turun menjadi 1,75 persen, serta Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 sebesar 2,95 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir 2001 s.d 2005 yang ditunjukkan pada Tabel 1.2. halaman 7, relatif tidak banyak mengalami pergeseran, masih didominasi oleh sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam (SDA), terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan,

Dalam tahun 2001 sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 41,10 persen diikuti sektor pertambangan menyumbang sebesar 35,65 persen, sementara peran dari sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 6,38 persen kemudian peranan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai sebesar 3,37 persen. Pada tahun 2002 peranan sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang dominan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan sumbangan sebesar 40,07 persen, kemudian pada tahun 2003 menurun dengan peranan sebesar 36,58 persen, penurunan ini terjadi pada sub sektor industri pengolahan migas, baik industri pengilangan minyak dan industri pengolahan gas alam cair (*Liquid Natural Gas* atau LNG) yang hanya menyumbang sebesar 23,79 persen dan sub sektor industri pengolahan non migas sebesar 6,58 persen; Sementara sektor pertambangan pada tahun 2002 dan 2003 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 34,35 persen dan 37,92 persen. Beberapa sektor lainnya relatif kecil peranannya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Selama tahun 2001 s.d 2005, sektor yang berbasiskan sumber daya alam (SDA) seperti sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan masing-masing memberikan sumbangan sebesar 40,97 persen dan

sebesar 37,72 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005.

Tabel 1.2
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2001 s.d 2005 (%)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	6,64	7,12	6,99	6,36	5,57
a. Tanaman Bahan Makanan	1,01	1,31	1,29	1,12	1,04
b. Tanaman Perkebunan	0,62	0,70	0,67	0,66	0,61
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,56	0,60	0,59	0,53	0,45
d. Kehutanan	3,22	3,15	2,94	2,51	2,04
e. Perikanan	1,24	1,34	1,49	1,53	1,43
2. Pertambangan Dan Penggalian	35,65	34,35	37,92	39,61	40,97
a. Minyak dan Gas Bumi	25,78	22,63	26,56	29,02	29,08
b. Pertambangan Tanpa Migas	9,45	11,24	10,87	10,14	11,51
c. Penggalian	0,42	0,47	0,49	0,45	0,38
3. Industri Pengolahan	41,10	40,07	36,58	36,68	37,72
a. Industri Migas	35,14	33,36	30,00	30,89	32,63
a.1. Pengilangan Minyak Bumi	6,42	7,78	6,20	7,22	8,00
a.2. Gas Alam Cair (LNG)	28,72	25,58	23,79	23,66	24,63
b. Industri Tanpa Migas	5,96	6,71	6,58	5,79	5,09
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,23	0,27	0,32	0,31	0,30
a. Listrik	0,19	0,23	0,28	0,26	0,27
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
5. Bangunan	2,67	2,97	2,94	2,65	2,30
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,38	6,66	6,39	6,36	5,87
a. Perdagangan Besar dan Eceran	5,61	5,79	5,53	5,61	5,19
b. Hotel	0,17	0,19	0,19	0,16	0,13
c. Restoran	0,60	0,68	0,67	0,59	0,55
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,37	3,91	4,01	3,62	3,39
a. Pengangkutan	2,93	3,40	3,51	3,16	2,97
b. Komunikasi	0,39	0,36	0,40	0,40	0,42
b.1. Pos dan Telekomunikasi	0,38	0,35	0,39	0,39	0,41
b.2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
8. Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	1,94	2,08	2,05	1,95	1,72
9. Jasa-Jasa	2,01	2,57	2,80	2,48	2,17
a. Pemerintahan Umum	1,67	2,20	2,45	2,16	1,87
b. Swasta	0,34	0,37	0,35	0,32	0,29
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2000 s.d 2005.

Tabel 1.3 halaman 8, memberikan gambaran perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d 2005 mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2001, pada saat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,73 persen; angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 33,54 juta dan Pendapatan per kapita sebesar Rp 12,73 juta. Kemudian memasuki tahun

2002, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,74 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Pendapatan per kapita masih mengalami peningkatan yang berarti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 33,20 juta dan Pendapatan per kapita sebesar Rp 12,65 juta.

Tabel 1.3
PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN PER KAPITA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001 s.d 2005

Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)
2001	33,54	12,73
2002	33,20	12,65
2003	32,90	12,55
2004	32,92	12,52
2005	33,35	12,68

Sumber: PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2000 s.d 2005

Kemudian memasuki tahun 2003, dengan pertumbuhan ekonomi relatif baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,86 persen, ternyata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Pendapatan per kapita masih mencapai sebesar Rp 32,90 juta dan Rp 12,55 juta. Demikian pula untuk tahun 2004 dan tahun 2005, selain pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 1,75 persen menjadi 2,95 persen, juga diikuti kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp 32,92 juta naik menjadi Rp 33,35 juta dan Pendapatan per kapita masing-masing sebesar Rp 12,52 juta dan Rp 12,68 juta. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d. tahun 2005 relatif membaik, ditunjukkan dengan angka pertumbuhan yang positif, berarti telah terjadi kenaikan *output*, oleh karena itu diharapkan terjadi pula peningkatan penggunaan tenaga kerja. Kesempatan kerja dalam pengertiannya adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*), dari lapangan kerja yang masih lowong tersebut kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja, yang datang dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi pemerintah (Tambunan, 2001 : 82).

Hubungan antara pertumbuhan *output* dengan peningkatan kesempatan kerja dalam suatu perekonomian, disebutkan bahwa peningkatan penggunaan tenaga kerja, menyebabkan *output* bertambah. Tenaga kerja merupakan faktor produksi (*input*) yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, selain modal dan teknologi, semakin banyak faktor produksi yang dimiliki maka relatif besar pula produksi (*output*) yang dapat dihasilkan. Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas kerja penduduknya (Kuncoro,2006:174), produktivitas tersebut harus didukung tingkat investasi dan sumberdaya manusia yang memadai. Selanjutnya gambaran mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan membaiknya perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2001, disertai pula dengan kenaikan jumlah orang yang bekerja, jika pada tahun 2001 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.019.299 orang, maka pada tahun 2002 meningkat 1.008.349 orang, kemudian pada tahun 2003 sebesar 1.077.379 orang. Perkembangan jumlah orang bekerja ini di samping faktor kebutuhan pasar juga ditunjang oleh berbagai program pemerintah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan (rasio) antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja.

Tabel 1.4
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2001 s.d 2005 (ORANG)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	373.213	349.892	394.677	321.542	369.579
2. Pertambangan dan Penggalian	43.708	47.505	43.559	35.239	46.557
3. Industri Pengolahan	114.694	101.138	107.724	107.513	93.097
4. Listrik,Gas dan Air Bersih	2.623	5.424	3.929	2.945	7.496
5. Bangunan	66.122	63.667	74.412	91.050	76.378
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	194.917	202.217	200.100	219.882	226.089
7. Pengangkutan dan Komunikasi	59.373	61.856	71.175	79.830	79.305
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	27.312	12.578	21.478	25.255	10.857
9. Jasa-Jasa	137.337	150.072	160.325	158.238	168.736
Jumlah	1.019.299	1.008.349	1.077.379	1.041.494	1.078.094

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Kalimantan Timur 2005

Tabel 1.4 halaman 9, memberikan gambaran mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, gambaran ini menunjukkan komposisi penduduk yang bekerja pada sektor ekonomi, misalnya pada tahun 2003 sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar menjadi tempat bekerja atau mencari nafkah bagi penduduk, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing sebesar 394.677 orang dan 200.100 orang. Meskipun pembangunan ekonomi menyebabkan perubahan kemajuan ekonomi yang cukup besar, akan tetapi pada saat yang sama masih terdapat permasalahan lain seperti ketimpangan ekonomi, baik antar sektor ekonomi, antardaerah, perdesaan dan perkotaan, maupun antar golongan masyarakat (Udjianto, 1999:2).

Tabel 1.5 halaman 11, menunjukkan perkembangan antardaerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari perbedaan peranan/kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) masing-masing Kabupaten/Kota terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2000 daerah dengan peringkat tertinggi adalah Kota Bontang yang mempunyai peranan/kontribusi sebesar 33,27 persen terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, besarnya peranan ini merupakan sumbangan dari kekayaan sumber daya alam (SDA), yang merupakan sumbangan industri pengolahan migas khususnya industri gas alam cair; Kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 28,48 persen merupakan sumbangan dari minyak dan gas bumi, batu bara, emas dan perak serta aneka hasil hutan. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda masing-masing berada pada peringkat tiga dan empat. Kota Balikpapan dengan kontribusi sebesar 11,94 persen didukung oleh sektor industri pengolahan migas, sementara

Kota Samarinda dengan kontribusi sebesar 7,39 persen yang merupakan dominasi sektor perdagangan.

Tabel 1.5
KONTRIBUSI DAN PERINGKAT PDRB ADH BERLAKU
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2000 DAN 2005

Kabupaten/Kota	2000		2005	
	Kontribusi (%)	Peringkat	Kontribusi (%)	Peringkat
Bontang	33,27	1	27,91	2
Kutai Kartanegara	28,48	2	33,70	1
Balikpapan	11,94	3	12,71	3
Samarinda	7,39	4	7,47	4
Kutai Timur	6,68	5	7,01	5
Berau	2,66	6	2,08	6
Pasir	2,53	7	1,95	7
Kutai Barat	1,84	8	1,82	8
Tarakan	1,52	9	1,75	9
Penajam Paser Utara	1,48	10	1,10	11
Bulungan	1,01	11	0,88	12
Nunukan	0,78	12	1,20	10
Malinau	0,41	13	0,43	13
Total	100,00	xx	100,00	xx

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha 2000 s.d 2005.

Delapan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi relatif rendah terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masing-masing kurang dari 7 persen; kontribusi terendah adalah dari Kabupaten Malinau hanya sebesar 0,41 persen.

Tahun 2005, kontribusi terbesar terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 33,70 persen, berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kota Bontang yang didukung oleh meningkatnya kapasitas produksi industri pengolahan gas alam cair (*Liquid Natural Gas* atau LNG) oleh PT.Badak, peningkatan kapasitas tersebut karena adanya penemuan cadangan gas baru serta telah beroperasinya 8 train pada beberapa waktu yang lalu,; dengan kontribusi sebesar 27,91 persen; Kabupaten Kutai Timur dan Berau merupakan daerah yang

mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,58 persen dan 2,66 persen. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda mengalami kenaikan meski peringkatnya tidak berubah, yakni sebesar 12,71 persen dan 7,47 persen, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, merupakan daerah yang turut mengalami peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB).

Selama masa pemulihan ekonomi nasional dari masalah krisis yang melanda Indonesia, keadaan investasi di Provinsi Kalimantan Timur masih fluktuatif namun memiliki kecenderungan ke arah peningkatan yang semakin membaik. Sebagai gambaran bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan pada Tabel 1.6

Tabel 1.6.
PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI MENURUT SEKTOR EKONOMI
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2001 s.d 2004 (Milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	2001	2002	2003	2004	2000 - 2004
1. Pertanian	383	402	445	451	2.026
2. Pertambangan Dan Penggalian	2.845	2.916	3.116	3.151	14.658
3. Industri Pengolahan	3.242	3.604	3.932	4.036	17.639
4. Listrik, Gas Dan Air Minum	284	300	318	333	1.495
5. Bangunan	861	883	930	956	4.351
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	464	514	585	627	2.611
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	771	809	9334	1.099	4.250
8. Keuangan dan Persewaan	297	350	369	405	1.683
9. Pemerintahan	2.295	2.599	2.715	2.735	11.723
10. Jasa - Jasa	54	56	60	62	283
Total Investasi	11.411	12.377	13.383	13.857	60.719

Sumber: Perhitungan dan Penyusunan ICOR Provinsi Kalimantan Timur 2000 s.d 2004.

Bila diamati pertumbuhan riil nilai investasi menurut sektor berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama periode 2001 s.d 2004, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu Sektor Pemerintahan,

Industri Pengolahan, Transportasi, dan Komunikasi, dan Sektor Perdagangan serta sektor Bangunan. Secara umum, Pertumbuhan nilai investasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d 2004 menurut sektor ekonomi bergerak sangat fluktuatif di mana pada tahun 2001 sebesar 17,74 persen, dan menurun menjadi 8,47 persen pada tahun 2002, kemudian tahun 2003 sebesar 8,12 persen, bahkan pada tahun 2004 sangat drastis mengalami penurunan hanya sebesar 3,54 persen dan tahun 2005 meningkat lagi menjadi 9,35 persen (Bappeda dan BPS, 2005:70-71). Kemudian sektor pemerintahan secara umum rata-rata selama periode 2001 s.d 2004 tumbuh sebesar 16,42 persen per tahun, dan pertumbuhan sektor ini merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2001 sektor Pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 13,67 persen dan pada tahun 2002 tumbuh lebih cepat hampir tiga kali lipat, yakni sebesar 50,52 persen. Hal ini dapat dikatakan sebagai dampak dari pelaksanaan Otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan, mengingat relatif terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, sehingga diperlukan ketajaman prioritas dalam menentukan besarnya alokasi anggaran pembangunan untuk masing-masing sektor pembangunan. Sumber dana bagi pembangunan daerah yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang otonomi daerah meliputi : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber dana tersebut dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) setiap tahunnya dan setelah mendapat pengesahan dari DPRD, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah di antaranya adalah

pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber lainnya yang sah, secara keseluruhan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Biasanya, kenaikan pembiayaan pembangunan terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah, mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur ekonomi. Dengan demikian bila terjadi perubahan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai akibat perubahan produk domestik regional bruto (PDRB), maka dapat diketahui elastisitas pendapatan asli daerah (PAD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) atau tingkat kepekaan pendapatan asli daerah (PAD) jika terjadi perubahan pada produk domestik regional bruto (PDRB). Selanjutnya transformasi tata pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik harus pula diikuti oleh transformasi fiskal, elemen penting dalam era desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah untuk mengenakan pajak (*taxing power*) kepada penduduk lokal untuk penyediaan layanan publik lokal (Khusaini, 2006:222).

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Di mana besar kecilnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sangat dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah, mencakup sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur ekonomi. Adanya perbedaan potensi ekonomi serta sumber daya alam dan manusia antar daerah menimbulkan kesenjangan (*disparitas*) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihimpun (Alisjahbana, 1998:3). Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sumber pembiayaan pembangunan antar daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Susetyo, 1998:1). Indikator yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan kemampuan antar daerah adalah kapasitas pajak (*tax capacity*), usaha pajak (*tax*

effort) dan kinerja pajak (*tax performance*), untuk menganalisis menggunakan pendekatan model rasio pajak, model ini menunjukkan pengaruh pendapatan per kapita dan sektor ekonomi terhadap rasio penerimaan daerah, di mana disebutkan bahwa rasio penerimaan daerah merupakan perbandingan antara penerimaan daerah dengan pendapatan regional, kemudian sektor ekonomi merupakan determinan kapasitas penerimaan daerah, sehingga bila terjadi perubahan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) akan berpengaruh terhadap kapasitas penerimaan daerah. Perkembangan kemampuan Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur dalam menghimpun/mengumpulkan dana, termasuk daerah berkemampuan relatif tinggi, namun antar daerah Kabupaten/Kota menunjukkan perbedaan dalam hal penerimaan daerah, sebagai akibat perbedaan 'karunia' sumber daya, pembangunan dan urbanisasi (Devas, 1989:72; Alisjahbana, 1998:7).

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang merupakan dana bagi peningkatan pembangunan daerah Kalimantan Timur; Sumber-sumber penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Secara keseluruhan penerimaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d 2005 mengalami kenaikan dari sebesar Rp 1,73 triliun pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2005 naik menjadi Rp 2,23 triliun. Kenaikkan penerimaan ini, seperti terlihat pada Tabel 1.7 halaman 16, merupakan sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 195,6 milyar pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp 698,0 milyar; pada Tabel 1.8 halaman 16 menunjukkan besarnya Dana perimbangan pada tahun 2001 sebesar Rp 1,532 triliun kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp 1,535 triliun. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2001 s.d 2005, realisasinya meningkat dari Rp 195,61 milyar menjadi Rp 698,02 milyar, meskipun

kontribusinya terhadap penerimaan daerah relatif kecil namun sudah memperlihatkan peningkatan kontribusi.

Tabel 1.7
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005
(MILYAR RUPIAH)

Sumber PAD	2001	2002	2003	2004	2005
Pajak Daerah	144.838	282.074	388.364	520.787	531.745
Retribusi Daerah	26.521	66.353	72.622	99.531	111.551
Laba BUMD	7.705	18.500	19.024	54.682	19.915
PAD Lainnya	16.543	97.208	124.407	30.630	34.810
Pendapatan Asli Daerah	195.607	464.135	604.418	705.631	698.021

Sumber : Laporan Perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2005.

Kemudian pada Tabel 1.8, menunjukkan sumber penerimaan yang relatif besar terhadap penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan, pada tahun 2001 terjadi peningkatan yang sangat tajam mengingat tahun ini merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, dengan kontribusinya terhadap penerimaan daerah sebesar Rp 1,53 triliun, meningkat pada tahun 2004 sebesar Rp 1,83 triliun namun kontribusi tersebut pada tahun 2005, turun menjadi Rp 1,54 triliun, disebabkan turunnya kontribusi dari komponen bagi hasil bukan pajak, yaitu dari sumber daya alam (SDA). Selanjutnya penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2001 sebesar Rp 242.160 milyar meningkat menjadi sebesar Rp 265.590 milyar.

Tabel 1.8
PERKEMBANGAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005
(TRILIUN RUPIAH)

Sumber Dana Perimbangan	2001	2002	2003	2004	2005
Bagi Hasil Pajak	111.521	146.149	220.792	242.336	214.500
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.178.919	1.104.384	1.279.982	1.318.054	1.055.100
Dana Alokasi Umum	242.160	257.110	267.584	266.775	265.590
Dana Perimbangan	1.532.600	1.507.643	1.768.358	1.827.165	1.535.190

Sumber : Laporan Perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang dapat dicapai, namun sering disertai berbagai masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan struktural (Syahrir dalam Kuncoro, 1997:9). Indikator pembangunan senantiasa diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dalam Kuncoro, 1997:17). Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*), oleh karena itu, diperlukan indikator lainnya yaitu indikator sosial (*social indicators*), seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan Indeks Mutu Hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI).

Pada Tabel 1.9 digambarkan perkembangan indikator sosial seperti Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d 2005, sebagai berikut :

Tabel 1.9
PERKEMBANGAN
ANGKA MELEK HURUF (AMH) DAN ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005
(PERSENTASE)

U r a i a n	2001	2002	2003	2004	2005
Angka Melek Huruf	94,17	94,87	94,44	95,05	94,44
Angka Harapan Hidup	68,20	69,70	69,40	69,70	70,30

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006.

Perkembangan indikator sosial di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 s.d 2005, yang ditunjukkan dengan Angka Melek Huruf (AMH) rata-rata sebesar 94 persen dan Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata sebesar 69 persen. Hal ini berarti pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur, dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) tergolong dalam kategori tinggi, sedangkan dari Angka Harapan Hidup tergolong dalam kategori sedang.

Berdasarkan uraian mengenai variabel makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, seperti perubahan struktur ekonomi, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi, maka diperoleh gambaran bahwa hubungan antara variabel tersebut mempunyai arti yang penting untuk dianalisis. Artinya selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, meskipun struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian, kemudian terjadi pula perubahan pada pendapatan asli daerah, sedangkan penyerapan tenaga kerja juga mengalami perubahan meski relatif rendah. Selama periode ini pendapatan per kapita relatif stabil. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan struktur ekonomi akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, apakah perubahan struktur ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial ekonomi, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini maka diperlukan studi yang mendalam dan komprehensif terhadap keterkaitan antara variabel makro tersebut, sehingga studi ini sangat berarti untuk menjelaskan pengaruh variabel perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi. Studi dalam bentuk Disertasi dengan judul **“Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dan judul, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur ?
3. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur ?
4. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur ?
5. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur ?
6. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur ?
7. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur ?
8. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur ?
9. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur ?
10. Apakah Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur ?
11. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur ?

12. Apakah Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur ?

1.3. Tujuan Studi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusun tujuan studi sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
12. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Manfaat Studi

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini antara lain :

1. Diharapkan memberikan kontribusi pengembangan ilmu ekonomi, terutama perubahan struktur ekonomi dan keuangan daerah.
2. Diharapkan sebagai dasar atau informasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi dan keuangan daerah.
3. Diharapkan dapat memberikan informasi untuk semakin mendayagunakan kemampuan keuangan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

4. Diharapkan berguna sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah dan keuangan daerah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA****2.1. Landasan Teori****2.1.1. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi**

Pandangan para ekonom terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan perkembangan ekonomi, sedangkan kelompok kedua memandang bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi.

Baran dalam Machmud (1996:18) berpendapat bahwa, "*let economic growth (or development) be defined as an increase overtime per capita output of material goods*". Sedangkan Kuznets dalam Machmud (1996 : 18) berpendapat bahwa: "*In fact, the usual definition of economic growth – a sustained increase in a nation's total and per capita product and most often accompanied by a sustained and significant rises in population ...*".

Pendapat Baran dan Kuznets ini jelas menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan perkembangan ekonomi yakni peningkatan pendapatan per kapita atau produksi total. Dengan demikian ukuran keberhasilan dari pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan per kapita atau produksi total.

Baran dalam Jhingan (2000:5), lebih lanjut mengemukakan bahwa gagasan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, mengesankan suatu peralihan ke sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama, yang telah lama dipergunakan. Sedangkan Lewis dalam Jhingan (2000:5) mengatakan bahwa seringkali hanya mengacu kepada pertumbuhan dan kepada kemajuan atau perkembangan hanya sebagai variasi. Dengan demikian jelas bahwa istilah pertumbuhan ekonomi dapat dipakai sebagai sinonim dari perkembangan ekonomi.

Berbeda dengan pendapat Kindleberger (1983:21) bahwa :

“Growth and development are often used synonymously in economic discussion and this usage is entirely acceptable. But where two words exist, there is a point in seeking to draw a distinction between them. Implicit in general usage, and explicit in what follows, economic growth means more output and changes in the technical and institutional arrangements by which it is produced. Growth may well imply not only more output, but also more inputs and more efficiency.i.e, an increase in output per unit of input. Development goes beyond these to imply changes in the structure of outputs and in the allocation of inputs by sector”.

Chenery dalam Machmud (1996 : 19), juga menyebutkan bahwa :

“Economic development can be viewed as a set of interrelated changes in the structure of an economy that are required for its continued growth. They involve the composition of demand, production, and employment as well as the external structure of trade and capital flows”.

Pendapat Kindleberger dan Chenery tersebut, jelas menyebutkan bahwa pertumbuhan berbeda dengan perkembangan ekonomi. Perbedaannya terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam *output* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak, sedangkan perkembangan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita yang diringi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi.

Schumpeter *and* Hicks dalam Jhingan (2000:4) lebih lanjut berpendapat bahwa istilah perkembangan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi bagi negara maju. Menurut Schumpeter bahwa perkembangan merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stationer yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya; sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Hicks dalam Jhingan (2000:4) mengemukakan bahwa masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal; sedangkan masalah negara maju terkait pada pertumbuhan, karena kebanyakan dari sumber daya mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Bonne dalam Jhingan (2000:4-5) berpendapat bahwa, “Perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarah, pengaturan, dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan”. Begitulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan negara terbelakang, sedang ciri pertumbuhan spontan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha.

Beberapa pendapat terakhir (Schumpeter, Hicks, *and* Bonne), jelas menyebutkan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan perkembangan ekonomi. Perbedaannya terletak pada implikasi dari kedua istilah tersebut. Pertumbuhan digunakan untuk negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi digunakan untuk negara terbelakang. Jika dilihat dari keterkaitan kedua istilah tersebut, maka perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga. Perubahan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi (Jhingan,2000:5).

2.1.2. Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dari negara-negara di dunia telah mengalami perubahan dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perubahan struktur tersebut tercermin dalam peranan sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan produk nasional bruto (PNB) maupun besarnya persentase tenaga kerja pada

masing-masing sektor ekonomi tersebut (Kamaluddin, 1998:29). Sumbangan sektor primer dalam pembentukan produk nasional bruto (PNB) akan cenderung semakin berkurang, sedangkan peranan sektor sekunder serta sektor tersier akan semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, akan semakin kecil peranan pertanian dalam menyediakan dan menyerap kesempatan kerja, dan sebaliknya sektor industri akan semakin penting dan semakin meningkat peranannya dalam menampung tenaga kerja (Kamaluddin, 1998:29).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu : (1) Proses, (2) *Output* Per kapita, dan (3) Jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini nampak aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Awal dasawarsa tahun limapuluhan hingga pertengahan tahun enam puluhan, pembangunan disamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena orang percaya, hasil-hasil pembangunan akan dengan sendirinya menetes ke bawah (*Trickle Down Effect*) sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang sekarang tergolong maju. Jadi yang perlu diusahakan dalam pembangunan adalah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Bahwa pada tahap awal pembangunan terdapat tingkat kesenjangan pembagian pendapatan yang menyolok seperti yang oleh

simon Kuznet dalam penelitian empirisnya mengenai negara-negara maju, yang dikenal dengan kurva U terbalik. (Todaro, 2003:240), adalah suatu hal yang wajar. Keadaan ini juga akan dilalui oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam proses pembangunannya. Selanjutnya Todaro mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Kuznet dalam Anwar (1988: 51–53) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.

Perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan terjadinya perubahan sisi permintaan dan sisi penawaran, selain secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh intervensi pemerintah (Tambunan, 2001:75). Selain memperbesar permintaan barang-barang yang ada juga memperbesar pasar bagi barang-barang baru bukan makanan, perubahan ini mendorong pertumbuhan industri baru dan meningkatkan laju pertumbuhan *output* industri.

Struktur ekonomi menurut ahli-ahli ekonomi, akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan. Serangkaian perubahan struktural dalam perekonomian dapat terjadi *by Process* atau *by Design*. Perubahan struktural *by Process* adalah apabila perubahan struktur ekonomi terjadi secara alamiah. Jadi arah pergerakan suatu perekonomian tidak ditentukan lebih dahulu, melainkan dibiarkan berjalan secara alamiah. Perubahan struktural *by Design* adalah apabila struktur ekonomi berubah mengikuti rencana atau pola yang sudah ditentukan

terlebih dahulu. Jadi sudah diketahui ke mana arah ekonomi akan bergerak. Beberapa hal yang sering dianggap indikator sebagai perubahan struktural tersebut adalah struktur produksi (khususnya produksi industri), struktur perdagangan dan struktur kesempatan kerja.

Gejala transformasi struktur ekonomi yang diamati Kuznet, memperlihatkan pergeseran yang berjalan dengan pesat sekali, yaitu pergeseran menjauhi sektor pertanian menuju sektor industri, sejalan dengan kenaikan dalam pendapatan per kapita. Hubungan ini bisa dijelaskan dengan menggunakan hukum Engel (Chenery and Syrquin, 1975:79 – 80). Hukum Engel menjelaskan bahwa untuk masyarakat yang telah cukup memenuhi kebutuhan pokoknya, pada saat terjadi kenaikan pendapatan maka bagian dari pendapatan yang digunakan untuk tujuan konsumsi pangan akan menurun. Atau dengan kata lain, *Income Elasticity of Demand* untuk pangan adalah kurang dari satu. Sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi non pangan, khususnya konsumsi barang industri menjadi bertambah besar.

Perubahan struktur ekonomi dapat dilihat secara relatif dari persentase nilai tambah (*Added Value*) terhadap PDB untuk sektor pertanian dan industri. Kontribusi sektor terhadap PDB adalah sebagai indikator untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi. Di samping itu, indikator kontribusi sektor juga dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana tahap industrialisasi suatu negara / regional. Perubahan struktur ekonomi itu ditunjukkan dengan membandingkan kontribusi sektor pertanian dengan sektor industri. Cara menghitung kontribusi sektor (K_s) adalah (Widodo, 2000:21) :

$$K_s = \frac{Vas (Rp)}{PDRB (Rp)} \times 100\%$$

di mana Vas adalah nilai tambah sektor ke i menurut harga berlaku atau harga konstan. Perhitungan menurut harga berlaku dimaksudkan untuk membedakan

nilai barang dan jasa yang masih dipengaruhi oleh kenaikan harga dan sebenarnya setelah menghilangkan pengaruh kenaikan harga. Perubahan struktur ekonomi atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlangsung terjadi perbedaan dalam laju pertumbuhan produksi secara riil dari setiap sektor.

Keterkaitan studi ini dengan teori yang telah diuraikan, memiliki relevansi karena dalam studi telah memasukkan variabel sektor ekonomi yang terdiri dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier sebagai variabel atau determinan yang penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD), seperti yang dijelaskan dengan teori kapasitas pajak (*tax capacity*) oleh Bahl (1978) serta perubahan struktur ekonomi yang dijelaskan oleh Chenery dan Syrquin (1975).

2.1.3. Teori Keuangan Negara

Menurut Suparmoko (1997:3) keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya terhadap perekonomian tersebut. Selanjutnya Halim (2001:10) menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Terdapat unsur penting dari pengertian keuangan negara tadi, yaitu semua hak dan kewajiban untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah. Sedangkan kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan dengan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memainkan

peranannya dalam kegiatan ekonomi melalui fungsi anggaran karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi, sehingga kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk membimbing, memberikan koreksi dan melengkapinya (Musgrave dan Musgrave, 1993:3-5).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka terjadi perubahan pengeluaran masyarakat serta terjadi pula perubahan kemampuan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Perekonomian dengan pendapatan rendah, mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pajak dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju, kemudian tidak terdapatnya dasar pajak yang memadai di negara-negara berpendapatan rendah dengan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah rendah, sehingga sebagai penyebab terhambatnya pengumpulan pajak di negara-negara tersebut (Musgrave dan Musgrave, 1993:135).

Dalam rangka membiayai pengeluaran daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak di daerah yang sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Adapun jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) menurut Bratakusumah (2002:173), adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah, dan jasa giro.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah daerah berarti semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum (publik), tidak saja meliputi kegiatan pemerintah daerah saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah daerah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. (Dumairy, 1996:157), untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan peranannya sebagai pengalokasi, pendistribusi dan stabilisasi dari sumber penerimaannya.

Penerimaan daerah sendiri, yang tercermin dari besar kecilnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Studi berkaitan dengan indikator tadi telah dilakukan beberapa ahli di antaranya Bahl (1978:572-574), Prest (1978:14-21), Bird (1978:4045) dan Suparmoko (1997:320-322) dengan analisis mengarah pada perbandingan kemampuan rasio pajak (*tax ratio*) antar negara atau juga dapat dilakukan untuk antar daerah, di mana rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (PDB). Dengan demikian kapasitas pajak daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional.

Ada empat konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perpajakan (Bird, 1978:51) yaitu 1). *Tax elasticity*, 2). *Tax bouyancy*, 3). *Tax capacity*, 4). *Tax effort*. Konsep pertama dan kedua digunakan untuk mengetahui struktur alternatif dan hubungannya dengan pembangunan, dan konsep ketiga dan keempat untuk mengetahui kemampuan suatu daerah/negara dalam memobilisasi potensi pajak.

Pendekatan elastisitas di dalam mengukur besar kecilnya penerimaan daerah dan pengeluaran pembangunan akan memberikan hasil perhitungan sebagai

berikut (Rahmadi, 1999:42-43), hasil perhitungan elastisitas penerimaan daerah memberikan pengertian :

1. Elastisitas Penerimaan (EP_n) > 1 , artinya sumber penerimaan daerah adalah elastis (*High Elasticity*) maksudnya perubahan/kenaikkan penerimaan daerah lebih besar dari perubahan/kenaikkan PDRB, yang memberikan konsekuensi bahwa penerimaan daerah mampu membiayai seluruh kegiatan pengeluaran pembangunan daerah atau akan memperkuat fundamental perekonomian daerah karena memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tabungan pemerintah daerah.
2. Elastisitas Penerimaan (EP_n) < 1 , artinya sumber penerimaan daerah adalah inelastis (*Low Elasticity*) maksudnya perubahan/kenaikkan penerimaan daerah lebih kecil dari perubahan/kenaikkan PDRB, yang memberikan konsekuensi bahwa penerimaan daerah kurang mampu atau tidak memperkuat fundamental perekonomian daerah, karena memberikan kontribusi yang kecil sekali atas tabungan pemerintah daerah.
3. Elastisitas Penerimaan (EP_n) $= 1$, berarti sumber penerimaan daerah perubahan/kenaikkannya adalah proporsional dengan perubahan/kenaikkan PDRB.

Hasil perhitungan elastisitas pengeluaran pembangunan memberikan pengertian sebagai berikut (Rahmadi, 1999:43):

1. Elastisitas Pengeluaran Pembangunan (EPP_b) > 1 , berarti sumber pengeluaran pembangunan perubahan/kenaikkannya lebih besar dari perubahan/kenaikkan PDRB, yang memberikan konsekuensi terlalu besarnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan dan harus ditutup dengan penerimaan pembangunan.

2. Elastisitas Pengeluaran Pembangunan ($EPPb$) < 1 , adalah kondisi yang ideal bagi sumber pengeluaran pembangunan. Dimana perubahan/kenaikkan pengeluaran pembangunan lebih kecil dari perubahan/kenaikkan PDRB, yang berarti akan memperkuat fundamental perekonomian daerah karena mengurangi defisit yang harus ditutup dengan penerimaan pembangunan.
3. Elastisitas Pengeluaran Pembangunan ($EPPb$) $= 1$, berarti pengeluaran pembangunan perubahan/kenaikkannya adalah proporsional dengan perubahan/kenaikkan PDRB.

Ketergantungan keuangan daerah terhadap keuangan pemerintah pusat, indikatornya ditentukan oleh besar kecilnya perbandingan antara penerimaan daerah (EPn) dengan pengeluaran pembangunan ($EPPb$). Perbandingan itu adalah dengan melihat elastisitas dari masing-masing penerimaan dan pengeluaran pembangunan daerah (Rahmadi, 1999:44): .

1. Jika elastisitas penerimaan daerah lebih besar dari elastisitas pengeluaran pembangunan ($EPn > EPPb$), berarti penerimaan daerah dalam jangka panjang mampu membiayai pengeluaran pembangunan, sehingga tidak ada ketergantungan kepada bantuan pembangunan pemerintah pusat.
2. Jika elastisitas penerimaan daerah lebih kecil dari elastisitas pengeluaran pembangunan ($EPn < EPPb$), berarti penerimaan daerah dalam jangka panjang tidak mampu membiayai pengeluaran pembangunan, sehingga ada ketergantungan kepada bantuan pembangunan pemerintah pusat.

Relevansi keterkaitan studi ini dengan teori yang telah diuraikan, adalah studi ini menggunakan variabel pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, keuntungan yang diperoleh perusahaan daerah, dan pendapatan lainnya yang sah (penjualan kekayaan/aset daerah).

Variabel ini adalah variabel yang ditentukan oleh sektor ekonomi seperti yang dijelaskan dengan teori kapasitas pajak (*tax capacity*) oleh Bahl.

2.1.4. Teori Ketenagakerjaan

Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja antara 15 tahun hingga 64 tahun. Selanjutnya tenaga kerja (*manpower*) digolongkan dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Menurut Dumairy (1996:74), Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Sejalan dengan pendapat Kamaluddin (1998:53) tentang tenaga kerja adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja dan tenaga kerja ini terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya tenaga kerja ini merupakan sejumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, jika ada permintaan dan pemakaian terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, oleh karena itu tenaga kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*)

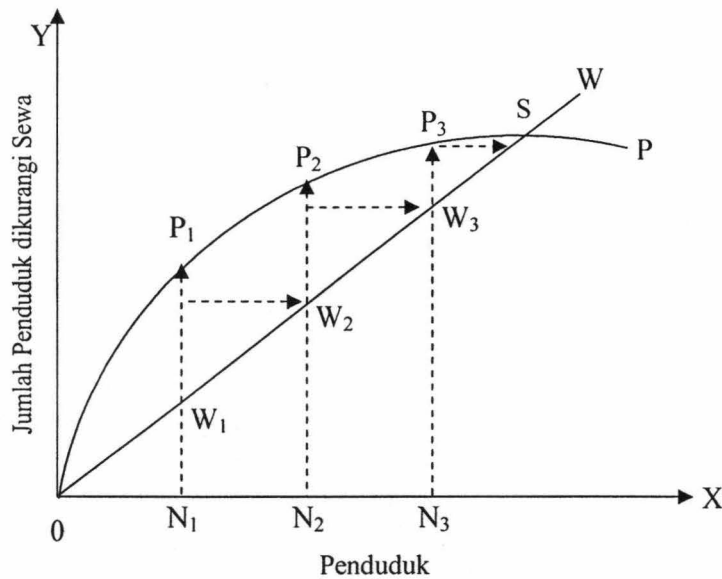
Teori-teori tentang tenaga kerja muncul karena adanya pertumbuhan penduduk. Sejak Adam Smith (Jhingan:2000:405) mengatakan bahwa “buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan”. Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk bagi

perekonomian. Malthus dalam bukunya *Principles of Political Economy* (Jhingan:2000:97) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Mathus: “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Kondisi yang demikian, akan mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak akan menambah kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan, jika pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*).

Ricardo (Jhingan:2000:92-93) juga menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan tingkat keuntungan dalam perekonomian akan menurun, seperti terlihat pada Gambar 2.1. halaman 36, jumlah penduduk diukur sepanjang sumbu horisontal dan total produk dikurangi sewa pada sumbu vertikal. Kurva OP adalah fungsi produksi yang menunjukkan total produksi dikurangi sewa sebagai fungsi dari penduduk. Karena penduduk meningkat, maka kurva OP mendatar sesuai dengan *Law of Diminishing Return*. Garis lurus yang melalui titik pusat OW mengukur upah nyata konstan. Jarak vertikal antara garis horisontal OX dan garis tingkat keseluruhan upah OW mengukur jumlah rekening upah pada berbagai tingkat penduduk.

W_1N_1 , W_2N_2 , dan W_3N_3 , adalah jumlah rekening upah pada tingkat penduduk ON_1 , ON_2 , dan ON_3 . Pada waktu rekening upah adalah W_1N_1 , keuntungan adalah P_1W_1 (Jumlah keseluruhan produk dikurangi sewa dibagi jumlah rekening upah yaitu $P_1N_1 / W_1N_1 = P_1W_1$). Saat keuntungan adalah P_1W_1 , investasi terangsang. Permintaan terhadap buruh meningkat menjadi ON_2 , dan tingkat upah naik menjadi W_2N_2 , tetapi keuntungan menurun menjadi P_2W_2 . Ini

akan meningkatkan investasi dan kemajuan teknik terus berlanjut, dan menaikkan permintaan buruh menjadi ON_3 dan tingkat upahnya akan naik menjadi W_3N_3 .



Gambar 2.1
PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK
TERHADAP PEREKONOMIAN

Konsekuensinya, keuntungan akan menurun lagi menjadi P_3W_3 . Proses pemupukan modal, kemajuan teknik, peningkatan penduduk, dan tingkat upah ini akan berlangsung terus, sampai keuntungan lenyap sama sekali pada titik S, pada waktu keadaan stasioner muncul.

Pertumbuhan penduduk di negara terbelakang berbeda dengan kondisi di negara maju. Ekonomi di negara terbelakang bercirikan modal kurang sedangkan buruh melimpah. Pertumbuhan penduduk, karenanya dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat, memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran. Belum lagi masalah penyediaan pangan yang luar biasa banyaknya. Bahkan kebutuhan untuk menyediakan prasarana kepada rakyat cenderung mengalihkan pengeluaran negara dari aktiva produktif.

Penduduk yang meningkat dengan cepat menjerumuskan perekonomian ke arah pengangguran, dan kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat, proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Tetapi karena ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan, akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan kekurangan lapangan kerja meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal menjadi lambat dan kesempatan kerja kurang dan dengan begitu meningkatkan pengangguran. Lebih dari itu, apabila tenaga buruh dibandingkan dengan lahan meningkat, sumber modal dan sumber lainnya, faktor komplemen yang tersedia per pekerja merosot dan akibatnya pengangguran dan kekurangan pekerjaan meningkat. Negara terbelakang ditimpa bencana pengangguran yang terus menumpuk akibat penduduk yang meningkat secara cepat. Ini cenderung memperbesar jumlah pengangguran bila dibandingkan kenaikan jumlah tenaga buruh sebenarnya.

Tenaga buruh di dalam suatu perekonomian adalah rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk total. Dengan asumsi 50 tahun sebagai harapan hidup rata-rata di negara terbelakang, tenaga buruh pada pokoknya adalah penduduk pada kelompok usia 15 sampai 50 tahun. Selama tahap peralihan demografis, tingkat kelahiran meningkat, dan tingkat kematian menurun. Akibatnya, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia rendah 1 sampai 15 tahun, dan hanya sebagian kecil yang termasuk pada kelompok usia tenaga buruh.

Adanya anak-anak dewasa di dalam tenaga buruh mengandung makna bahwa, orang yang berpartisipasi pada pekerjaan produktif sebenarnya sedikit. Bahkan jika angka kelahiran mulai menurun, tenaga buruh yang tersedia bagi pekerjaan produktif pun dalam jangka pendek akan tetap sama. Sebaliknya, jumlah

anak-anak menjadi turun dan pendapatan nasional meningkat lantaran jumlah konsumen menurun. Tetapi ini hanya mungkin sesudah tahap peralihan kependudukan dilalui, sesuatu yang tidak mungkin sampai negara terbelakang dapat menurunkan tingkat kesuburan mereka. Itu tidak berarti bahwa dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah pada saat ini, tenaga buruh tidak meningkat. Itu hanya berarti bahwa tambahan pada kelompok usia rendah adalah lebih besar ketimbang pada kelompok usia kerja. Jadi tenaga buruh cenderung meningkat bersama naiknya jumlah penduduk.

2.1.5. Kesempatan Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dalam pengertiannya termasuk lapangan kerja yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja (Tambunan, 1996:63-64). Pendapat Soeroto (1986:32) bahwa lapangan kerja atau kesempatan kerja dibagi dua, pertama : kesempatan kerja yang telah diduduki atau penggunaan tenaga kerja; kedua : kesempatan kerja yang belum diduduki atau masih lowong.

Kesempatan kerja ini akan dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia, mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia, dengan ketentuan lapangan kerja yang tersedia tersebut mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya yang dilihat adalah antara jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia, bila angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja maka terjadi pengangguran (Widodo, 2000:110)

Umumnya, penciptaan kesempatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu proses produksi dan pasar (Soeroto, 1986:31). Dalam proses produksi diperlukan masukan/*input* yang berupa bahan baku, modal, sumber daya manusia,

alam dan teknologi yang dikombinasikan untuk menghasilkan *output* yang berupa barang dan jasa atau investasi yang diperlukan oleh proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Seterusnya diperlukan adanya pasar untuk mendistribusikan *output* kepada yang menggunakannya (konsumen) agar perusahaan memperoleh pendapatan, di sisi lain, diperlukan pula pasar untuk menyediakan *input* bagi proses produksi.

Sebagaimana pendapat Simanjuntak (1985:113) menyatakan kesempatan kerja (*employment*) ini adalah merupakan lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian mencakup lapangan pekerjaan yang sudah di isi dan semua lowongan pekerjaan yang belum di isi. Dalam konteks ini kesempatan kerja (*employment*) di hitung berdasarkan jumlah orang yang bekerja. Oleh karena *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan atau keadaan penggunaan tenaga kerja.

Secara makro laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja (Widodo, 2000:110-111). Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja (*elasticity of employment*). Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar, serta dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kegiatan ekonomi, apakah bersifat padat modal atau padat karya. Untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah :

$$E_{kk} = \Delta KK / \Delta PDRB$$

Keterangan :

Ekk adalah Elastisitas kesempatan kerja

Δ KK adalah laju pertumbuhan kesempatan kerja

Δ PDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

Keterkaitan studi ini dengan teori yang telah diuraikan, memiliki relevansi karena dalam studi telah memasukkan variabel sektor ekonomi yang terdiri dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier sebagai variabel atau determinan yang penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), seperti yang dijelaskan dengan teori pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian oleh Ricardo serta perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Chenery dan Syrquin serta Kuznets dan Lewis dengan teori dua sektor serta teori tentang elastisitas kesempatan kerja (*elasticity of employment*), yang dapat menganalisis sifat dari kegiatan ekonomi.

2.1.6. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi

2.1.6.1. Teori Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) dan Kesejahteraan Ekonomi (*Economic Welfare*)

Ekonom Italia, Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi Pareto (*Pareto Condition*). Kondisi Pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takkan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi Pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi di mana sebagian atau semua pihak/individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.

Berdasarkan kondisi Pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utuh dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*) (Swasono:2005:2). Boulding dalam Swasono (2005:7), mengatakan bahwa *the subject matter of welfare*, berbeda dengan lain-lain *welfare*, harus didekati dari konsep atau *riches* ekonomi. Pendekatan yang memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai *social optimum* yaitu *Paretian Optimality* (optimalitas ala Pareto dan Edgeworth), di mana *economis efficiency* mencapai *social optimum* bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (*better-off*) tanpa membuat orang lain merugi (*worse-off*). Walaupun demikian *Pareto Efficiency* tidak membukakan kondisi untuk terbentuknya *a good society* (Sen dalam Swasono, 2005:8), dan tidak peka terhadap distribusi. Perkembangan *welfare economics*, berhenti di situ kemudian pada tahun 1970, Boulding dalam bukunya *economics as a Science*, kurang lebihnya melepaskan pendapat awalnya tentang *social optimum* yang sempit itu.

Samuelson (1952) dalam Swasono (2005:9) mengatakan bahwa sebenarnya telah ada *welfare economics* baru yang tidak semata-mata berdasar pada kriteria ekonomi sempit tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi pendapatan *welfare economics* mengemban *ethical precept* (nilai-nilai etis-normatif), di lain pihak kaum non-Weberian yang menolak *Werfreiheit der Wissenschaft* (*neutrality of science*) menurut *Welfare economics* harus pula mengintroduksi dimensi *welfare* dari luar ilmu ekonomi, dengan demikian dalam tataran *social welfare* maka *social choice* dalam mencapai *social optimum* perlu mencari pendekatan baru artinya sejak titik tolak awalnya preferensi individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal tetapi *multipartitus* (Swasono:2005:9).

Banyak pihak pada saat ini yang berbicara mengenai *growth* namun mengabaikan *economic welfare* pada tataran sosialnya (dalam dimensi *societal welfare*). Pandangan mengenai *welfare economics*, substansi dan dimensinya terus makin berkembang, diawali antara lain oleh Dahl and Lindblom dalam buku *Politics. Political Economics and Welfare* dalam Swasono (2005:19), sementara itu, Lange dalam Swasono (2005:19) melepaskan diri dari perbatasan mengenai apakah *welfare economics* hanya berdasar kriteria ekonomi sempit ataukah harus mengandung nilai-nilai etikal, apakah *welfare economics* berlandaskan pada ilmu ekonomi positif atau normatif. Apakah berdasar pada proposisi *what there is* atau *what there ought to be*. Lange menegaskan bahwa lingkup ilmu ekonomi adalah menentukan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditentukan secara politik. Tujuan ekonomi yang ia maksudkan adalah dalam tatarannya sebagai *social preference* dan *social choice*. Makna *welfare* akhirnya bukan lagi sekedar tercapainya *economic gain* secara optimal belaka, tetapi Sen dan Etzioni dalam Swasono, (2005:21), mengedepankan masalah etika.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert and Hahnel, dalam Darussalam 2005:77). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neoclassical welfare theory* merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Prinsip *Pareto Optimality* menyatakan bahwa *the*

community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off. Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain prinsip *pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

Perkembangan lain dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach*. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15), menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan suatu negara diukur melalui, tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO², perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB). Kesejahteraan suatu negara akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dalam sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada dalam perekonomian seperti sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K), dan sumber daya lain (R). Ketiga

sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Todaro (2003:235) mengemukakan bahwa peningkatan pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas), seperti tuan tanah, politisi, pimpinan perusahaan, dan kaum elit lainnya akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang-barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal, berpergian ke luar negeri, dan atau menyimpan kekayaannya di luar negeri dalam bentuk pelarian modal (*capital flight*). Sementara golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Peningkatan pendapatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian (Todaro:2003:252).

Todaro ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Todaro (2003:236), secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (*Welfare*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P)$$

Di mana Y adalah pendapatan per kapita, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikansi yang berbeda-

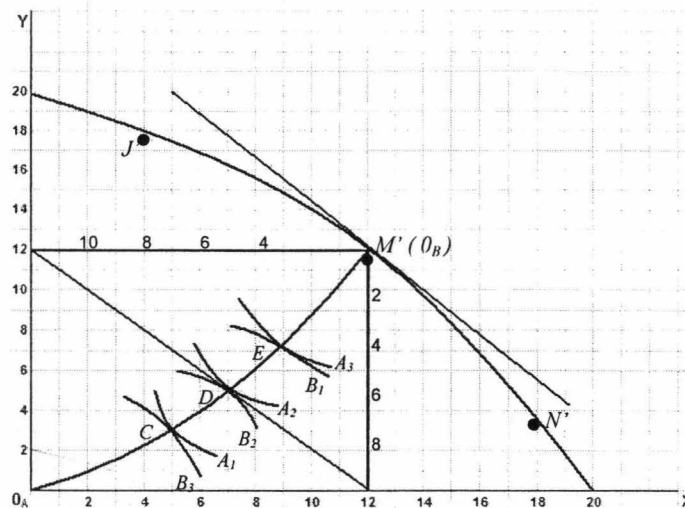
beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat beradap yang merasa nyaman dengan kondisi di mana rekan-rekan senegarannya berada dalam kesengsaraan absolut karena kemiskinan yang dideritanya. Mungkin karena alasan itulah setiap agama besar, selalu menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan, dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan pembangunan internasional didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis.

Salvatore (1997:412) mengemukakan teori ekonomi kesejahteraan secara mikro. Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model equilibrium umum dapat dikatakan optimal. Hal ini memerlukan, antara lain, alokasi optimal faktor produksi di antara konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan optimal Pareto jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menaikkan output dari satu atau lebih komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain.

Kurva kontrak produksi, dalam perekonomian dua komoditi, adalah tempat kedudukan alokasi faktor produksi yang optimal Pareto dalam proses produksi kedua komoditi. Demikian pula, alokasi komoditi dapat dikatakan optimal Pareto jika sistem distribusi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menambah utilitas bagi satu atau lebih individu tanpa harus mengurangi utilitas individu lain. Artinya, dalam perekonomian dua individu, kurva kontrak konsumsi adalah tempat kedudukan distribusi komoditi yang optimal Pareto antara dua individu.

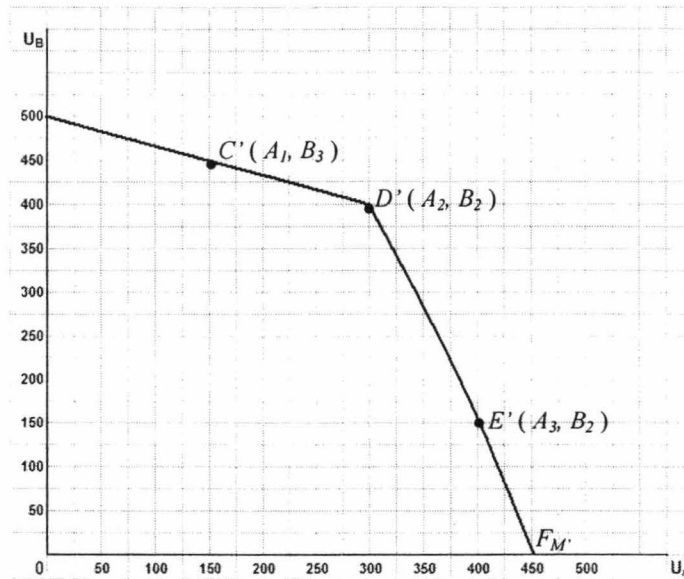
Gambar 2.2 memetakan kurva kontrak konsumsi dari ruang *output* ke ruang utilitas, untuk memperoleh kurva batas kemungkinan utilitas. Kurva ini memperlihatkan berbagai kombinasi utilitas yang diterima individu A dan individu B (yaitu, U_A dan U_B).



Gambar 2.2
KURVA TRANSFORMASI
DALAM TEORI EKONOMI KESEJAHTERAAN

Titik pada kurva kontrak konsumsi di mana MRS_{xy} untuk A dan B sama dengan MRT_{xy} menyatakan titik optimum Pareto untuk produksi dan konsumsi pada kurva batas kemungkinan utilitas.

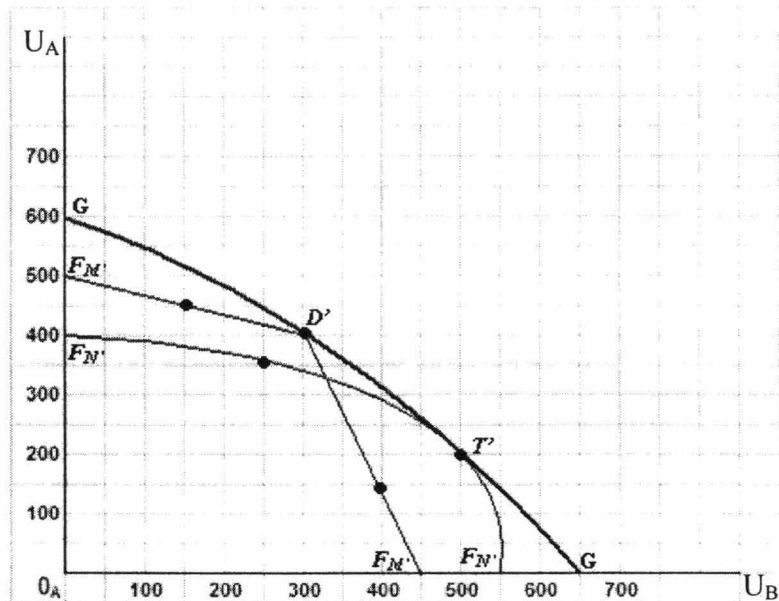
Jika kurva indifferen A_1 dalam Gambar 2.2 mengacu pada 150 unit utilitas untuk individu A (yaitu, $U_A = 150$ satuan utilitas) dan B_3 mengacu pada $U_B = 450$ satuan utilitas, maka titik keseimbangan dapat bergerak dari titik C pada kurva kontrak konsumsi (dan ruang output) dari Gambar 2.2 ke titik C' dalam ruang utilitas pada Gambar 2.3 halaman 47, demikian juga jika A_2 dalam Gambar 2.2 mengacu pada $U_A = 300$ satuan utilitas dan B_2 mengacu pada $U_B = 400$ satuan utilitas, maka titik keseimbangan dapat bergerak dari titik D pada Gambar 2.2 ke titik D' pada Gambar 2.3 halaman 47.



Gambar 2.3
RUANG UTILITAS

Selanjutnya jika A_3 dalam Gambar 2.3 mengacu pada $U_A = 4000$ satuan utilitas dan B_1 mengacu pada $U_B = 150$ satuan utilitas, maka titik keseimbangan dapat bergerak dari titik E pada Gambar 2.4 halaman 48, ke titik E' pada Gambar 2.3. Dengan menghubungkan titik C', D', dan E', akan diperoleh kurva batas kemungkinan utilitas F_M (Gambar 2.3). Pada titik D' dalam Gambar 2.3 (yang sesuai dengan titik D pada Gambar 2.2 halaman 46), perekonomian sederhana ini secara simultan berada pada optimum Pareto untuk produksi dan konsumsi.

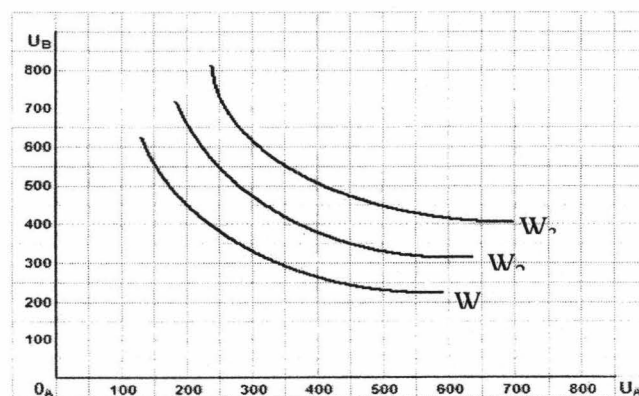
Selanjutnya, dengan menentukan titik-titik pada kurva transformasi, akan dapat dibuat diagram kotak *Edgeworth* yang berada dalam kurva kontrak konsumsi. Dari sini dapat diperoleh kurva batas kemungkinan utilitas yang berbeda dan titik optimum Pareto yang lain untuk produksi dan konsumsi. Proses ini dapat diulang beberapa kali. Kemudian, dengan menghubungkan titik-titik optimum Pareto yang dihasilkan untuk produksi dan pertukaran, dapat diperoleh kurva batas kemungkinan utilitas utama (*grand utility-possibility curve*).



Gambar 2.4
KURVA BATAS KEMUNGKINAN UTILITAS LAIN

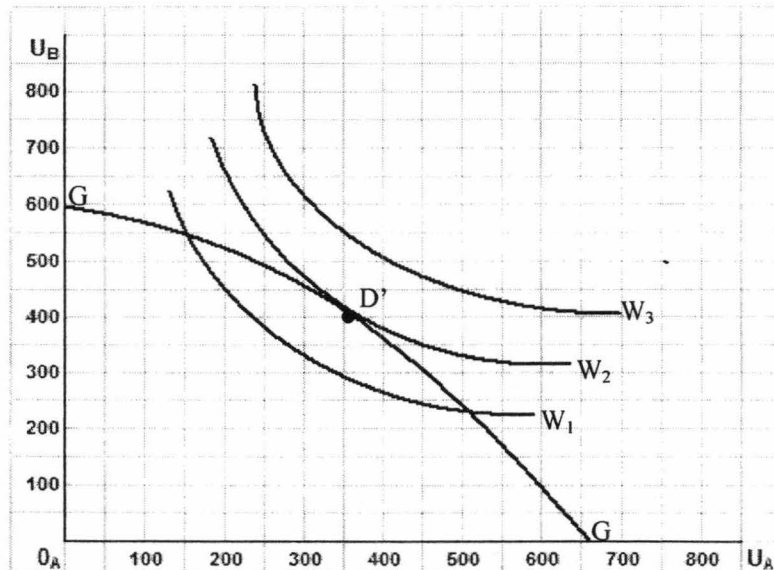
Kurva batas kemungkinan utilitas $F_{M'}$ pada Gambar 2.3 halaman 47 diperoleh dari kurva kontrak kondumsi yang ditarik dari titik 0_A ke titik M' pada kurva transformasi pada Gambar 2.4, Jika ditentukan titik lain pada kurva transformasi dari Gambar 2.2 halaman 46 misalkan titik N' , maka dapat dibuat diagram kotak *Edgeworth* yang lain dan diperoleh kurva kontrak konsumsi yang lain pula, yang ditarik dari 0_A ke titik N' dalam Gambar 2.2 halaman 46, dari kurva kontrak konsumsi yang berbeda ini (tidak diperlihatkan pada Gambar 2.2 halaman 46) dapat diperoleh kurva batas kurva batas kemungkinan utilitas lain ($F_{N'}$ dalam Gambar 2.4) dan diperoleh titik optimum Pareto produksi dan pertukaran lain (titik T' pada Gambar 2.4). Kemudian dengan menghubungkan titik-titik D' dan T' dan titik lainnya, dapat diperoleh kurva batas kemungkinan utilitas utama G dalam Gambar 2.4. Dengan demikian kurva batas kemungkinan utilitas utama adalah tempat kedudukan titik-titik optimum Pareto untuk produksi dan pertukaran. Pada titik ini, proses produksi-distribusi tidak dapat diatur kembali sedemikian rupa guna membuat seseorang menjadi lebih sejahtera tanpa merugikan orang lain.

Satu-satunya cara yang memungkinkan untuk memutuskan mana dari antara titik optimum Pareto pada kurva batas kemungkinan utilitas utama yang menunjukkan kesejahteraan sosial maksimum adalah dengan menerima gagasan perbandingan utilitas antar individu. Dengan demikian, dapat digambar fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial memperlihatkan berbagai kombinasi u_A dan u_B yang memberikan tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang sama kepada masyarakat. Gambar 2.5 halaman 50 menjelaskan bahwa W_1 , W_2 , dan W_3 adalah fungsi kesejahteraan sosial atau kurva indeferen sosial dari peta kesejahteraan masyarakat yang bersifat padat (*dense welfare map*). Seluruh titik pada kurva tertentu memberikan tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang sama kepada masyarakat. Masyarakat lebih menyukai titik pada fungsi kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dan bukan pada fungsi kesejahteraan yang lebih rendah. Namun demikian, perhatikan bahwa gerakan sepanjang kurva kesejahteraan sosial membuat keadaan seseorang individu menjadi lebih sejahtera, dan keadaan individu lainnya menjadi lebih buruk. Dengan demikian, untuk membuat fungsi kesejahteraan sosial, masyarakat harus mengadakan pertimbangan etis atau pertimbangan nilai (perbandingan utilitas antar individu). Titik persinggungan antara kurva batas kemungkinan utilitas utama dengan kurva kesejahteraan sosial adalah titik kesejahteraan sosial maksimum



Gambar 2.5
KURVA INDEFEREN SOSIAL
(FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL)

Konsep ini, digambarkan secara grafis pada Gambar 2.6. Penempatan peta kesejahteraan sosial atau peta kepuasan sama dari Gambar 2.5 halaman 49 secara berimpit dengan kurva batas kemungkinan utilitas utama dari Gambar 2.4 halaman 48 akan memunculkan titik kesejahteraan maksimum, yaitu pada titik D' pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6
TITIK KESEJAHTERAAN SOSIAL MAKSIMUM

2.1.6.2. Pengukuran Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*) dan Kesejahteraan Ekonomi (*economic welfare*)

Beberapa alat yang lazim digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi di antaranya adalah Indeks Tingkat Hidup, *Physical Quality of Life Index* (PQLI), dan *Human Development Index* (HDI), dan *Income per Capita*.

1. Indeks Tingkat Hidup

Sritua mengukur kesejahteraan sosial-ekonomi melalui keadaan atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diukur dengan indeks tingkat hidup menyeluruh masyarakat (Arief:1993:189). Indeks tingkat hidup menyeluruh dihitung dengan menggunakan indikator, di antaranya kondisi perumahan,

pendidikan, kesehatan, *leisure*, dan partisipasi politik masyarakat. Semakin mendekati 1 (satu) angka indeks tingkat hidup menyeluruh sebuah daerah, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat daerah itu. Sebaliknya semakin mendekati 0 (nol) angka indeks tingkat hidup menyeluruh, semakin sejahtera masyarakat daerah tersebut. Nilai indeks tingkat hidup berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 (satu) angka indeks tingkat hidup menyeluruh sebuah daerah, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat daerah itu. Sebaliknya semakin mendekati 0 (nol) angka indeks tingkat hidup menyeluruh, semakin sejahtera masyarakat daerah tersebut.

2. *Physical Quality of Life Index* (PQLI)

Studi Morris yang merupakan pembumian indikator pembangunan yang paling dikenal adalah *Physical Quality of Life Index* (PQLI) yang merupakan indeks gabungan dengan tiga indikator : tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian dan tingkat melek huruf. Berdasarkan setiap indikator tersebut kinerja dari setiap negara diperingkatkan pada skala satu hingga seratus, di mana angka satu melambangkan kinerja terburuk, sedangkan angka seratus melambangkan kinerja terbaik.

Secara umum studi yang dilakukan Morris dalam Todaro (1999:75) dengan menggunakan PQLI mendapatkan bahwa negara-negara yang GNP per kapitanya rendah cenderung memiliki PQLI yang rendah pula, sedangkan negara-negara dengan GNP per kapita tinggi cenderung memiliki angka PQLI yang tinggi pula.

3. *Human Development Index* (HDI)

Program Pembangunan PBB (UNDP) menganalisis status komparatif pembangunan sosio-ekonomi di negara-negara berkembang maupun maju secara sistematis dan komprehensif. Dengan laporan berkala secara kontinyu

melakukan konstruksi dan penyempurnaan untuk mengukur pembangunan sosial ekonomi yang dinamakan *Human Development Index* (HDI). Ukurannya adalah umur harapan hidup, angka melek huruf orang dewasa, angka kematian bayi dan pendapatan per kapita dalam rentang antara 0 – 1. Skala 0 menunjukkan pembangunan manusia rendah dan 1 menunjukkan pembangunan yang tinggi. Akan tetapi menurut Todaro (1999:77) HDI dapat dibagi menjadi 3 kategori :

0,00 – 0,50 = pembangunan manusia rendah

0,51 – 0,79 = pembangunan manusia sedang

0,80 – 1,00 = pembangunan manusia tinggi

Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan untuk mengukur disparitas pembangunan di berbagai negara. Berdasarkan penelitian *United Nation for Development Project* (UNDP) dalam BPS, (2004: 3), menyatakan bahwa :
”sebenarnya perbedaan pembangunan manusia antara negara maju dan negara berkembang adalah jauh lebih kecil dari pada kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Kesenjangan dalam pendapatan per kapita antara negara Barat dan negara-negara berkembang memang membesar, tetapi seiring dengan itu kesenjangan pembangunan manusianya semakin menyempit”.

Dengan demikian berdasarkan pengukuran indeks pembangunan manusia bahwa perkembangan kesenjangan pembangunan manusia antar negara semakin menyempit bila dibandingkan bila hanya menggunakan pendapatan per kapita.

Keterkaitan studi ini dengan teori yang telah diuraikan, memiliki relevansi karena dalam studi telah memasukkan variabel sektor ekonomi yang terdiri dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier sebagai variabel atau determinan yang penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), dengan indikator yang bersifat formatif seperti pendapatan per kapita, usia harapan hidup dan angka melek hurup. seperti yang dijelaskan dengan teori pengaruh perubahan struktur

ekonomi terhadap kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh Pareto, mengenai kesejahteraan sosial.

2.2. Penelitian Terdahulu.

2.2.1. Penelitian Terdahulu Perubahan Struktur Ekonomi

2.2.1.1. Penelitian Chenery dan Syrquin (1975)

Chenery dan Syrquin, melakukan penelitian terhadap 101 negara sebagai sampel yang masing-masing memiliki penduduk lebih dari satu juta jiwa, meliputi jangka waktu 1950 – 1970. Penelitiannya berhasil mengidentifikasi 21 indikator perubahan struktural melalui tiga proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi, yaitu proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi. Akumulasi diartikan sebagai proses pembinaan sumber-sumber daya produksi yang meningkatkan kemampuan berproduksi dalam tata susunan ekonomi masyarakat. Alokasi menyangkut pola penggunaan sumber-sumber daya produksi yang dapat membawa pada perubahan struktur produksi (peranan dan kontribusi sektoral dalam produk nasional), pada komposisi sektoral di dalam permintaan domestik, dan pada lalulintas perdagangan dan pembayaran luar negeri.

Hasil studi tentang pertumbuhan ekonomi antar negara yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin, terlihat bahwa pada masa transisi ada beberapa faktor keseragaman atau faktor universal pada pola pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang diteliti, yaitu *pertama*, kebutuhan akan modal fisik dan modal manusia; *kedua*, perubahan yang sama dalam permintaan konsumen dalam permintaan akibat meningkatnya pendapatan; *ketiga*, akses dari semua negara teknologi yang sama; *keempat*, akses terhadap perdagangan internasional atau luar daerah; dan *kelima*, peningkatan spesialisasi.

2.2.1.2. Penelitian Zadjuli (1986)

Dengan pendekatan makro serta teori yang berhubungan dengan disparitas pertumbuhan antar sektor, dapat diketahui sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada dekade 1975-1981, sektor industri di Provinsi Jawa Timur merupakan sektor yang menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap industri secara nasional. Pada tahun 1975, disebutkan bahwa industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur lebih bersifat padat modal dan konsentrasi kegiatan industri lebih banyak mempertimbangkan bahan baku dan nilai tambah. Kemudian pada tahun 1980, industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur telah berubah menjadi padat tenaga kerja dan disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur yang meloncat, tidak berurutan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Studi ini juga menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur, selama dekade 1969 s.d 1975 dan 1975 s.d 1981 mengalami tingkat pertumbuhan tinggi (*high Growth*), dengan peranan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 1969 sebesar 33,12 persen; tahun 1975 sebesar 55,86 persen dan tahun 1981 sebesar 62,84 persen.

2.2.1.3. Penelitian Yantu (1991)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi, estimasi permintaan akhir dan total *output* dan keterkaitan sektor dalam perekonomian wilayah Sulawesi Utara. Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Sulawesi Utara. Dengan terjadi perubahan struktur ekonomi, maka terjadi perubahan dalam efek pengganda dari 22 subsektor, sebagian memberikan dampak kenaikan dan sebagian menurun.

2.2.1.4. Penelitian Rozenov (1998)

Penelitian yang dilakukan Rozenov dengan judul *Input-Output Tables in The Analysis of Structural Change : The Case of Bulgaria*. Center for Economic Reform and Transformation. Departement of Economics, Heriot-Watt University, Riccarton, Edinburgh. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa ekonomi Bulgaria telah mengalami sejumlah perubahan struktural, pada umumnya disebabkan oleh reorientasi perdagangan luar negeri sebagai komposisi dari permintaan domestik. Perubahan tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan harga relatif dari input, melalui kebijakan pemerintah berupa regulasi harga. Peningkatan konsumsi rumah tangga memberikan efek tertinggi terhadap output, dan disertai oleh pertumbuhan ekspor, sementara peningkatan permintaan terhadap barang-barang impor memberikan efek terbalik terhadap output industri.

2.2.1.5. Penelitian Udjipto (1999)

Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan struktural telah merubah pola komposisi PDRB di Jawa Tengah, dari daerah agraris menjadi daerah semi industri. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya sebagai daerah agraris menjadi daerah yang didominasi sektor jasa. Hubungan antara ketidakmerataan pendapatan antar daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah positif, hal ini berarti semakin tinggi PDRB per kapita semakin besar tingkat ketidakmerataan.

2.2.1.6. Penelitian Zagler (2000)

Penelitian yang dilakukan Zagler dengan judul *Economic Growth, Structural Change and Search Unemployment*. European University Institute. San Domenico di Fiesole (FI). Menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi

menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dan kontribusi yang tetap dari pekerja, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara orang yang bekerja pada sektor jasa.

2.2.1.7. Penelitian Zweimuller (2002)

Zeimuller dalam makalah yang berjudul *Structural Change and The Kaldor Fact of Economic Growth*. University of Zurich. Dalam jangka panjang terdapat perubahan mengenai struktur produksi dan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi model Kaldor. Perubahan struktural sesuai dengan realokasi dari tenaga kerja yang disebabkan perbedaan elastisitas pendapatan antar sektor dan interaksi sektoral; selanjutnya pertumbuhan ekonomi memberikan peran terhadap tumbuhnya industri baru, demikian pula halnya dengan riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas.

2.2.1.8. Penelitian Mulyadi (2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kecenderungan perubahan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan mengetahui kecenderungan perubahan struktur perekonomian tersebut terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melihat pola perubahan struktur ekonomi daerah akibat meningkatnya pendapatan per kapita digunakan analisis persamaan regresi dengan model perubahan struktur Chenery dan Syrquin, sedangkan untuk menganalisis apakah perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur terjadi distribusi pendapatan yang merata antardaerah dipergunakan model Koefisien Variasi Williamson.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, yang ditunjukkan dengan elastisitas perubahan

struktural sektor sekunder sebesar 0,958 lebih besar dari elastisitas sektor primer 0,366. Elastisitas perubahan struktural telah merubah pola komposisi PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya sebagai daerah agraris (sektor primer), sekarang menjadi daerah semi industri dan jasa. Sedangkan ketidakmerataan yang terjadi cenderung semakin tinggi dengan koefisien Williamson (dengan migas) dari 0,6933 menjadi 0,8557 termasuk kategori ketimpangan berat, namun koefisien Williamson tanpa migas relatif rendah perubahannya dari 0,3336 menjadi 0,3236 termasuk kategori ketimpangan sedang.

2.2.2. Penelitian Terdahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.2.1. Penelitian Mansfield (1972), Wilford dan Wilford (1978)

Penelitian tentang elastisitas dan bouyancy yang telah dilakukan beberapa ahli untuk kasus negara-negara sedang berkembang, mengungkapkan bahwa koefisien elastisitas total pajak sedikit diatas satu (*unitary*). Temuan Mansfield (1972: 427-439) di Paraguay selama periode 1962-1972, menyatakan bahwa elastisitas total pajak adalah sebesar 1,14 persen. Sedangkan hasil penelitian Wilford dan Wilford menunjukkan bahwa elastisitas total pajak di Amerika Tengah adalah sebesar 1,03 persen.

2.2.2.2. Penelitian Bahl (1978) dan Prest (1978)

Berbagai studi empiris yang berkaitan dengan analisis kapasitas pajak dan usaha pajak, diantaranya adalah Bahl (1978:592-599) mengungkapkan bahwa determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak antara lain pendapatan per kapita serta sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan dan perdagangan. Analisisnya mengenai kapasitas pajak antarnegara menyebutkan bahwa determinan dari sektor pertanian dan pertambangan adalah signifikan. Sedangkan studi yang

berkaitan dengan alternatif kategori (karakteristik) yang menempatkan suatu negara kedalam kategori kemampuan kapasitas pajak dan usaha pajak, dilakukan oleh Prest (1978:20-21). Hasil analisisnya menempatkan, Brasil kedalam kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak tinggi; sedangkan, Sudan kedalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi, kemudian Trinidad dengan kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak rendah, dan Pakistan memiliki kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak juga rendah.

2.2.2.3. Penelitian Wirasmita (1982)

Studi empiris tentang elastisitas pajak (*gross elasticity*) dalam arti *bouyancy* di Indonesia, telah dilakukan oleh Wirasmita (1982:18), yang menyebutkan bahwa nilai koefisien elastisitas perpajakan di Indonesia sebesar 1,06 persen. Angka ini hanya sedikit di atas *unitary elasticity*, yang menyatakan bahwa penerimaan dari struktur perpajakan di Indonesia di luar minyak dan bumi relatif masih rendah.

2.2.2.4. Penelitian Nersiwad (1997)

Untuk kasus Indonesia, telah dilakukan analisis oleh Nersiwad (1997:16-17) selama periode 1974-1993, terungkap bahwa variabel kontribusi sektor pertanian, industri dan rasio ekspor bersih terhadap PDB memperlihatkan pengaruh nyata terhadap rasio pajak, dengan terjadi peningkatan kapasitas pajak, secara rata-rata sebesar 7,84 persen pada periode 1974-1978, dan menjadi 11,59 persen pada periode 1989-1993. Kemudian analisis peringkat kapasitas pajak dan usaha pajak antardaerah dikelompokkan sebagai berikut, peringkat 5 tertinggi untuk kapasitas pajak antardaerah di Indonesia adalah : DKI Jaya, Kalimantan Timur,

Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Bali, sedangkan peringkat 5 tertinggi untuk usaha pajak adalah: Riau, Bali, DI Yogyakarta, Jambi dan Timor Timur.

2.2.3. Penelitian Terdahulu Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)

2.2.3.1. Penelitian Sulistyaningsih (1997)

Dengan membangun model inter-industri ekonomi dan dekomposisinya serta model tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi telah mendorong penciptaan kesempatan kerja terutama sektor manufaktur yang menerima perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian. Perpindahan ini agak lambat karena sektor ini memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

2.2.3.2. Penelitian Cahyono (2004)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran struktur ekonomi dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 1993 sampai dengan 2000, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2 persen per tahun. Penyerapan tenaga kerja telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier, meski sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja.

2.2.4. Penelitian Terdahulu Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)

2.2.4.1. Penelitian Harmini (1997)

Harmini dalam Tesis dengan judul Hubungan Struktur Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, menyimpulkan bahwa semakin bersifat

industrial struktur ekonomi suatu Provinsi, maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin meningkat.

2.2.4.2. Rochaida (2005)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disparitas pembangunan daerah terhadap struktur penyerapan tenaga kerja daerah dan kesejahteraan sosial ekonomi di daerah Kalimantan Timur. Hasil penelitian menyebutkan bahwa disparitas pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja daerah dan kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,625 dengan probabilitas $p = 0,000$; kemudian nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas untuk kesejahteraan sosial ekonomi sebesar 0,214 dengan probabilitas $p = 0,000$.

2.2.4.3. Darussalam (2005)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peruntukan lahan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah sektoral serta kesejahteraan sosial masyarakat pulau Batam. Data yang digunakan adalah *pooling data*. Hasil studi menyimpulkan bahwa peruntukan lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembentukan nilai tambah. Penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan nilai tambah dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pembentukan nilai tambah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Batam.

2.2.4.4. Rahma (2006)

Rahma dalam tulisannya dengan judul Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia, menyebutkan bahwa tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah semakin tajam. Krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyataan dalam rangka meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4.5. Soegiarto (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja usaha terhadap tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil Kota Samarinda. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil. Kesimpulan penelitian ini, secara garis besar semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas yang positif dan lebih kecil.

2.2.4.6. Priyagus (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi swasta dan tenaga kerja serta pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah tenaga kerja dan pengeluaran pembangunan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi swasta berpengaruh tidak langsung, positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, serta pengeluaran pembangunan berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu atau studi empirik yang telah dikemukakan, maka relevansi dengan studi ini adalah menggunakan beberapa variabel antara lain variabel perubahan struktur ekonomi, variabel pendapatan asli daerah (PAD), variabel penyerapan tenaga kerja (PTK) dan variabel kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) yang akan menjadi dasar dalam memberikan penjelasan dan sebagai temuan hasil studi serta sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya dari berbagai uraian tinjauan pustaka tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta teori lampiran 2.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

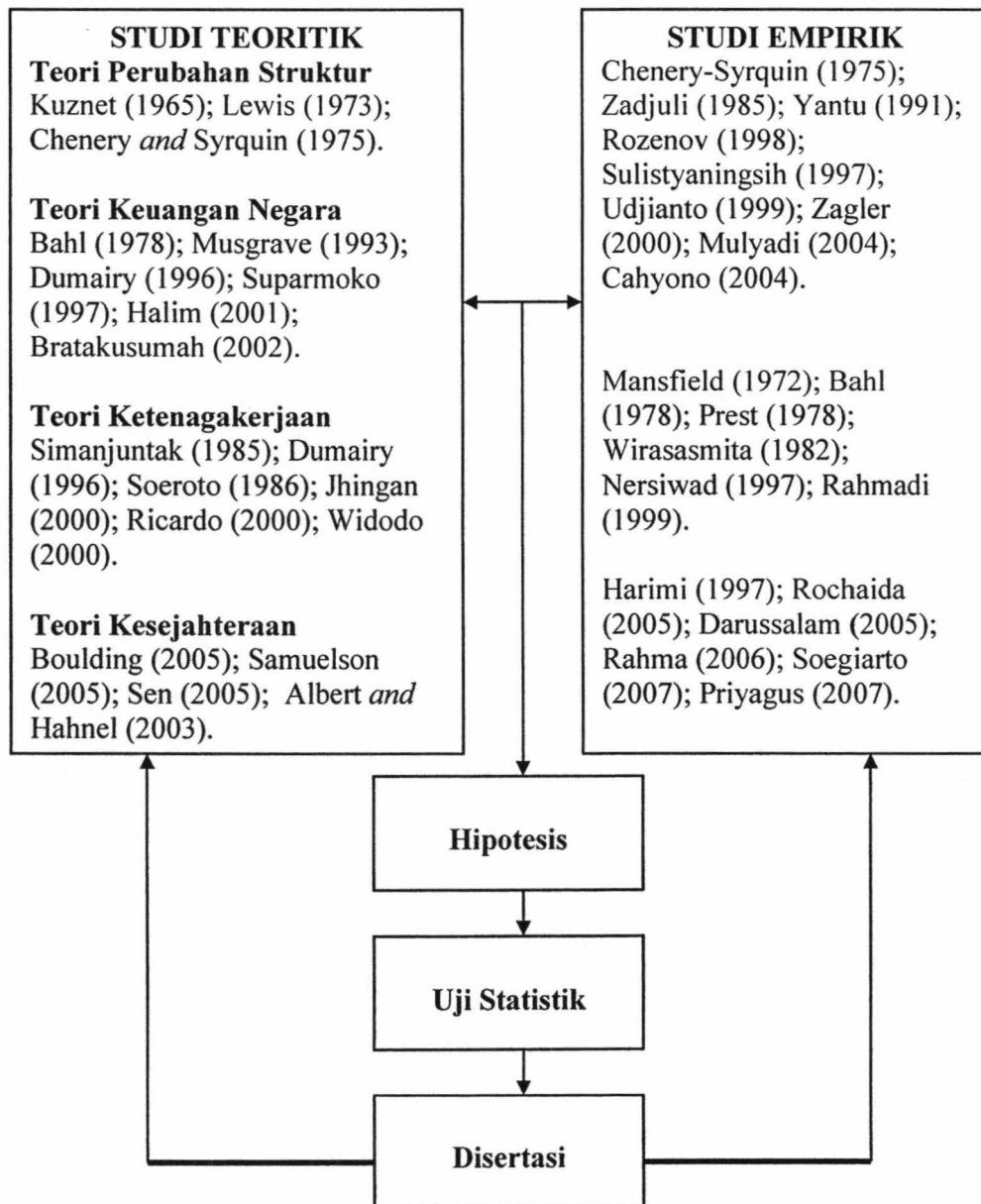
DAN HIPOTESIS

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir penelitian seperti pada Gambar 3.1.



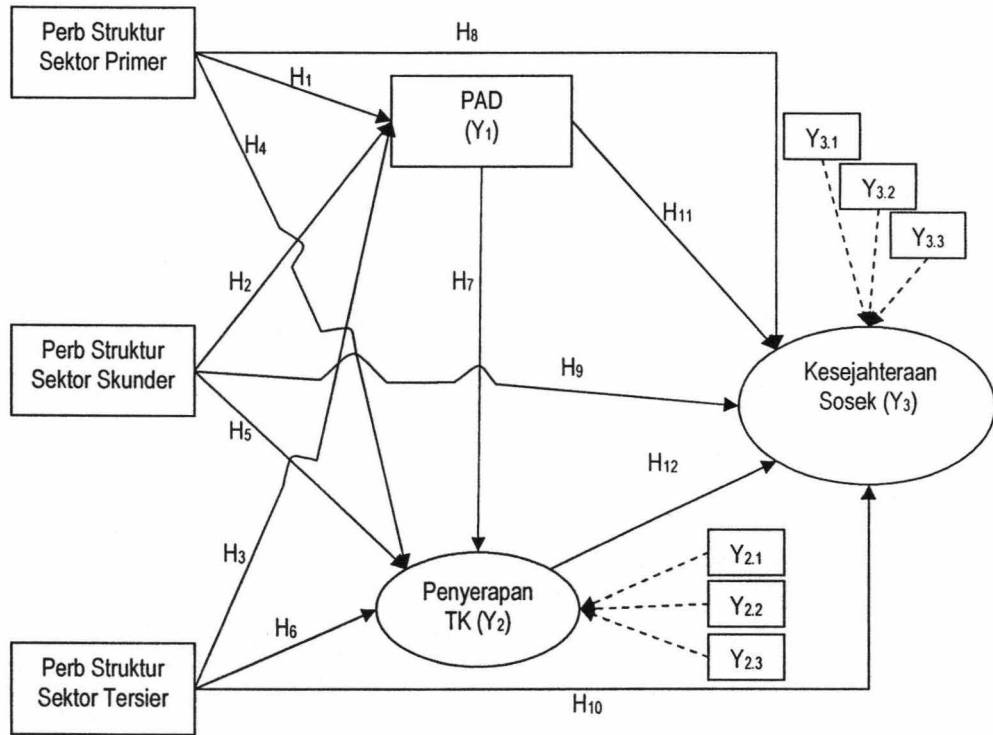
Gambar 3.1 : KERANGKA PROSES BERPIKIR

Bedasarkan kerangka proses berpikir pada Gambar 3.1 halaman 63 dapat dijelaskan mengenai keterkaitan antar studi teoritik dengan studi empirik. Pada studi teoritik memberikan gambaran beberapa teori yang berkaitan dengan studi ini antara lain teori perubahan struktur ekonomi, teori keuangan negara, teori ketenagakerjaan dan teori kesejahteraan sosial ekonomi, sedangkan pada studi empirik merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini pula. Selanjutnya berdasarkan studi teoritik dan studi empirik tadi serta sintesis dari kedua studi tersebut, maka akan disusun konsep-konsep yang dapat digunakan dalam melakukan analisis studi ini, kemudian dengan berlandaskan pola pikir yang bersifat deduktif, yaitu pada studi teoritik ditemukan hal-hal yang bersifat umum, dan diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus, serta pola pikir yang bersifat induktif, yaitu pada studi empirik ditemukan hal-hal yang bersifat khusus, dan diterapkan pada hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya dari studi teoritik dan studi empirik ini, dapat memberikan masukan yang mendalam dalam pembahasan.

Bedasarkan kedua studi tersebut maka dapat disusun rumusan hipotesis, yang diuji dengan test kuantitatif yang sesuai, sehingga hipotesis yang telah teruji kebenaraanya itu menjadi sebuah temuan baru. Temuan baru ini akan memperkaya teori terdahulu yang telah digunakan, dan hasil studi ini turut memperkaya hasil penelitian lainnya yang relevan.

Bagaimana pengaruh antar variabel dalam studi ini dijelaskan pada Gambar 3.2 kerangka konseptual pada halaman 65. Bedasarkan kerangka konseptual tersebut dapat dijelaskan mengenai keterkaitan antar variabel. Variabel bebas (*independent variables*) dalam penelitian ini adalah Perubahan Struktur Sektor Primer, Sektor Sekunder, Sektor Tersier, kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel tergantung (*dependent variables*) sekaligus sebagai variabel antara (*intervening variable*), serta Kesejahteraan Sosial

Ekonomi sebagai variabel tergantung (*dependent variables*). Variabel Penyerapan tenaga kerja bersifat laten dengan model indikator bersifat formatif, demikian pula dengan variabel kesejahteraan sosial ekonomi bersifat laten dengan indikator bersifat formatif.



Keterangan :

- : Variabel Bebas → : Pengaruh
- : Variabel Laten ← : Formatif
- : Indikator H (H₁₋₁₂) : Hipotesis

Gambar 3.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar kerangka konseptual menunjukkan bahwa antar variabel mempunyai hubungan searah yang ditunjukkan dengan tanda panah satu arah. Sistem hubungan ke satu arah ini juga disebut model rekursif, dan bukan hubungan timbal balik. Pola hubungan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah

dipengaruhi perubahan struktur sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Selanjutnya penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan struktur sektor tersebut di atas dan pendapatan asli daerah, sedangkan kesejahteraan sosial ekonomi dipengaruhi oleh perubahan struktur sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier serta pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

3.2. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perubahan Struktur Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perubahan Struktur Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perubahan Struktur Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perubahan Struktur Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perubahan Struktur Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Perubahan Struktur Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

9. Perubahan Struktur Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Perubahan Struktur Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.
12. Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 4

METODE PENELITIAN

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Berdasarkan tipe, maka penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995:3-4). Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh perkembangan struktur sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) atau data panel (*pooled data*). Data runtut waktu (*time series*) akan menggambarkan data perkembangan struktur sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier serta pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial ekonomi selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001 s.d 2005, sedangkan data silang (*cross section*) menunjukkan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 13 (tiga belas) daerah. Penggunaan data panel untuk memperoleh jumlah pengamatan (n) yang lebih besar sehingga variasi nilai variabel di setiap daerah akan dapat diamati dengan lebih baik. Menurut Gujarati (1995:172) bahwa penggunaan data panel dan pengamatan yang lebih besar akan dapat mengurangi pelanggaran terhadap gejala serial korelasi dan multikolinieritas.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dapat dipahami sebagai keseluruhan unit analisis yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik (Singarimbun dan Effendi, 1995:152); pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Nasir (2003:271) maupun Indriantoro dan Supomo (2002:115) bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dengan rincian sebanyak 4 (empat) Kota terdiri dari Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Bontang serta 9 (Sembilan) Kabupaten terdiri dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Paser, Nunukan, Malinau dan Penajam Paser Utara. Selanjutnya karena populasi dalam penelitian ini terbatas dengan jumlah anggota atau elemen populasi relatif sedikit yaitu 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, maka digunakan metode sensus atau *complete enumeration*. Sensus adalah penelitian terhadap seluruh anggota atau elemen populasi (Cooper and Emory, 1995:214); (Indriantoro dan Supomo, 2002:15) atau suatu survai di mana informasi yang dikumpulkan diambil dari semua anggota atau elemen populasi (Suparmoko, 1996:20). Mengingat penelitian ini menggunakan data panel dan dilakukan dengan metode sensus, maka penggunaan sampel tidak diperlukan.

4.3. Variabel Penelitian

4.3.1. Klasifikasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai atau memiliki bermacam-macam nilai (Kerlinger,1986:49); Singarimbun dan Effendi (1995:42) atau variabel sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian. Klasifikasi variabel didasarkan atas studi teoritik dan empirik sebagai acuan kerangka berpikir deduktif, selanjutnya melalui studi empirik digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan induktif, Pedhazur (1986) dalam Singarimbun dan Effendi (1995:43).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel tergantung dan variabel *intervening*. Adapun klasifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Variabel bebas (*independent variables*) adalah variabel yang keragamannya (variabilitasnya) mempengaruhi variabel tergantung. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas, yaitu Perubahan Struktur Sektor Primer, Perubahan Struktur Sektor Sekunder, Perubahan Struktur Sektor Tersier.
- b. Variabel tergantung (*dependent variables*) adalah variabel yang keragamannya (variabilitasnya) dipengaruhi variabel lain. Penelitian ini terdiri dari satu variabel tergantung, yaitu Kesejahteraan Sosial Ekonomi.
- c. Variabel antara (*intervening variable*) adalah variabel yang bersifat sebagai perantara dari variabel bebas dengan variabel tergantung. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja selain sebagai variabel tergantung juga sebagai variabel antara.

Klasifikasi variabel secara lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
KLASIFIKASI VARIABEL PENELITIAN

Notasi	Nama Variabel	Klasifikasi Variabel	Indikator
X_1	Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer	Bebas/ Independen	Kontribusi Sektor Primer
X_2	Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder	Bebas/ Independen	Kontribusi Sektor Sekunder
X_3	Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier	Bebas/ Independen	Kontribusi Sektor Tersier
Y_1	Pendapatan Asli Daerah	Tergantung/dependen dan Antara/ Intervening	Pendapatan Asli Daerah
Y_2	Penyerapan Tenaga Kerja	Tergantung/dependen dan Antara/ Intervening	$Y_{2.1}$ = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer (PTKP). $Y_{2.2}$ = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder (PTKS). $Y_{2.3}$ = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier (PTKT)
Y_3	Kesejahteraan Sosial Ekonomi	Tergantung/dependen	$Y_{3.1}$ = Pendapatan perkapita (Y_c). $Y_{3.2}$ = Usia Harapan Hidup (UHH). $Y_{3.3}$ = Angka Melek Huruf (AMH).

Sumber: Klasifikasi Variabel dalam Model, yang diolah.

4.3.2. Definisi Operasional Variabel

Beberapa variabel yang akan digunakan sebagai objek penelitian ini, nama dan definisi dari variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perubahan Struktur Sektor Primer (X_1).

Perubahan struktur sektor primer adalah kontribusi nilai tambah sektor primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dalam penelitian ini menggunakan kontribusi sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Adapun kontribusi

sektor primer sebagai berikut :

$$K_p = \frac{V_{ap} (Rp)}{PDRB (Rp)} \times 100\%$$

Keterangan :

K_p adalah kontribusi sektor primer

V_{ap} adalah value added sektor primer

PDRB adalah jumlah produk domestik regional bruto

2. Perubahan Struktur Sektor Sekunder (X_2).

Perubahan struktur sektor sekunder adalah kontribusi sektor sekunder terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dalam penelitian ini menggunakan kontribusi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Adapun kontribusi sektor sekunder sebagai berikut :

$$K_s = \frac{V_{as} (Rp)}{PDRB (Rp)} \times 100\%$$

Keterangan :

K_s adalah kontribusi sektor sekunder

V_{as} adalah value added sektor sekunder

PDRB adalah jumlah produk domestik regional bruto

3. Perubahan Struktur Sektor Tersier (X_3).

Perubahan struktur sektor tersier adalah kontribusi sektor tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dalam penelitian ini menggunakan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Adapun kontribusi sektor tersier sebagai berikut :

$$Kt = \frac{\text{Vat (Rp)}}{\text{PDRB (Rp)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kt adalah kontribusi sektor tersier

Vat adalah value added sektor tersier

PDRB adalah jumlah produk domestik regional bruto

4. Pendapatan Asli Daerah (Y_1).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari penjumlahan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan daerah, pendapatan dari dinas-dinas dan pendapatan lainnya yang sah, dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

$$G_{PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_{PAD} adalah pertumbuhan PAD

PAD_t adalah PAD tahun sekarang

PAD_{t-1} adalah PAD tahun sebelumnya

5. Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)

Penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah jumlah atau besarnya tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan PTK dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.

a. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer ($Y_{2.1}$)

Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Sektor Primer adalah pertumbuhan PTK dari sektor primer per tahun per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Timur, sebagai berikut :

$$PTKP = \frac{PTKP_t - PTKP_{t-1}}{PTKP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PTKP adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor primer

$PTKP_t$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor primer tahun sekarang

$PTKP_{t-1}$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor primer tahun sebelumnya

b. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder ($Y_{2,2}$)

Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sektor sekunder adalah pertumbuhan PTK sektor sekunder per tahun per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Timur, Sebagai berikut :

$$PTKS = \frac{PTKS_t - PTKS_{t-1}}{PTKS_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PTKS adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor sekunder

$PTKS_t$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor sekunder tahun sekarang

$PTKS_{t-1}$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor sekunder tahun sebelumnya

c. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier ($Y_{2,3}$)

Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) sektor tersier adalah pertumbuhan PTK sektor tersier per tahun per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

$$PTKT = \frac{PTKT_t - PTKT_{t-1}}{PTKT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PTKT adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier

$PTKT_t$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier tahun sekarang

$PTKT_{t-1}$ adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier tahun sebelumnya

6. Kesejahteraan Sosial Ekonomi (Y_3)

Kesejahteraan sosial ekonomi adalah keadaan atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diukur dengan indikator pendapatan per kapita, usia harapan hidup dan angka baca tulis/angka melek huruf.

a. Pendapatan Per kapita ($Y_{3.1}$)

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan dalam rupiah yang diperoleh masing-masing penduduk daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Usia Harapan Hidup ($Y_{3.2}$)

Usia harapan hidup adalah persentase perkiraan lama hidup (tahun) yang dapat dicapai oleh sekelompok penduduk yang lahir pada tahun yang sama di setiap daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

c. Angka Baca Tulis/Angka Melek Huruf ($Y_{3.3}$)

Angka baca tulis atau angka melek huruf adalah persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis di setiap daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

4.4. Prosedur Pengumpulan Data

Periode pengukuran digunakan *time series* (Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005) dan *cross section* (13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, namun untuk Kabupaten Penajam Paser Utara belum dicantumkan, karena baru

pada tahun 2003 menjadi kabupaten), penggunaan metode ini karena dimungkinkan tersedianya data yang akan diperlukan dalam penelitian. Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat sekunder dengan dilengkapi informasi yang diharapkan akurat. Data sekunder bersumber dari publikasi resmi dan dokumen tertulis dari instansi, lembaga, badan, dinas atau suatu unit yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara penelitian pustaka (*library research*) dari sumber tersebut di atas kemudian dilengkapi dengan informasi lain sebagai bahan perbandingan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, terutama indikator yang relevan dengan peningkatan sumber penerimaan daerah, dan pertumbuhan ekonomi serta aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

4.5. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan untuk menguji hubungan secara terstruktur antar variabel sesuai dengan rumusan masalah, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian adalah analisis PLS (*Partial Least Square*). Teknik analisis data dengan PLS (*Partial Least Square*) dan dihitung menggunakan bantuan program komputer *SmartPLS*, dengan alasan bahwa :

1. Model analisisnya berjenjang dan model persamaan struktural memenuhi sifat model rekursif.

2. Variabel yang terdapat di dalam model ada yang bersifat laten, dengan model indikator bersifat formatif.
3. Sampel penelitian (unit analisis) kecil, yaitu $n = 60$.

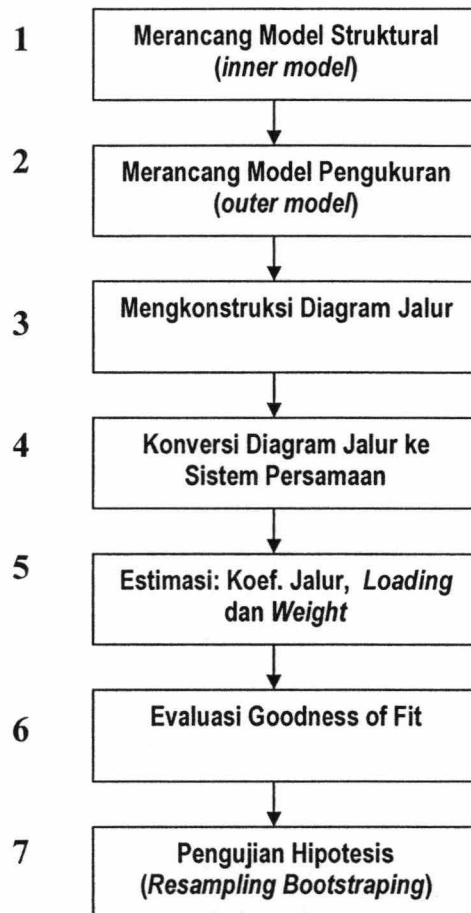
Adapun langkah-langkah di dalam analisis dengan PLS (*Partial Least Square*) adalah sebagai berikut:

1. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*inner model*)

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS (*Partial Least Square*) didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Hal ini sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dan secara visual dapat dilihat pada diagram jalur seperti pada Gambar 4.1 halaman 78.

2. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*outer model*)

Outer model di dalam penelitian ini dengan merujuk pada definisi operasional variabel, seperti telah diuraikan pada Bab metode penelitian. Model indikator untuk variabel penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat adalah bersifat formatif.

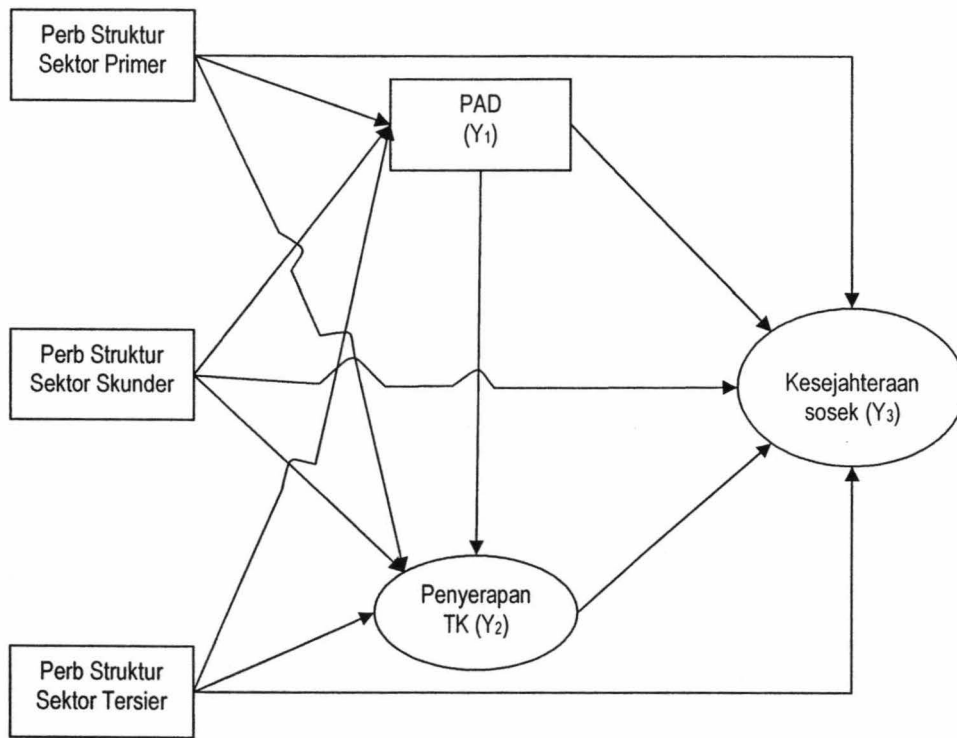


Gambar 4.1

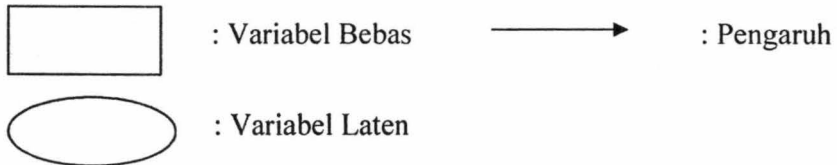
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS PLS

3. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram Jalur

Hasil perancangan *inner model* dan *outer model* tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur, agar lebih mudah dipahami. Diagram jalur yang menunjukkan *inner model* dan *outer model* disajikan seperti pada Gambar 4.3 halaman 80



Keterangan :



Gambar 4.2

INNER MODEL PADA ANALISIS PLS

4. Langkah Keempat: Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan

a. *Outer model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*. Sesuai dengan definisi operasional variabel, maka diperoleh model pengukuran sebagai berikut:

Variabel latent Penyerapan Tenaga Kerja, bersifat formatif

$$\eta_2 = \lambda_1 Y_{21} + \lambda_2 Y_{22} + \lambda_3 Y_{23} + \varepsilon_1$$

Variabel laten Kesejahteraan Sosial Ekonomi, bersifat formatif

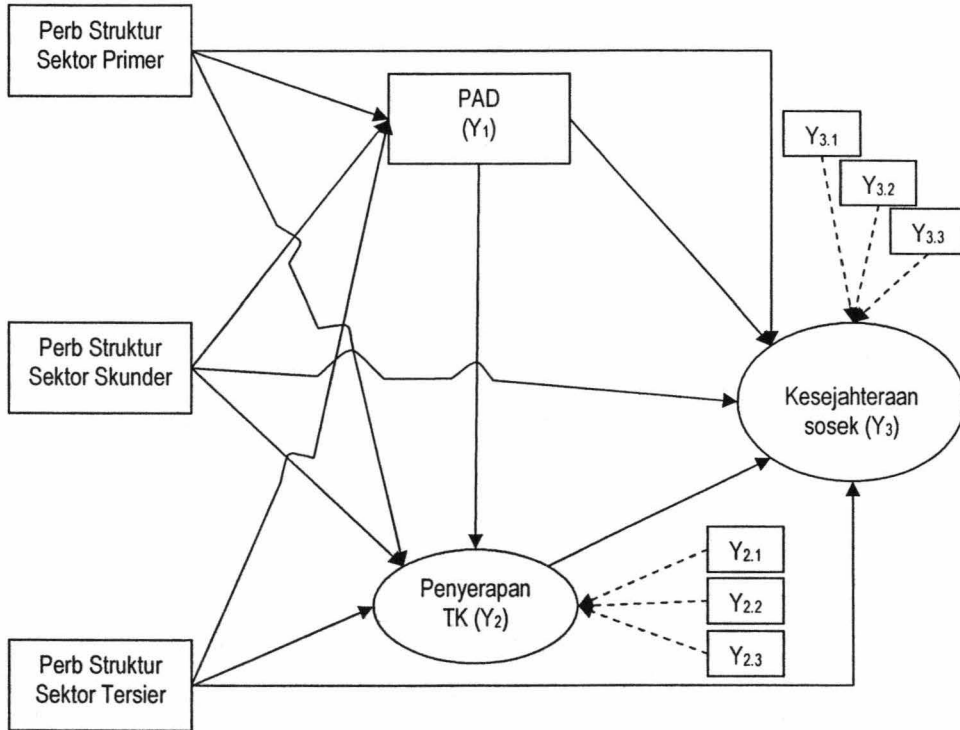
$$\eta_3 = \lambda_4 Y_{31} + \lambda_5 Y_{32} + \lambda_6 Y_{33} + \varepsilon_2$$

Keterangan :

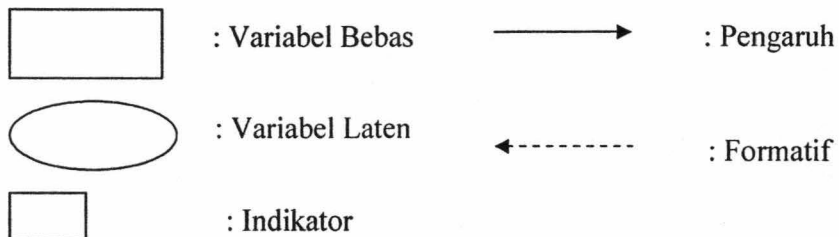
η_2 adalah Penyerapan Tenaga Kerja

η_3 adalah Kesejahteraan Sosial Ekonomi

λ_i adalah outer loading



Keterangan :



Gambar 4.3

DIAGRAM JALUR LENGKAP DENGAN OUTER MODEL

b. *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan

antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, maka *inner model* dalam bentuk persamaan diberikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \gamma_3\xi_3 + \zeta_1 \\ \eta_2 &= \gamma_4\xi_1 + \gamma_5\xi_2 + \gamma_6\xi_3 + \beta_1\eta_1 + \zeta_2 \\ \eta_3 &= \gamma_7\xi_1 + \gamma_8\xi_2 + \gamma_9\xi_3 + \beta_2\eta_1 + \beta_3\eta_2 + \zeta_3\end{aligned}$$

Keterangan :

ξ_1 adalah Perubahan Struktur Primer

ξ_2 adalah Perubahan Struktur Sekunder

ξ_3 adalah Perubahan Struktur Tersier

5. Langkah Kelima: Estimasi

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.

6. Langkah Keenam: *Goodness of Fit*

Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan, yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen, kemudian dihitung nilai *Stone-Geisser Q Square test* dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

7. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode resampling Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah:

$$H_0 : \lambda_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \lambda_i \neq 0$$

Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner model*: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah

$$H_0 : \gamma_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \gamma_i \neq 0$$

Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner model*: pengaruh variabel laten endogen terhadap endogen adalah

$$H_0 : \beta_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian dilakukan dengan *t-test*, bilamana diperoleh *p-value* $\leq 0,05$ (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian pada *inner model* signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya.

Asumsi yang diperlukan di dalam PLS adalah hubungan antar variabel laten bersifat linier. Di samping itu, asumsi pada nonparametrik yaitu antar pengamatan bersifat independen juga berlaku. Asumsi yang kedua ini bersifat tidak kritis bilamana pengambilan sampel dilakukan secara random. Sampel *bootstrap* disarankan sebesar 500, hal ini didasarkan beberapa kajian yang ada pada berbagai literatur, bahwa dengan sampel bootstrap 500 sudah dihasilkan penduga parameter yang bersifat stabil.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Umum Penelitian

Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 208.657,74 Km² dengan rincian luas daratan 198.441,17 Km² dan luas pengelolaan laut (0 – 12 mil) 10.216,57 Km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Barat serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan (BPS, Kalimantan Timur Dalam Angka, 2006:6). Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar serta di sebelah selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan di sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data BPS, 2006:8, luas wilayah Kalimantan Timur 208.657,74 Km² dengan rincian luas daratan 198.441,17 (95 persen) dan luas pengelolaan laut 10.216,57 (5 persen). Secara rinci luas wilayah daratan dan luas pengelolaan laut untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan Tabel 5.1 halaman 84 tersebut ada 3 (tiga) Kabupaten yang memiliki luas daratan terbesar yaitu Kabupaten Malinau (39.799,88 Km²), Kutai Timur (31.884,59 Km²) dan Kutai Barat (30.943,79 Km²). Namun jika digabung antara luas daratan dan luas pengelolaan laut maka Kabupaten terluas berdasarkan persentase terhadap Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Malinau (19,07), Kutai Timur (16,38) dan Berau (16,33)

Tabel 5.1.
 LUAS WILAYAH DARATAN DAN LUAS PENGELOLAAN LAUT
 KABUPATEN/KOTA
 DI KALIMANTAN TIMUR, TAHUN 2006

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Km ²)	Luas Pengelolaan Laut (Km ²)	Total (Km ²)	Persentase terhadap Provinsi
1	Pasir	10.936,38	10.810,64	21.747,02	10,42
2	Kutai Barat	30.943,79	0	30.943,79	14,83
3	Kutai Kartanegara	26.326,00	2.220,37	28.546,37	13,68
4	Kutai Timur	31.884,59	2.294,91	34.179,50	16,38
5	Berau	22.521,71	11.552,33	34.074,04	16,33
6	Malinau	39.799,88	0	39.799,88	19,07
7	Bulungan	17.249,61	2.163,38	19.412,99	9,30
8	Nunukan	13.875,42	1.040,33	14.915,75	7,15
9	Penajam Paser Utr	3.209,66	437,97	3.647,63	1,75
10	Balikpapan	560,70	211,29	771,99	0,37
11	Samarinda	718,23	0	718,23	0,34
12	Tarakan	251,81	419,84	671,65	0,32
13	Bontang	163,39	262,29	425,68	0,20
14	Kalimantan Timur	198.441,17	10.216,57	208.657,74	100,00

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2006 (data diolah kembali)

Sebelum tahun 1999 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur baru berjumlah 6 (enam) daerah dengan sebutan Daerah Tingkat II yang terdiri dari Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda, Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Kemudian Kecamatan Bontang yang merupakan bagian dari Kabupaten Kutai menjadi Kota Administratif (Kotif) dan Kecamatan Tarakan, bagian dari Kabupaten Bulungan juga menjadi Kota Administratif (Kotif). Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan maka diperlukan penataan kembali administrasi dan manajemen pemerintah yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma baru (Rochaida, 2005:101). Sejalan dengan tuntutan tersebut serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah, maka dibentuklah beberapa Kabupaten/Kota yang baru, sehingga menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten

Pasir menjadi 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Paser Utara (baru pada tahun 2003); Kabupaten Kutai menjadi 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang; Kabupaten Berau; Kabupaten Bulungan menjadi 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan kota Tarakan; Kota Balikpapan; serta Kota Samarinda.

Kondisi dan potensi dari masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan Profil Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kabupaten Pasir dengan ibukota Tanah Grogot memiliki luas wilayah daratan sebesar 10.936,38 km² dan luas wilayah laut 752,76 km², luas penggunaan lahan di Kabupaten Pasir untuk wilayah hutan yaitu kawasan hutan lindung seluas 1.148.156,15 ha. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah teririgasi sebesar 1.577 ha, sawah tadah hujan 18.572 ha dan sawah lainnya 1.492,95 ha. Di daerah ini juga terdapat lahan kering berupa perkebunan seluas 15.619.909 ha, dan permukiman 15.576,08 ha. Keadaan Iklim di Kabupaten Pasir dengan curah hujan 857,6 mm/tahun.

Ditinjau dari segi komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata di kabupaten ini sebanyak 15 orang/km², sedangkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,8 persen per tahun.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini adalah batubara, nikel, emas, pasir kuarsa, lempung, posfat, batu gamping, dan perkayuan.

2. Kutai Barat dengan ibukota kabupaten yaitu Sendawar mempunyai luas wilayah daratan 30.943,79 km² dan mempunyai luas kemiringan lahan : datar (0-2%) 322.753,25 Ha, bergelombang (2-15%) 1.040.584,54 Ha, curam (15-40%) 190.603,63 Ha, sangat curam (> 40 %) 1.564.030,31 Ha. Kabupaten

Kutai Barat memiliki ketinggian diatas permukaan laut 7 – 1000 m. Luas Penggunaan Lahan untuk hutan lindung seluas 744,038 Ha, hutan suaka alam dan wisata 5.500 Ha, hutan produksi tetap 932,266 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 1.481.066 Ha. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah teririgasi sebesar 40 Ha dan sawah tadah hujan 2.543 Ha. Untuk lahan kering, rawa-rawa/mangrove dengan luas 31,291 Ha, ladang 50,662 Ha, perkebunan/kebun 2,845 Ha, permukiman 4,602 Ha. Keadaan Iklim di Kabupaten Kutai Barat dengan curah hujan berkisar 324,75 mm/tahun. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini adalah batubara, antimont, emas, kristal kuarsa, perak, besi, pasir kwarsa, kaolin, lempung, batuan beku, gypsum, batu gamping dan perkayuan.

3. Kabupaten Kutai Kertanegara dengan ibukota Tenggarong memiliki luas wilayah daratan 26.326,00 km² dan luas wilayah pengelolaan laut seluas 2.220,37 km² serta mempunyai luas kemiringan lahan : datar (0 - 2%) 7.410,21 Ha, bergelombang (2-15%) 3.118,14 Ha, curam (15 - 40 %) 8.163,67 Ha, sangat curam (> 40 %) 7.424,88 Ha. Ketinggian di atas permukaan laut 7 – 57 m. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kertanegara untuk wilayah hutan yaitu kawasan hutan lindung seluas 239.816 Ha, hutan suaka alam dan wisata 68.884 Ha, hutan produksi tetap dengan luas 806.128 Ha, hutan produksi terbatas 519.070 Ha, hutan yang dapat dikonversi/non budidaya 989.960 Ha dan hutan yang dipergunakan untuk pendidikan dan penelitian seluas 14.099 Ha. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini sangat besar dan beragam seperti minyak bumi, gas, batubara, emas, dan batu gamping.
4. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta secara administratif memiliki luas wilayah daratan 31.884,59 km² atau 16 % dari luas Propinsi Kalimantan

Timur. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur untuk wilayah hutan utamanya hutan lindung dengan luas 454.708 Ha, hutan produksi tetap 969.952 Ha, hutan produksi terbatas 1.090.893 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 1.073.017 Ha. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini adalah batubara, dan perikanan juga terdapat potensi lainnya seperti emas, pasir kwarsa, lempung, dan batu gamping.

5. Berau dengan ibukota Tanjung Redeb memiliki luas wilayah keseluruhan 34.074,04 km² dengan luas daratan 22.521,71 km² dan luas pengelolaan laut 11.552,33 km². Potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini adalah batubara, dan perikanan juga terdapat potensi lainnya seperti emas, timah hitam dan seng serta kaolin.
6. Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah keseluruhan 42.620,70 km² dengan luas daratan 41.990,4 km² dan luas wilayah laut 630 km² serta ketinggian di atas permukaan laut 300 – 3000 m. Luas penggunaan lahan untuk lahan hutan yaitu hutan lindung dengan luas 768.545 Ha, hutan suaka alam dan wisata seluas 4.051.319 Ha, hutan produksi tetap 502.438 Ha, hutan produksi terbatas 1.342.920 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 304.138 Ha. Daerah ini memiliki panjang perbatasan darat dengan negara lain yaitu sepanjang 512 km. Potensi sumberdaya alam yang telah diusahakan adalah perikanan sedangkan lainnya seperti batu gamping belum dilakukan eksploitasi.
7. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor dan memiliki luas wilayah keseluruhan 17.249,61 km². Luas penggunaan lahan di Kabupaten Bulungan untuk wilayah hutan yaitu kawasan lindung dengan luas areal 122.461,91 Ha, hutan produksi tetap 416.517,62 Ha, hutan produksi terbatas 305.177,84 Ha serta hutan yang dapat dikonversi seluas 542.199,17 Ha. Keadaan iklim rata-rata di kabupaten ini yaitu suhu berkisar di 22,5 – 34,6°C,

kelembaban udara 84,40%, curah hujan 212,50 mm/tahun dan dengan kecepatan angin 3,30 knot. Potensi sumberdaya alam yang telah diusahakan adalah minyak bumi dan serta perikanan sedangkan lainnya seperti emas, timah hitam dan seng serta batu gamping belum dilakukan eksploitasi.

8. Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah daratan seluas 13.875,42 km² dan luas wilayah laut 1.040,33 km² serta mempunyai luas kemiringan lahan : datar (0-2%) 0-3 Ha, bergelombang (2-15%) 3-8 Ha, curam (15-40%) 30 Ha. Daerah ini memiliki ketinggian di atas permukaan laut 1500 - 3000 m. Luas penggunaan lahan terdiri dari hutan lindung seluas 92.447,26 Ha, hutan produksi tetap 272,33 Ha, serta hutan produksi terbatas seluas 1.350,63 Ha. Untuk lahan kering areal perkebunan seluas 10.707,6 Ha. Keadaan iklim di kabupaten Nunukan dengan suhu rata-rata mencapai 27,8°C, kelembaban udara rata-rata 81,3 %, curah hujan berkisar 177,25 mm/tahun serta kecepatan angin 5-7 knot. Potensi sumberdaya alam yang telah diusahakan adalah perikanan sedangkan lainnya seperti gypsum dan batu gamping belum dilakukan eksploitasi.
9. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam memiliki luas wilayah daratan sebesar 3.209,66 km² dan luas wilayah laut 437,97 km² serta memiliki ketinggian di atas permukaan laut 0-150 m. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk wilayah hutan yaitu kawasan suaka alam dan wisata seluas 57.471 Ha. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah teririgasi sebesar 24.284,07 Ha, sawah tadah hujan 34.023,87 Ha. Di daerah ini juga terdapat lahan kering berupa rawa-rawa seluas 17.557 Ha, ladang 35.529 Ha, perkebunan seluas 15.520 Ha, usaha lain 104.911 Ha, serta lahan yang belum atau tidak diusahakan seluas 22.242 Ha. Keadaan iklim di

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki suhu rata-rata 35,40°C dengan curah hujan 214,72 mm/tahun dan kecepatan angin 5,92 knot.

10. Kota Balikpapan dengan luas wilayah daratan 560,70 km² dan luas wilayah laut sebesar 211,29 km². Luas kemiringan lahan : datar (0-2%) 8.118 Ha, bergelombang (2-15%) 6.644 Ha, curam (15-40 %) 14.424 Ha, sangat curam (> 40 %) 21.144 Ha. Ketinggian di atas permukaan laut 0 > 80 m. Luas penggunaan lahan di Kota Balikpapan untuk wilayah hutan yaitu kawasan hutan lindung seluas 10.025 Ha dan hutan bakau seluas 1.125 Ha. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah teririgasi sebesar 3,92 Ha, sawah tadah hujan seluas 85 Ha. Untuk lahan non sawah terdiri dari rawa-rawa seluas 207 Ha, ladang dengan luas 5.537 Ha, perkebunan/kebun seluas 1.963 Ha, permukiman 10.523 Ha, waduk dengan luas 555 Ha, tambak ikan seluas 1.600 Ha, alang-alang/semak seluas 15.243 Ha dan yang lain-lain seluas 3.210,57 Ha. Keadaan iklim di kota Balikpapan dengan suhu rata-rata mencapai 22,4–34,5°C, kelembaban udara tertinggi 89% dan terendah 83%, curah hujan terendah 130,9% dan tertinggi 424,3% dengan kecepatan angin terendah 18% dan tertinggi 42%. . Potensi sumberdaya alam didaerah ini adalah minyak bumi terutama di sepanjang lepas pantai dan pasir kwarsa, selain itu potensi lainnya adalah kelautan berupa potensi lautnya dan pariwisatanya.
11. Kota Samarinda dengan luas wilayah 718,23 km² dan mempunyai luas kemiringan lahan : datar (0 - 2%) 20.011 Ha, bergelombang (2-15%) 18.276 Ha, curam (15- 40 %) 15.540 Ha, sangat curam (> 40 %) 2.469 Ha. Ketinggian di atas permukaan laut 0 – 200 m. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah teririgasi sebesar 1.752 Ha, sawah tadah hujan 3.653 Ha, sawah pasang surut 95 Ha. Untuk lahan kering, rawa-rawa dengan luas 497 Ha, ladang 10.357 Ha, perkebunan 5.210 Ha, permukiman 21.199 Ha. Keadaan iklim di kota

Samarinda dengan suhu rata-rata mencapai 22,75°C, kelembaban udara rata-rata 81,3%, curah hujan berkisar 139,7 mm/tahun.

12. Kota Tarakan memiliki luas wilayah 671,65 km² dengan luas daratan 251,81 km² dan luas wilayah laut seluas 419,84 km² dan luas kemiringan lahan : datar (0- 7%) 12.109,00 Ha, bergelombang (2-15%) 5.805,00 Ha, curam (15-40%) 5.719,00 Ha, sangat curam (> 40%) 1.447,00 Ha. Kota Tarakan memiliki ketinggian di atas permukaan laut 7–110 m. Luas Penggunaan Lahan untuk wilayah hutan seluas 36.971,00 Ha, untuk wilayah hutan lindung seluas 2.400,00 Ha, Hutan produksi terbatas 3.875,00 Ha, hutan yang dapat dikonversi seluas 18.805,00 Ha, hutan lebat 3.294 Ha serta hutan belukar 8.597,00 Ha. Untuk lahan kering terdiri dari : rawa-rawa dengan luas 999 Ha, ladang 7.974 Ha, perkebunan 172 Ha, permukiman 1.376 Ha, usaha lain 1.081 Ha dan lahan yang belum/tidak diusahakan 1.587 Ha. Keadaan Iklim di Kota Tarakan dengan suhu 29,10 ° C, kelembaban udara 85,50 %, curah hujan berkisar 297,80 mm/tahun.
13. Kota Bontang dengan luas wilayah daratan 163,39 km² dan luas wilayah laut seluas 262,29 km² dengan luas kemiringan lahan : datar (0-2%) 7.211 Ha, bergelombang (2-15%) 4.001 Ha, curam (15-40 %) 3568 Ha. Kota Bontang memiliki ketinggian di atas permukaan laut 0–120 m. Luas Penggunaan Lahan untuk wilayah hutan lindung seluas 5.500 Ha, Kota Bontang memiliki Taman Nasional Kutai seluas 450 Ha. Luas lahan persawahan terdiri dari sawah tadah hujan 300 Ha dan sawah lainnya 100 Ha. Untuk lahan kering terdiri dari : rawa-rawa/mangrove dengan luas 1.023 Ha, ladang/tegalan 84 Ha, perkebunan/kebun 1.301 Ha, permukiman 922 Ha, usaha lain 1.988 Ha dan lahan yang digunakan oleh PT. PKT dan PT. Badak seluas 3.512 Ha. Untuk wilayah hutan dengan rincian hutan yang dapat dikonversi seluas 3.484 Ha dan

hutan bakau seluas 1.023 Ha. Keadaan Iklim di Kabupaten Kutai Barat dengan curah hujan berkisar 226 mm/tahun sedangkan suhu rata-rata di daerah ini untuk suhu terendah mencapai 25°C dan suhu tertinggi mencapai 32°C.

5.2. Deskripsi Variabel penelitian

Data penelitian secara lengkap, dapat dilihat pada Lampiran 2 tentang Data Hasil Penelitian. Secara ringkas diskriptif data hasil penelitian masing-masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Perkembangan Struktur Ekonomi

Perkembangan struktur ekonomi dalam penelitian adalah perbandingan antara kontribusi nilai tambah masing-masing sektor (primer, sekunder, dan tersier) terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Tabel 5.2 halaman 92 menggambarkan perkembangan struktur ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 s.d Tahun 2005.

Berdasarkan tabel 5.2 halaman 92, sektor primer untuk beberapa Kabupaten/Kota seperti kabupaten Paser, Kutai Barat, Berau, Nunukan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang selama tahun 2001 s.d 2005 selalu mengalami peningkatan termasuk sektor sekunder dan tersier, namun ada beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan dari sektor primer, sekunder dan tersier yaitu Kutai Timur, pada tahun 2002 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2003 mengalami penurunan dan pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan akan tetapi tidak sebesar pada tahun 2002.

Kemudian perkembangan struktur ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, secara sektoral mengalami peningkatan dan masih didominasi sektor primer, namun diikuti oleh sektor tersier dan sektor sekunder, berarti terjadi pergeseran yang meloncat, Kabupaten/Kota yang mengalami kondisi seperti ini

Tabel 5.2
 PERKEMBANGAN STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005
 (RIBUAN RUPIAH)

Kab / Kota	Perkembangan Struktur Ekonomi	Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005
Pasir	Primer	1,912,766	2,002,993	2,110,382	2,240,774	2,405,032
	Sekunder	114,301	118,234	124,328	129,887	136,459
	Tersier	204,522	218,242	227,574	242,012	255,410
Kubar	Primer	1,202,048	1,376,300	1,492,684	1,540,227	1,683,074
	Sekunder	216,802	245,787	287,164	314,472	367,194
	Tersier	244,858	266,138	302,736	341,096	369,548
Kukar	Primer	23,233,017	24,381,997	24,241,525	24,498,141	25,000,802
	Sekunder	898,066	1,094,453	1,202,748	1,375,317	1,524,823
	Tersier	1,131,968	1,221,094	1,310,218	1,406,064	1,482,861
Kutim	Primer	5,876,286	24,381,997	6,623,535	8,345,181	10,198,651
	Sekunder	175,660	318,528	270,559	270,852	277,299
	Tersier	480,276	584,211	600,663	663,137	744,319
Berau	Primer	1,329,100	1,412,485	1,484,303	1,522,088	1,618,340
	Sekunder	375,906	381,450	389,952	399,324	409,677
	Tersier	540,815	564,200	581,940	599,545	619,311
Malinau	Primer	294,750	318,028	307,470	284,804	271,746
	Sekunder	5,833	18,547	37,267	57,345	77,645
	Tersier	74,979	86,545	103,901	112,035	120,426
Bulungan	Primer	394,583	409,990	409,032	415,354	413,836
	Sekunder	237,227	236,267	240,572	251,104	262,923
	Tersier	223,801	240,056	255,988	269,911	286,984
Nunukan	Primer	682,725	733,400	767,811	836,790	919,028
	Sekunder	50,585	62,053	79,746	84,087	86,375
	Tersier	122,270	140,451	144,243	161,977	177,542
Balikpapan	Primer	286,123	301,262	333,451	350,885	339,942
	Sekunder	6,540,553	6,610,719	6,400,988	6,872,794	6,991,872
	Tersier	3,975,325	4,375,952	4,794,219	5,005,009	5,292,237
Samarinda	Primer	401,316	493,918	617,897	683,974	729,498
	Sekunder	2,375,632	2,476,357	2,634,338	2,794,160	2,931,857
	Tersier	3,753,670	4,234,513	4,638,519	5,122,899	5,631,709
Tarakan	Primer	277,857	260,895	286,124	279,574	291,557
	Sekunder	214,910	247,044	274,970	311,972	339,023
	Tersier	895,320	976,020	1,093,359	1,181,615	1,277,886
Bontang	Primer	74,596	68,505	73,259	75,979	82,037
	Sekunder	27,845,256	26,381,943	26,244,724	25,508,612	25,522,248
	Tersier	585,495	605,157	639,071	651,746	661,828

Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2007

diantaranya adalah Kabupaten Pasir hingga Kabupaten Nunukan (berdasarkan urutan dari atas dalam Tabel 5.2 halaman 92), sedangkan Kota Balikpapan dan Kota Bontang, sektor yang dominan adalah sektor sekunder, lalu sektor tersier dan sektor primer; kedua daerah ini memang merupakan daerah industri pengolahan, Kota Balikpapan sebagai daerah industri pengolahan minyak bumi dengan kontribusi sebesar 60 persen dan Kota Bontang sebagai daerah industri pengolahan gas alam cair atau *liquid natural gas* (LNG) dengan kontribusi sebesar 90 persen. Kota Samarinda dan Kota Tarakan, dengan dominasi sektor tersier, lalu sektor sekunder dan sektor primer, termasuk kategori kota perdagangan dan jasa dengan kontribusi masing-masing sebesar 30 persen dan 40 persen. Kabupaten Malinau peranan sektor pertanian masih dominan sekitar 30 s.d 40 persen, kemudian Nunukan, Bulungan, dan Berau serta Pasir dengan kontribusinya sekitar 20 s.d 30 persen dan 30 s.d 40 persen.

5.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Keseluruhan pendapatan asli daerah adalah penjumlahan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan daerah, pendapatan dari dinas-dinas dan pendapatan lainnya yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 s.d 2005 pada tabel 5.3 halaman 94.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 s.d 2005, yang mengalami peningkatan adalah Kutai Barat, Kutai Timur, Bulungan, Samarinda, Tarakan, dan Bontang. sedangkan yang mengalami penurunan adalah Pasir, Malinau, dan Nunukan.

Tabel 5.3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005
(DALAM RUPIAH)

Kab / Kota	PAD per Tahun				
	2,001	2,002	2,003	2,004	2,005
Pasir	945,347,528,916	24,684,720,422	34,673,803,485	28,429,860,535	26,589,041,085
Kubar	27 *)	57 *)	2,546,257,351,644	1,912,414,983,841	981,278,856,780
Kukar	16,322,712,345	15,177,321,048	34,059,939,444	26,061,958,888	41,992,959,075
Kutim	2,958,265,270	5,813,325,256	6,296,339,367	28,301,898,790	20,894,922,702
Berau	10,548,724	2,021,537	22,595,548	21,127,704	27,432,150
Malinau	68,826,425,543	11,107,124	2,953,665,548	840,941,733	1,229,885,769,784
Bulungan	21,991,611	18,748,432	21,126,744	17,802,009	22,912,351
Nunukan	4,352,804,865	11,862,703,491	15,704,267,996	16,266,499,205	16,518,851
Balikpapan	36,905,516,110	49,097,819,895	5,959,294,108,745	67,383,396,802	70,121,114,689
Samarinda	29,977,874,986	45,507,021,903	55,188,761,709	53,155,338,359	71,076,773,540
Tarakan	938,906,127,186	1,373,332,761,563	1,597,818,546,742	1,707,066,847,492	2,676,545,364,264
Bontang	9,827,273,883	11,566,574,692	16,132,623,672	17,257,552,162	21,871,344,524

*) dalam Milyar Rupiah.

Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2007

5.2.3. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah jumlah atau besarnya tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan PTK dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Gambaran perkembangan penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 s.d 2005.

Perkembangan Penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah relatif berbeda, perbedaan jumlah tenaga kerja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan dalam jumlah penduduk, struktur umur, struktur perekonomian daerah dan kesediaan penduduk untuk bekerja pada tingkat upah yang berlaku di pasar.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyerapan

Tabel 5.4
PERKEMBANGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(RATUSAN ORANG)

No	Kab / Kota	Sektor Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	Pasir	Primer	64,187	61,560	66,970	33,632	35,775
		Sekunder	22,252	15,502	17,621	10,762	10,304
		Tersier	29,592	33,895	38,217	23,216	20,613
2	Kubar	Primer	50,424	43,092	44,289	39,452	44,140
		Sekunder	5,431	7,428	4,609	3,257	5,453
		Tersier	8,199	14,088	19,597	13,492	16,996
3	Kukar	Primer	89,743	74,981	79,156	71,641	85,261
		Sekunder	35,887	40,572	43,277	48,686	43,123
		Tersier	54,995	59,764	59,698	57,176	60,394
4	Kutim	Primer	40,061	40,385	48,308	35,677	49,761
		Sekunder	13,575	12,369	10,346	15,018	10,166
		Tersier	9,008	9,815	9,611	13,160	12,162
5	Berau	Primer	28,012	33,348	28,543	23,657	28,625
		Sekunder	7,920	7,280	12,189	10,994	7,627
		Tersier	19,370	18,512	18,175	21,416	19,746
6	Malinau	Primer	16,606	16,272	17,691	14,800	14,173
		Sekunder	184	312	390	1,144	1,182
		Tersier	1,403	1,176	2,749	3,966	4,111
7	Bulungan	Primer	23,060	22,178	33,894	22,350	26,057
		Sekunder	3,333	4,412	2,713	4,420	3,071
		Tersier	9,483	10,678	5,821	11,054	8,561
8	Nunukan	Primer	21,054	24,294	21,732	21,078	22,899
		Sekunder	1,320	1,863	3,802	3,340	2,219
		Tersier	9,041	8,070	16,584	12,713	16,262
9	Balikpapan	Primer	8,082	4,032	13,578	7,130	9,423
		Sekunder	38,027	40,651	40,934	40,481	40,399
		Tersier	113,944	108,478	105,511	115,587	111,903
10	Samarinda	Primer	17,628	15,416	21,789	16,561	17,172
		Sekunder	71,804	68,672	66,756	64,616	61,207
		Tersier	126,924	128,720	132,483	145,937	142,287
11	Tarakan	Primer	10,868	12,240	15,461	13,844	12,589
		Sekunder	10,472	11,340	12,563	12,006	15,239
		Tersier	21,208	20,160	21,259	29,841	35,193
12	Bontang	Primer	3,388	2,058	3,266	2,797	3,465
		Sekunder	16,942	16,333	14,422	14,342	14,140
		Tersier	15,772	18,367	23,373	20,635	21,905

Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2007

tenaga kerja yang rendah sepanjang tahun, sedangkan Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur merupakan daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi sepanjang tahun. selain jumlah penduduk yang relatif besar dan struktur perekonomian, Samarinda merupakan daerah tujuan bagi pencari kerja yang berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sektor primer masih merupakan sektor yang relatif besar dalam menyerap tenaga kerja, Kabupaten/Kota yang mengalami kondisi seperti ini diantaranya adalah Kabupaten Pasir hingga Kabupaten Nunukan (berdasarkan urutan dari atas dalam Tabel 5.4 halaman 99), sedangkan Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tarakan dan Kota Bontang, sektor yang relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor tersier, kemudian sektor sekunder dan sektor primer.

5.2.4. Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Variabel kesejahteraan sosial ekonomi, memiliki dua indikator variabel, yaitu pendapatan per kapita sebagai pencerminan kesejahteraan ekonomi, usia harapan hidup dan angka melek huruf sebagai pencerminan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2001 s.d 2005, berdasarkan pendapatan per kapita mengalami kenaikan. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup tinggi Tahun 2001 s.d 2005 berdasarkan pendapatan per kapita adalah Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Hal ini berkaitan dengan posisi daerah tersebut sebagai daerah industri dan mempunyai sumberdaya alam (SDA) yang melimpah namun secara keseluruhan perbedaan pendapatan antar daerah relatif kecil. Kemudian berdasarkan usia harapan hidup semua Kabupaten/Kota termasuk kategori sedang (0,51–0,79), berarti mulai memperhatikan pembangunan

manusianya dan angka melek huruf semua Kabupaten/Kota termasuk kategori tinggi (0,80–1,00), berarti amat memperhatikan pembangunan manusianya.

Tabel 5.5
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 s.d 2005

Kab / Kota	Kesejahteraan Sosial Ekonomi	Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005
Pasir	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	12.37	12.40	12.63	13.13	13.70
	AMH (Indeks)	90.42	89.17	90.52	91.79	94.07
	AHH (Indeks)	65.10	64.74	71.30	71.30	71.70
Kubar	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	9.05	10.05	10.75	11.25	12.25
	AMH (Indeks)	92.70	93.40	90.46	89.30	92.12
	AHH (Indeks)	65.43	68.01	69.10	69.30	69.40
Kukar	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	52.91	51.77	34.00	81.77	41.99
	AMH (Indeks)	94.20	94.57	93.26	95.75	93.24
	AHH (Indeks)	65.47	66.64	66.20	66.70	67.50
Kutim	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	32.22	36.54	34.03	41.03	48.19
	AMH (Indeks)	93.75	94.81	89.75	93.64	93.87
	AHH (Indeks)	66.23	66.09	67.10	67.60	67.80
Berau	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	4.04	3.66	4.20	15.09	15.16
	AMH (Indeks)	93.76	93.30	96.09	92.11	94.67
	AHH (Indeks)	65.23	65.24	68.40	68.50	68.90
Malinau	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	7.21	7.34	6.92	6.75	6.79
	AMH (Indeks)	87.27	90.84	92.01	90.76	91.02
	AHH (Indeks)	67.13	67.22	67.20	67.60	67.80
Bulungan	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	2.52	9.04	9.00	9.07	9.27
	AMH (Indeks)	93.65	93.72	89.45	93.62	92.20
	AHH (Indeks)	67.07	66.98	71.90	71.90	72.20
Nunukan	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	8.20	8.66	8.83	9.40	10.00
	AMH (Indeks)	84.21	93.20	91.74	93.03	89.65
	AHH (Indeks)	69.47	70.24	69.70	70.20	70.50
Balikpapan	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	13.86	13.82	14.06	14.76	15.18
	AMH (Indeks)	97.15	95.99	97.08	97.56	96.00
	AHH (Indeks)	70.47	71.05	70.80	70.80	71.10
Samarinda	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	11.05	11.95	12.88	13.91	14.28
	AMH (Indeks)	94.68	97.16	96.97	96.39	96.33
	AHH (Indeks)	69.70	69.83	69.10	69.30	70.00
Tarakan	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	7.63	7.86	8.44	8.81	9.13
	AMH (Indeks)	98.39	98.68	97.94	97.74	95.19
	AHH (Indeks)	71.93	70.92	70.90	70.00	70.90
Bontang	Pendpt/Kapita (Juta Rp)	259.32	240.13	219.86	212.92	208.14
	AMH (Indeks)	97.79	98.28	98.86	98.06	97.35
	AHH (Indeks)	70.83	69.31	71.40	71.60	71.70

Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2007

5.3. Uji Asumsi PLS : Linieritas

Asumsi linieritas diuji dengan metode *Curve Fit*, hasilnya disajikan pada Lampiran 3. Rujukan yang digunakan adalah prinsip *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau nonsignifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pengujian linieritas hubungan antar variabel disajikan secara ringkas pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.6
PENGUJIAN ASUMSI LINIERITAS VARIABEL PENELITIAN

Variabel	Hasil Pengujian ($\alpha = 0,05$)	Keputusan
Pendapatan Asli Daerah (Y_1)	Model linier signifikan	Linier
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer ($Y_{2,1}$)	Model linier signifikan	Linier
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder ($Y_{2,2}$)	Model linier signifikan	Linier
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier ($Y_{2,3}$)	Model linier signifikan	Linier
Pendapatan Per kapita ($Y_{3,1}$)	Model linier signifikan	Linier
Usia HarapanHidup ($Y_{3,2}$)	Model linier signifikan	Linier
Angka Melek Huruf ($Y_{3,3}$)	Model linier signifikan	Linier

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2007.

Tabel 5.6, menunjukkan bahwa semua hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model adalah linier, sehingga asumsi linieritas pada analisis PLS telah terpenuhi.

5.4. *Goodness of Fit Model* Hasil Analisis dengan PLS

Analisis *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui apakah model hasil analisis cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Hasil analisis *goodness of fit* model dengan *software* SmartPLS, secara lengkap disajikan pada Lampiran 5. Pada tahap awal analisis diperoleh satu indikator dari variabel

penyerapan tenaga kerja yang nilai *outer weight*-nya adalah negatif, yaitu indikator penyerapan tenaga kerja sektor sekunder ($Y_{2.2}$), sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model. Analisis pada tahap evaluasi berikutnya juga menghasilkan satu indikator dari variabel penyerapan tenaga kerja yang nilai *outer weight*-nya adalah negatif, yaitu indikator penyerapan tenaga kerja sektor tersier ($Y_{2.3}$), sehingga indikator tersebut juga dikeluarkan dari model. Dengan demikian pada analisis tahap akhir, indikator dari penyerapan tenaga kerja hanya satu, yaitu penyerapan tenaga kerja sektor primer.

Pengujian *goodness of fit* model diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2) \\ &= 1 - (1 - 0.211)(1 - 0.829)(1 - 0.711) \\ &= 0.9610 \end{aligned}$$

Hal ini mengindikasikan bahwa model adalah baik, karena variabel-variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 96,10 %. Sisanya 3,90 % merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi Kesejahteraan Sosial Ekonomi yang belum dimasukkan ke dalam model, termasuk di dalamnya adalah *error*. Dengan demikian model hasil analisis layak dilakukan inferensi guna pembuktian hipotesis.

5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian koefisien jalur, dilakukan dengan uji t pada analisis PLS dan dihitung menggunakan *software* SmartPLS, secara lengkap disajikan pada

Lampiran 5. Hasil pengujian hipotesis tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
KOEFSIEN JALUR DAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Keputusan Uji Hipotesis
Perbhn Str Prm -> PAD	-0.274	0.001	Signifikan
Perbhn Str Skdr -> PAD	0.060	0.504	Nonsignifikan
Perbhn Str Trs -> PAD	0.341	0.000	Signifikan
Perbhn Str Prm -> PTK	1.024	0.000	Signifikan
Perbhn Str Skdr -> PTK	0.070	0.155	Nonsignifikan
Perbhn Str Trs -> PTK	-0.249	0.000	Signifikan
PAD -> PTK	0.212	0.000	Signifikan
Perbhn Str Prm -> Kesejahteraan	-1.025	0.000	Signifikan
Perbhn Str Skdr -> Kesejahteraan	-0.170	0.048	Signifikan
Perbhn Str Trs -> Kesejahteraan	-0.121	0.020	Signifikan
PAD -> Kesejahteraan	0.111	0.001	Signifikan
PTK -> Kesejahteraan	0.123	0.032	Signifikan

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2007

Berdasarkan Tabel 5.7, maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar -0,274 dan $p = 0,001$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer akan berakibat menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh nonsignifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur

sebesar 0,060 dan $p = 0,504$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang nonsignifikan.

3. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 0,341 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 1,024 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh nonsignifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 0,070 dan $p = 0,155$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang nonsignifikan.
6. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar - 0,249 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan

struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat menurunkan penyerapan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 0,212 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar - 1,025 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar - 0,170 dan $p = 0,048$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor sekunder akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

10. Perubahan Struktur Sektor Tersier berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar - 0,121 dan $p = 0,020$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 0,111 dan $p = 0,001$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
12. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE) di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil analisis menggunakan PLS diperoleh koefisien jalur sebesar 0,123 dan $p = 0,032$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja (PTK) akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 6

PEMBAHASAN

BAB 6

PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini akan dilakukan kajian guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, kemudian berdasarkan hasil uji signifikansi akan dibahas apakah hipotesis diterima atau ditolak sesuai dengan dukungan data dan kajian secara teoritis. Hasil analisis yang telah diperoleh dan telah disajikan pada Bab 5 akan dibahas mengenai makna dan mengapa hal itu terjadi, kemudian dikaitkan relevansinya dengan teori-teori yang ada serta penelitian terdahulu sebagai kajian empirik.

6.1. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengamati dan menganalisis perubahan ekonomi suatu daerah, maka kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam sektor ekonomi berdasarkan kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam memproduksi. Pengelompokkan tersebut untuk menggambarkan keadaan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh dalam perekonomian masing-masing Kabupaten/Kota (BPS,2006c:15).

Perekonomian suatu daerah selalu mengalami perubahan dalam waktu tertentu baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, implikasi perubahan tersebut diantaranya perluasan kesempatan kerja, membaiknya pendapatan masyarakat, serta terhadap pendapatan daerah suatu wilayah/daerah, mengingat sektor ekonomi merupakan determinan terhadap pendapatan daerah terutama yang diukur dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat diketahui dari analisis kemampuan pajak (pajak daerah). Analisis ini lebih mengarah pada perbandingan kemampuan rasio pajak (*tax ratio*) yaitu merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (PDB).

Dengan demikian kemampuan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional (Bahl dalam Fitriadi, 1999:9-10).

Hasil Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

6.1.1. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil pengujian hipotesis pertama menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar - 0,274 dan $p = 0,001$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif antara perubahan struktur ekonomi sektor primer terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer akan berakibat menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Temuan studi ini, terutama untuk sektor primer dan tersier tidak berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriadi (1999) di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 1983/1984-1996/1997, menyebutkan bahwa kapasitas pajak secara bersama-sama dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor pertambangan, kontribusi sektor industri, kontribusi sektor perdagangan. Namun perlu hati-hati, bahwa secara parsial sektor pertanian berpengaruh tidak signifikan. Sementara itu, temuan studi ini, untuk sektor sekunder berbeda dengan hasil penelitian Fitriadi (1999) tadi. Temuan ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian di Indonesia oleh Nersiwad (1997) selama periode tahun 1974 sampai dengan tahun 1993, terungkap bahwa variabel kontribusi sektor pertanian, industri dan rasio ekspor bersih terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio pajak.

Temuan studi ini sesuai dengan pendapat Bahl (1978), tentang teori rasio pajak yang menyebutkan bahwa rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan pendapatan regional. Bahl, menjelaskan bahwa rasio pajak merupakan hasil pajak (*tax yield*) sebagai fungsi pendapatan. Analisisnya mengenai kapasitas pajak antar negara menyebutkan bahwa determinan dari sektor pertanian dan pertambangan (merupakan sektor primer) adalah signifikan.

Temuan ini sejalan dengan fakta, bahwa pada sektor pertanian telah terjadi transformasi eksternal, yaitu semakin menurunnya peran sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesempatan kerja, kemudian sektor pertanian semakin mengurangi jenis tanaman pangan, dan semakin banyak menanam jenis tanaman industri. Selanjutnya bila dilakukan pemungutan pajak terhadap sektor pertanian, maka akan menurunkan minat investasi petani sehingga menyebabkan produktivitas pertanian mengalami penurunan (Hakim, 2002:283-288).

Pengaruh signifikan dan bersifat negatif antara variabel perubahan struktur sektor primer terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipahami mengingat sektor primer adalah sektor yang terdiri dari sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalan. Kedua sektor ini memberikan kontribusi dan dominasinya terhadap perekonomian, sehingga bila terjadi perubahan pada sektor tersebut maka akan menyebabkan pula perubahan pada perekonomian seperti pendapatan daerah. Dengan demikian wajar bila secara statistik berpengaruh signifikan, namun kenaikan tersebut malah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan asli daerah, hal ini dapat diartikan bahwa perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) relatif besar dari perubahan pendapatan asli daerah (PAD),

perubahan ini bersifat inelastis, artinya perubahan PDRB tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini sejalan dengan temuan Yulianti dalam Halim (2001: 31).

Sektor pertanian adalah sektor yang bukan merupakan basis pajak (pajak daerah) dan retribusi (retribusi daerah), sedangkan sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian penerimaan daerah yang diharapkan dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan basis pajaknya adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian, belum dapat terpenuhi. Sehingga penerimaan daerah bukan berasal dari pajak sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian namun dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak yaitu pajak bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25 atau pasal 29. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yaitu dari sumberdaya alam hutan berupa iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), serta dari pertambangan umum berupa *landrent* dan *royalty*; dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini merupakan bagian dari implikasi ekonomi politik pemerintah pusat, hampir semua sumber ekonomi strategis daerah (misalnya sumberdaya alam) mobilisasi, alokasi penggunaan dan ketentuan-ketentuan perpajakannya menjadi sangat sentralistis (*highly centralized*), akibat logis dari implementasi kebijakan yang sangat sentralistis ini ialah menumpuknya keuntungan dan segala manfaat pembangunan di pusat sebab penerimaan negara dari pajak akan terakumulasi di Jakarta (Wahab, 2002:50). Ketergantungan ekonomi dan keuangan yang besar pada bantuan pusat inilah yang menyebabkan kondisi keuangan daerah senantiasa berada pada posisi yang amat rentan (*vulnerable*), oleh karena itu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi penguatan keuangan daerah dalam kenyataannya

banyak tergantung pada pendapatan dan perekonomian setempat yang langsung dipengaruhi oleh perubahan perekonomian nasional (Wahab, 2002:55-57). Berbagai jenis pungutan yang ada ternyata tidak semuanya menghasilkan pendapatan yang relatif besar bagi daerah, kenyataan ini membenarkan hasil penelitian Bank Dunia di berbagai negara pada tahun 1995 lalu, dikutip oleh Kingsley dalam Wahab (2002:56) bahwa *local revenue sources are limited and heavily regulated by central government*.

Relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), disebabkan terbatasnya jumlah atau jenis pendapatan asli daerah (PAD) yaitu meliputi hasil pajak daerah (terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir). Hasil retribusi daerah (terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perijinan tertentu). Pendapatan dari perusahaan daerah dan Pendapatan lain yang sah (penjualan asset daerah). Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar Rp 1,85,- milyar, sedangkan perkembangan sektor primer rata-rata sebesar Rp 2,79,- milyar. Fakta ini menggambarkan bahwa walaupun perekonomian mengalami perubahan relatif baik, namun kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) relatif rendah. Hal ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan daerah serta pendapatan lainnya yang sah, belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Fakta ini sangat beralasan, mengingat kondisi perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, berbasis pada sumberdaya alam (SDA), yang merupakan bagian penerimaan pemerintah pusat.

Hubungan antara perubahan struktur ekonomi dan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan melalui elastisitas pendapatan asli daerah. Elastisitas pendapatan asli daerah adalah setiap perubahan struktur ekonomi mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Elastisitas pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 0,82 persen, lebih kecil dari 1 (satu) berarti inelastis. Angka ini memberikan indikasi bahwa perubahan struktur ekonomi relatif rendah direspon oleh pendapatan asli daerah, namun perlu diingat bukan berarti terjadi penurunan pendapatan asli daerah, tetapi kenaikannya relatif rendah.

Secara umum pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota didukung oleh sektor perdagangan, manufaktur dan jasa, dengan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada tahun 2001 sebesar 50,36 persen dan tahun 2005 sebesar 47,08 persen, sedangkan sektor pertanian bukan merupakan basis pajak berarti sektor ini tidak dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah; sektor pertambangan merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah dalam bentuk bagi hasil bukan pajak, yang terdiri dari *land rent* pertambangan, *royalti* minyak dan *royalti* gas, dengan bagian terbesar dari penerimaan tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat, seperti *land rent* pertambangan diterima pusat sebesar 20 persen dan daerah 80 persen (Provinsi 16 persen, Daerah tanpa sumberdaya pertambangan 0 persen, dan daerah dengan sumberdaya pertambangan 64 persen); *royalti* minyak diterima pusat sebesar 85 persen dan daerah 15 persen (Provinsi 3 persen, Daerah tanpa sumberdaya minyak 6 persen, dan daerah dengan sumberdaya minyak 6 persen) serta *royalti* gas diterima pusat sebesar 70 persen dan daerah 24 persen (Provinsi 6 persen, Daerah tanpa sumberdaya gas 6 persen, dan daerah dengan sumberdaya gas 12 persen).

Alasan lain mengenai rendahnya pendapatan asli daerah adalah sentralisasi pajak, sehingga dapat menyebabkan pajak daerah yang produktif dan *bouyant* (penerimaan pajak di daerah mengalami kenaikan karena membaiknya perekonomian daerah/nasional), dipungut oleh pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan bertindak (*local discretion*), sehingga tidak dapat melakukan perubahan pada jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah (*tax discretion*), artinya penerimaan pajak di daerah dapat meningkat bila ada jenis pajak baru (pajak produktif) atau perubahan tarif pajak.

6.1.2. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil pengujian hipotesis kedua menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah ditolak. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,060 dan $p = 0,504$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang nonsignifikan. Artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Variabel perubahan struktur ekonomi sektor sekunder tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD), hal ini dapat dipahami bahwa sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan. Pada sektor Industri pengolahan, dijelaskan bahwa kegiatan industri adalah kegiatan merubah bentuk sesuatu barang menjadi produk baru yang lebih baik mutunya, namun tidak selalu barang yang diolah atau diubah bentuknya dapat selesai dalam waktu singkat, bahkan memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama, atau dengan kata lain barang tadi masih dalam

proses pengerjaan (*work in process*). Berkembangnya Industri pengolahan disebabkan meningkatnya konsumsi terhadap barang-barang industri, seperti yang disebutkan dalam Hukum Engels tentang *Elasticity of Income*. Barang-barang hasil industri umumnya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn), yang merupakan bagian dari pajak pemerintah pusat. Fakta lainnya adalah jumlah industri manufaktur yang terdapat di Kabupaten/Kota tidak cukup banyak, sekitar 20 industri berskala besar dengan kegiatan antara lain produksi gas alam cair, eksplorasi minyak dan gas, penambangan batu bara, perkebunan dan perikanan serta pupuk/kimia, oleh karena itu peranannya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif rendah, selain alasan bahwa pajak yang dikenakan dari industri manufaktur merupakan bagian pajak yang diterima oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dijelaskan dengan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pengeluaran, bila memiliki proporsi tinggi berarti jumlah industri manufaktur cukup banyak atau sebaliknya bila memiliki proporsi rendah berarti jumlah industri manufaktur tidak cukup banyak (Khusaini, 2006:155). Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur terhadap total pengeluaran selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebesar 7,83 persen, angka ini termasuk proporsi rendah, berarti tidak banyak industri yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dapat dijadikan sebagai alasan, mengapa sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu sektor listrik, gas dan air bersih dapat diuraikan berdasarkan kapasitasnya, di mana sektor ini, terutama listrik dan air bersih memiliki kapasitas terpasang lebih kecil dari kapasitas terpakai, sehingga kondisi ini sangat memungkinkan adanya subsidi terhadap sektor ini, kemudian mempunyai kewenangan dalam memungut pajak penerangan jalan, sedangkan pada air bersih

berupa pungutan Abodemen. Dengan demikian kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Kemudian sektor bangunan, menunjukkan bahwa peranannya relatif rendah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pada sektor ini hanya dapat dipungut dalam bentuk pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), keduanya merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, lalu dibagikan pada daerah melalui dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak dengan ketentuan pusat 10 persen, provinsi 16,2 persen dan semua Kabupaten/Kota 84 persen serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masing-masing pusat 20 persen, provinsi 16 persen dan semua Kabupaten/Kota 64 persen.

6.1.3. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,341 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan struktur ekonomi sektor tersier terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor tersier akan berakibat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian perubahan struktur sektor tersier dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pengaruh yang signifikan antara variabel perubahan struktur ekonomi sektor tersier terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara umum, sektor ini menghasilkan nilai tambah (*added value*) dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor ini mempunyai peranan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari hasil pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Dengan demikian wajar sektor ini berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga peranannya perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah, terutama yang terkait langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD) tergantung pada beberapa faktor, di antaranya kondisi objektif perekonomian nasional dan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Oleh sebab itu penggalan potensi ekonomi daerah demi peningkatan PAD seyogyanya dilihat dari sudut kepentingan masing-masing daerah dan perekonomian nasional (Wahab, 2002:57).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

- a. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah diterima.

Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD), walaupun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer namun belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

- b. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah ditolak. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa hubungan kausal antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap pendapatan

asli daerah (PAD) bersifat kompleks dan masih terbuka peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut.

- c. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier, maka semakin meningkat pendapatan asli daerah (PAD).

6.2. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)

Hasil Pengujian hipotesis keempat, kelima dan keenam tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) sebagai berikut :

6.2.1. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

Hasil pengujian hipotesis keempat menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar 1,024 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor primer akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK). Dengan demikian perubahan struktur sektor primer mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

Temuan studi ini, menguatkan teori dua sektor dari Lewis dan Ranis-Fei dalam Hakim (2002:95), teori ini mengatakan bahwa negara sedang berkembang

mempunyai dua sektor dengan sifat yang berbeda yaitu sektor pertanian dan sektor industri, selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena semakin membesarnya sektor industri, bahkan disertai perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, sebagai akibat perbedaan tingkat upah pada kedua sektor tersebut, di mana sektor industri memiliki upah yang relatif tinggi.

Temuan studi ini memperkuat konsep Kuznets berdasarkan pengamatannya dalam Mahyudi (2004:177), bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sekaligus menunjukkan terjadinya perpindahan tenaga kerja. Kemudian dari pandangan ekonomi baru tentang pembangunan, telah terjadi redefinisi mengenai pembangunan ekonomi, yang menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, melainkan pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2003:19-20).

Temuan studi ini tidak berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, 2004:94, yang menemukan bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur telah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sekaligus terjadi pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja tersebut dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier; di mana sektor primer masih merupakan sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja.

Temuan studi ini juga tidak berbeda dengan hasil penelitian Rochaida, 2005:145, yang menemukan bahwa disparitas pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja. Hal ini mempunyai makna bahwa perbedaan tingkat pembangunan antar daerah akan berpengaruh terhadap

penyerapan tenaga kerja daerah, bila pembangunan meningkat dan disparitas rendah maka penyerapan tenaga kerja daerah akan meningkat pula.

Temuan studi ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Soegiarto, 2007:194, penelitian ini menemukan bahwa kinerja usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja usaha mikro, maka akan diikuti dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak.

Pengaruh signifikan antara variabel perubahan struktur ekonomi sektor primer terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) dapat dimaklumi mengingat sektor primer terdiri dari sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja, dan membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang relatif rendah. Ditemukan fakta bahwa tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian, masih lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2005, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian rata-rata 461.932 orang atau mencapai 33,92 persen. Signifikannya sektor pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja, memberikan indikasi bahwa pada sektor ini, lebih banyak melibatkan tenaga kerja pada pertambangan tradisional dan bahan galian golongan C saja, selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tahun 2005, penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan rata-rata 41.785 orang atau mencapai 3,91 persen .

6.2.2. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

Hasil pengujian hipotesis kelima menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap terhadap penyerapan

tenaga kerja (PTK) adalah ditolak. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,070 dan $p = 0,155$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang nonsignifikan. artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).

Variabel perubahan struktur ekonomi sektor sekunder tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (PTK), hal ini dapat dipahami bahwa sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan. Secara keseluruhan sektor ini belum berperan secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja; sektor industri pengolahan lebih dikenal dengan padat modal (*capital intensive*) dan menggunakan teknologi tinggi (*high technology*), sehingga sangat terbatas dalam menggunakan tenaga kerja, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling rendah dalam menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 0,70 persen. Sektor lainnya adalah sektor bangunan, umumnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pencatatan terhadap daya serap tenaga kerja lokal relatif rendah, meskipun sektor ini mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 7,57 persen, dan yang perlu diketahui pula bahwa status pekerjaan sebagai buruh/karyawan merupakan proporsi terbesar dari pekerjaan penduduk mencapai 46,30 persen.

6.2.3. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

Hasil pengujian hipotesis keenam menyabutkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar -0,249 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor tersier akan berakibat menurunkan penyerapan tenaga kerja (PTK). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar perubahan sektor tersier malah akan berakibat menurunkan penyerapan tenaga kerja (PTK). Dengan demikian perubahan struktur sektor tersier belum mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

Pengaruh yang signifikan antara variabel Perubahan struktur ekonomi sektor tersier terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), dapat dipahami bahwa sektor ini merupakan variabel yang penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), namun belum mampu berperan secara optimal. Beberapa hal yang dapat diuraikan berkaitan dengan ini di antaranya berupa kebijakan *zero growth* dalam penerimaan pegawai, kemudian kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang keuangan, hanya mempunyai kantor cabang di daerah, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pegawai ditentukan melalui kantor pusat, sektor ini relatif rendah dalam menyerap tenaga kerja hanya mencapai 1,01 persen. Kondisi lainnya adalah relatif minimnya sarana dan prasarana transportasi, yang terlihat dari rute trans Kalimantan atau rute antar daerah dalam provinsi, kondisi jalan yang belum memadai dan jumlah panjang jalan serta sarana transportasi atau jumlah armada yang masih terbatas. Kondisi ini secara keseluruhan dapat memberikan indikasi mengenai kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Demikian pula dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dapat menyerap tenaga kerja sekitar 20,97 persen, kemudian relatif rendah tingkat hunian hotel, hanya sekitar 20 hingga 30 persen, serta belum banyak hotel berbintang yang dapat dijadikan andalan dalam menunjang penerimaan daerah yaitu pajak hotel.

Elastisitas kesempatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2001 samai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 0,12 persen, lebih kecil dari 1 (satu) berarti inelastis. Angka ini memberikan indikasi bahwa

perubahan struktur ekonomi relatif rendah direspon oleh penyerapan tenaga kerja, tetapi bukan berarti mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja, hanya kenaikannya relatif rendah, selain itu selama tahun 2001 s.d tahun 2005, tingkat pengangguran cenderung menurun tahun 2004 sebesar 8,46 persen menjadi 8,0 persen pada tahun 2005.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) sebagai berikut :

- a. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Semakin besar perubahan sektor primer, maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja (PTK).
- b. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah ditolak. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa hubungan kausal antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) bersifat kompleks dan masih terbuka peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut.
- c. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Meskipun semakin besar perubahan sektor tersier, tetapi belum optimal dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

6.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

Hasil pengujian hipotesis ketujuh tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) menyebutkan hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,212 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

Temuan studi ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Temuan studi ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Lindahman dan Thurmaier (2002). Penelitian ini menggunakan variabel penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* (HDI) untuk melihat variabel *basic needs*, hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Walaupun desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi dan sebagainya.

Pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), dapat dipahami, dengan memperhatikan hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa argumentasi yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, antara lain adalah (Oates, 1993; Martinesz dan Macnab,

1997), argumentasinya bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kemudian penelitian lain seperti Bird (1993), Bahl dan Linn (1992), Gramlich (1993), dan Zhang dan Zou (1998), yang menjelaskan bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Khusaini, 2006 : 45-47). Pengaruh positif desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa semakin tinggi desentralisasi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja (PTK).

Berdasarkan uraian tadi, hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD), maka akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

6.4. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)

Hasil pengujian hipotesis kedelapan, kesembilan dan kesepuluh tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) sebagai berikut :

6.4.1. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Primer Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)

Hasil pengujian hipotesis kedelapan tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi sektor primer terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) menyebutkan hasil bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar -1,025 dan $p = 0,000$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang

signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor primer akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur sektor primer belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

Temuan studi ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harmini (1997), yang menemukan bahwa semakin bersifat modern (industrial) struktur ekonomi suatu daerah, maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin meningkat. Selanjutnya temuan studi ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darussalam (2005), yang menemukan bahwa pembentukan nilai tambah (*added value*) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Temuan studi ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rochaida (2005), dengan temuan bahwa disparitas pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Tinggi rendahnya disparitas pembangunan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi daerah, kemudian bila pembangunan meningkat dan disparitas mengecil maka kesejahteraan akan meningkat pula. Temuan studi ini juga relevan dengan pendapat Gwartney *et al.* (2003), hasil penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Selanjutnya temuan studi ini sesuai dengan teori Malthus dalam Suryana (2000:55), yang menjelaskan bahwa kesejahteraan hanya terjadi jika ada peningkatan '*effective demand*', dan peningkatan permintaan efektif tersebut akan meningkatkan kesejahteraan. Secara eksplisit penjelasan tersebut mengandung makna bahwa meningkatnya permintaan efektif atau permintaan yang dapat direalisasikan hanya akan terjadi jika tersedia pendapatan, artinya meningkatnya

pendapatan akan meningkatkan permintaan efektif (konsumsi) barang dan jasa yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan.

Pengaruh signifikan dengan arah negatif variabel perubahan struktur sektor primer terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), dapat dipahami mengingat sektor primer terdiri dari sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian. Pada sektor pertanian, jumlah tenaga kerja yang bekerja relatif banyak namun dengan tingkat upah yang rendah, serta produktivitasnya rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan yang diukur dari besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian secara umum merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah pusat dalam bentuk *land rent* pertambangan sebesar 20 persen dan *royalty* minyak sebesar 85 persen serta *royalty* gas sebesar 70 persen, kemudian investornya berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur termasuk investor asing (PMA) dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*), berarti pendapatan faktor yang keluar dari Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih besar dibandingkan pendapatan faktor yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dapat menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita, besarnya pendapatan per kapita pada tahun 2001 dan tahun 2005 masing-masing Rp 13,61,- juta dan Rp 23,91,- juta, bila tanpa memperhitungkan nilai faktor neto yang keluar masuk Provinsi Kalimantan Timur masing-masing sebesar Rp 30,96,- juta dan Rp 54,35,- juta sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penghisapan (*exploitasi*) terhadap sumberdaya ekonomi milik daerah, sekaligus juga telah terjadi pengalihan atau perpindahan kekayaan melalui pegawai/karyawan

perusahaan pertambangan dan sebagainya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur.

6.4.2. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Sekunder Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE)

Hasil pengujian hipotesis kedelapan tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) menyebutkan hasil bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. diperoleh koefisien jalur sebesar $-0,170$ dan $p = 0,048$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor sekunder akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur ekonomi sektor sekunder belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

Variabel perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap variabel kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), hal ini dapat dipahami bahwa sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan. Sektor ini, selain dicirikan dengan padat modal (*capital intensive*), disertai penggunaan teknologi tinggi (*high technology*), sehingga sangat terbatas dalam menggunakan tenaga kerja, kemudian umumnya tenaga kerja tersebut berasal dari luar daerah, termasuk pekerja atau buruh bangunan, sehingga belum menggambarkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diukur dari pendapatan yang diterima.

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling rendah dalam menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 0,70 persen. Sektor lainnya adalah sektor

bangunan, umumnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pencatatan terhadap daya serap tenaga kerja lokal relatif rendah, meskipun sektor ini mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sekitar 7,57 persen, dan yang perlu diketahui pula bahwa status pekerjaan sebagai buruh/karyawan merupakan proporsi terbesar dari pekerjaan penduduk mencapai 46,30 persen, dan relatif besar merupakan tenaga kerja lokal. Dengan demikian pada sektor Sekunder terjadi perbedaan upah yang diterima pekerja, sehingga pendapatan faktor yang keluar relatif besar dibandingkan dengan pendapatan faktor yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur.

6.4.3. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Sektor Tersier Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE).

Hasil pengujian hipotesis kesembilan tentang pengaruh perubahan struktur ekonomi sektor primer terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) menyebutkan hasil bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar $-0,121$ dan $p = 0,020$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perubahan sektor tersier akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur sektor tersier belum dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

Pengaruh yang signifikan dengan arah negatif variabel perubahan struktur ekonomi sektor tersier terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), dapat dijelaskan bahwa sektor ini memperkerjakan tenaga kerja yang juga berasal dari luar daerah, sehingga akan memberikan gambaran yang sama mengenai

kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian beberapa hal yang juga dapat menjelaskan kondisi ini antara lain disebutkan bahwa kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang keuangan, hanya mempunyai kantor cabang di daerah, lalu kondisi sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai serta kondisi akomodasi juga relatif terbatas. Berdasarkan kondisi-kondisi tadi maka dapat dikatakan bahwa sektor ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) selama Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 mengalami kenaikan dari Rp 88,61,- triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 101,41 triliun,- pada tahun 2005, seiring dengan itu pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 13,61,- juta dan Rp 23,91,- juta; proporsi pendapatan per kapita dengan produk domestik regional bruto (PDRB) adalah 15,35 persen dan 23,58 persen; berarti peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) belum meningkatkan pendapatan per kapita secara proporsional; demikian pula dengan angka melek huruf rata-rata 94 persen termasuk kategori tinggi dan angka harapan hidup rata-rata 69 persen termasuk kategori sedang. Hal ini memberikan indikasi pemerintah daerah harus meningkatkan perhatiannya terhadap pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan ditingkatkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) sebagai berikut :

- a. Hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Namun semakin besar

perubahan sektor primer akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur ekonomi sektor primer belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

- b. Hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor sekunder akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur ekonomi sektor sekunder belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).
- c. Hipotesis kesepuluh yang menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian perubahan struktur ekonomi sektor tersier belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

6.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE).

Hasil pengujian hipotesis kesebelas tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) menyebutkan hasil bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan

sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,111 dan $p = 0,001$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Temuan studi ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Temuan studi ini tidak bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo dalam Halim (2001 : 263) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula. Temuan studi ini juga tidak bertentangan dengan hasil penelitian Priyagus (2007) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), hal ini dapat dipahami bahwa keseluruhan pendapatan yang berasal dari PAD memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah, sekaligus sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan pendapatan. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) relatif terbatas. Sejalan dengan ini diperlukan strategi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu strategi yang memfokuskan penggunaan anggaran belanja pembangunan untuk membiayai sektor-sektor yang dapat mendorong terciptanya sumber-sumber penerimaan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui realokasi anggaran pembangunan, yaitu mengalihkan anggaran pembangunan yang berbasis sosial

kepada yang berbasis ekonomi, dan pencapaian sasaran pembangunan dapat lebih efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penerimaan manfaat pembangunan tersebut, Armayanti dalam (Halim,2001:210). Temuan studi ini sejalan dengan hasil penelitian Lindahman dan Thurmaier (2002) yang menjelaskan tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang lebih sehat. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya studi ini relevan dengan pandangan *fiscal federalism theory*, yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari desentralisasi fiskal; ada dua perspektif teori yaitu *traditional theories (first generation theory)* dan *new perspective theories (second generation theory)*. Implikasi terpenting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian dengan proses desentralisasi fiskal akan dapat mengantarkan masyarakat lokal menjadi lebih sejahtera (Khusaini, 2006 : 129-131).

Berdasarkan uraian tadi, hipotesis kesebelas yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

6.6. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi (KSE).

Hasil pengujian hipotesis keduabelas tentang pengaruh penyerapan tenaga kerja (PTK) terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) menyebutkan hasil

bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Diperoleh koefisien jalur sebesar 0,123 dan $p = 0,032$, sehingga diputuskan terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja (PTK) mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

Temuan studi ini menjelaskan bahwa, penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Temuan studi ini tidak bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rochaida (2005) yang menjelaskan bahwa struktur penyerapan tenaga kerja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi daerah. Kemudian hasil penelitian Rahma (2006) yang menjelaskan bahwa penciptaan lapangan kerja, dapat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan studi ini juga relevan dengan hasil penelitian Soegiarto (2007) yang menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja usaha kecil berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi usaha kecil. Namun temuan studi ini tidak mendukung temuan sebelumnya, yang dilakukan oleh Darussalam (2005) yang menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Batam, serta temuan Priyagus (2007) yang menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Menurut Priyagus bahwa jumlah tenaga kerja merupakan *input* atau faktor produksi yang belum berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah tenaga kerja yang kurang berkualitas akan menurunkan produktivitas dan pendapatan yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan.

Pengaruh signifikan antara penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan sosial ekonomi ini relevan dengan pendapat Todaro, 1999:280 yang mengatakan bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, temuan ini menguatkan temuan Sumodiningrat, 2001:13 yang mengatakan bahwa kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan.

Berdasarkan uraian tadi, hipotesis duabelas yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE) adalah diterima. Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Semakin besar penyerapan tenaga kerja (PTK), maka akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

6.7. Temuan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka temuan hasil studi ini menjelaskan pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur serta memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan berupa temuan teoritis dan empiris. Beberapa hasil temuan tersebut antara lain :

1. Hubungan kausal antara perubahan struktur ekonomi dengan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan sosial ekonomi, merupakan pengembangan hasil sintesis teori dan penelitian terdahulu. Teori yang terkait dengan studi ini adalah teori perubahan struktur ekonomi yang dikembangkan oleh Kuznet (1965), Lewis (1973), Chenery *and* Syrquin

(1975); Teori keuangan negara yang dikemukakan oleh Bahl (1978), Musgrave (1993), Dumairy (1996), Suparmoko (1997), Halim (2001), Bratakusumah (2002); Teori Ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh Simanjuntak (1985), Dumairy (1996), Soeroto (1986), Jhingan (2000), Ricardo (2000), Widodo (2000); Teori Kesejahteraan yang dikemukakan oleh Boulding (2005), Samuelson (2005), Sen (2005), Albert *and* Hahnel (2003); serta hasil penelitian empiris tentang perubahan struktur ekonomi oleh Chenery-Syrquin (1975); Zadjuli (1985); Yantu (1991); Rozenov (1998); Sulistyaningsih (1997); Udjiyanto (1999); Zagler (2000); Mulyadi (2004); Cahyono (2004). Penelitian empiris tentang keuangan negara oleh Mansfield (1972); Bahl (1978); Prest (1978); Wirasasmita (1982); Nersiwad (1997); Rahmadi (1999). Penelitian empiris tentang penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan oleh Harimi (1997); Rochaida (2005); Darussalam (2005); Rahma (2006); Soegiarto (2007); Priyagus (2007).

2. Temuan empiris menyatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi pergeseran yang meloncat dari sektor primer ke sektor tersier. Temuan empiris lainnya menyatakan bahwa sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja, kecuali sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan. Sektor primer, sekunder dan tersier berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi.
3. Temuan teoritis tentang perubahan struktur ekonomi memperkuat teori Chenery dan Syrquin (1975) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi tercermin dari perubahan peranan sektor ekonomi terhadap produk nasional bruto (PDB) dan besarnya persentase tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor ekonomi.

4. Temuan empiris tentang perubahan struktur ekonomi memperkuat temuan pendapat Zadjuli, menyebutkan bahwa di Jawa Timur terjadi pergeseran struktur yang meloncat, tidak berurutan dari sektor primer ke sekunder dan tersier, tetapi dari sektor primer ke sektor tersier.
5. Temuan teoritis tentang keuangan negara memperkuat teori kapasitas pajak (*tax capacity*) oleh Bahl, menyatakan bahwa sektor ekonomi merupakan determinan terhadap kapasitas pajak, dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah, kecuali sektor pertanian bukan merupakan basis pajak, serta sektor pertambangan dan penggalan, berperan terhadap penerimaan negara bukan pajak.
6. Temuan empiris tentang keuangan negara memperkuat temuan Nersiwad, menyebutkan bahwa kontribusi sektor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pajak di Indonesia, sedangkan temuan Wirasasmita, menyebutkan bahwa elastisitas perpajakan di Indonesia relatif masih rendah.
7. Temuan empiris tentang keuangan negara memperkuat pendapat Wahab, bahwa sumber pendapatan asli daerah yang signifikan terhadap penguatan keuangan daerah tergantung pada pendapatan dan perekonomian setempat yang langsung dipengaruhi perekonomian nasional.
8. Temuan teoritis tentang ketenagakerjaan memperkuat teori dua sektor dari Lewis dan Ranis-Fei, mengatakan bahwa negara sedang berkembang terdapat dua sektor yang berbeda yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena semakin membesarnya sektor industri bahkan disertai dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

9. Temuan empiris tentang ketenagakerjaan memperkuat pendapat Kuznet, bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sekaligus menunjukkan terjadinya perpindahan tenaga kerja.
10. Temuan empiris tentang ketenagakerjaan memperkuat temuan Sulistyaningsih dan Rochaida. Temuan Sulistyaningsih menyebutkan bahwa perubahan struktur ekonomi telah mendorong penciptaan kesempatan kerja terutama sektor manufaktur yang menerima perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian, namun perpindahannya agak lambat karena memerlukan pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan temuan Rochaida, menyebutkan bahwa perbedaan tingkat pembangunan antar daerah akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja daerah, bila pembangunan meningkat dan disparitas rendah maka penyerapan tenaga kerja daerah akan meningkat pula.
11. Temuan teoritis tentang kesejahteraan sosial ekonomi menolak teori Malthus, menyebutkan bahwa kesejahteraan dapat terjadi bila ada peningkatan permintaan efektif dan permintaan efektif tersebut akan meningkatkan kesejahteraan, artinya permintaan efektif dapat terealisasi bila ada pendapatan, meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan efektif barang dan jasa yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan.
12. Temuan empiris tentang kesejahteraan sosial ekonomi memperkuat pendapat Sumodiningrat, menyebutkan bahwa kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan.
13. Temuan empiris tentang kesejahteraan sosial ekonomi berbeda dengan temuan Harmini, menyebutkan bahwa semakin bersifat industrial struktur ekonomi suatu daerah maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin meningkat.

14. Temuan empiris tentang kesejahteraan sosial ekonomi tidak berbeda dengan temuan Rochaida, Darussalam dan Priyagus, menyebutkan bahwa disparitas pembangunan daerah, pembentukan nilai tambah (*added value*) dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

6.8. Keterbatasan Studi

Meskipun studi ini sudah menjawab semua rumusan masalah yang telah diajukan, namun masih terdapat beberapa fenomena yang belum dapat diungkapkan, sehingga menjadi keterbatasan studi ini, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam studi ini antara lain:

1. Studi ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* dan *cross section* atau *pooling data*. Model penelitian ini dapat menggambarkan pergeseran data antar variabel, baik peningkatan maupun penurunannya, juga menggambarkan pergeseran variasi data variabel berdasarkan daerah Kabupaten/Kota. Namun penelitian ini belum dapat mengungkapkan fenomena suatu daerah secara spesifik sehingga disarankan untuk menggunakan model yang lebih komprehensif. Keterbatasan lainnya dalam studi ini adalah tidak menggunakan data *time-lag*.
2. Studi ini menggunakan variabel perubahan struktur ekonomi terdiri dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Ketiga sektor tersebut merupakan penggabungan dari beberapa sektor ekonomi, sehingga kesulitan menjelaskan secara terperinci dari masing-masing sektor ekonomi tersebut.
3. Studi ini menggunakan variabel kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), meliputi pendapatan per kapita dan usia harapan hidup serta angka melek huruf, ukuran

variabel ini masih relatif terbatas bila dibandingkan dengan indikator kesejahteraan rakyat (INKESRA), sehingga belum dapat disimpulkan secara umum terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB 7

PENUTUP

B A B 7**PENUTUP****7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan studi, baik yang telah dibuktikan secara kuantitatif maupun kualitatif maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer, akan berakibat menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan dan bersifat positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa hubungan kausal antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap pendapatan asli daerah (PAD) bersifat kompleks dan masih terbuka peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut.
3. Perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD), semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Secara teoritis temuan ini

mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), semakin besar perubahan sektor primer akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).

5. Perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa hubungan kausal antara perubahan struktur ekonomi sektor sekunder terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) bersifat kompleks dan masih terbuka peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut.
6. Perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat menurunkan penyerapan tenaga kerja (PTK).
7. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan variabel yang berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (PTK).
8. Perubahan struktur ekonomi sektor primer berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial

ekonomi (KSE), namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor primer akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

9. Perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor sekunder merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor sekunder akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).
10. Perubahan struktur ekonomi sektor tersier berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa perubahan struktur ekonomi sektor tersier merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), namun semakin besar perubahan struktur ekonomi sektor tersier akan berakibat menurunkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).
11. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).
12. Penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Secara teoritis temuan ini mengandung makna bahwa penyerapan tenaga kerja (PTK) merupakan variabel yang berperan penting terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Semakin

besar penyerapan tenaga kerja (PTK) akan berakibat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

13. Studi yang menjelaskan pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan teori rasio pajak (*tax ratio*) yang dikemukakan oleh Bahl. Teori ini menjelaskan bahwa struktur ekonomi merupakan variabel yang berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian teori perubahan struktur ekonomi (*structure change*) oleh Chenery and Syrquin, mengemukakan bahwa perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi sektor ekonomi serta diikuti perubahan penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya teori kesejahteraan sosial ekonomi (*socio-economic welfare*) yang digunakan dalam studi ini menjelaskan keterkaitan antara perubahan struktur ekonomi dengan kesejahteraan sosial ekonomi dengan indikator sosial yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Mutu Hidup. Sehingga studi ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, baik yang bersifat mendukung dan memperkuat teori maupun yang berbeda dengan teori yang telah ada.

14. Kebijakan yang dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan nilai tambah (*added value*) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui peningkatan investasi dan peningkatan kegiatan industrialisasi, dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur ekonomi yang terdapat pada masing-masing Kabupaten/Kota. Kebijakan ini, diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan

daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta perbaikan infrastruktur.

15. Berdasarkan kedua belas kesimpulan tersebut, maka secara simultan dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), sedangkan Perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Selanjutnya Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Perubahan struktur ekonomi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), dan penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).

7.2. Saran

1. Studi ini menemukan bahwa sektor primer mempunyai pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itu disarankan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan melakukan investasi yang produktif (*Direct Productivity Activity*), sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik regional bruto sektor ekonomi,

- mengingat sektor ekonomi sebagai dasar dalam penghitungan pendapatan asli daerah serta turut mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.
2. Studi ini menemukan bahwa perubahan struktur ekonomi mempunyai pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi, oleh karena itu disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, ketrampilan atau keahlian sehingga dapat mengisi formasi pekerjaan yang berkarakteristik teknologi tinggi (*high technology*) seperti pada sektor pertambangan dan penggalan serta sektor industri pengolahan minyak dan gas.
 3. Rendahnya pendapatan per kapita sebagai akibat besarnya pendapatan faktor yang keluar, maka disarankan untuk memberikan kesempatan kepada investor lokal dan tenaga kerja lokal terlibat dalam sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga dapat mengurangi pendapatan faktor yang keluar.
 4. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambah variabel serta jumlah tahun, sehingga dapat menjelaskan dan menghasilkan studi yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. 1998. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Jasa Publik : Tinjauan Aspek Ekonomi Regional Atas Pendapatan Asli Daerah. Makalah Diskusi Panel : Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Abad XXI*. Bandung : Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad (17 Januari 1998).
- Ananta, Aris. 1986. *Modal Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Pusat Antar Universitas dan Lembaga Demografi FE-UI.
- , 1988. *Perencanaan Makro Ketenagakerjaan*. Jakarta : Pusat Antar Universitas dan Lembaga Demografi FE-UI.
- , 1992. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Anwar, Moh. Arsyad. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Ardani. 1992. *Analysis of Regional Growth and Disparity The Impact Analysis of The Inpres Project on Indonesia Development*. Ph.D. Disertasi in City and regional Planning. University of Pennsylvania.
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Penerbit UI-Press.
- , 1998. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : CIDES.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua, Yogyakarta : STIE YKPN.
- , 1999a. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- , 1999b. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPF.
- Azis, Iwan Jaya. 1993. *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Penerbit FEUI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2006a. *Kalimantan Timur Dalam Angka 2006*.
- , 2006b. *Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur menurut lapangan usaha 2000-2005*.
- , 2006c. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur 2000-2005*.
- , 2006d. *Laporan Perekonomian Kalimantan Timur 2005*.
- , 2006e. *Keadaan Angkatan Kerja Kalimantan Timur 2005*.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Laporan Perekonomian Indonesia 2003*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik-BAPPENAS-UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004*. Jakarta:BPS.
- Bappeda dan BPS. 2005. *Perhitungan dan Penyusunan ICOR Kalimantan Timur 2000-2004*.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur. *Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2004*.
- Bahl, Roy W. 1978. A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. Dalam *IMF Staf Papers. Vol. XVIII. No.3 November 1978*. Washington.
- Basri, Faisal. 1995. *Tinjauan Sekilas Mengenai Ekonomi Politik Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia Dalam Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*. Jakarta : Erlangga.
- Bird, Richard M. 1978. Assessing Tax Performance in Developing Countries A Critical Review of The Literature. Dalam J.F.J. Toye (ed). "*Taxation And Economic Development*". London: Frank Cass & Co.Ltd.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiharsono, Sugeng. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori Model Perencanaan dan Penerapannya*. Bogor : Penerbit IPB.
- Cahyono, Sutri. 2004. *Analisis Mengenai Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan Timur*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Chenery H.B. and Syrquin. 1975. *Patterns of Development 1950 – 1970*. London : Oxford University Press. .
- Cooper, Donald R. and Wiliam Emory. 1995. *Business Research Methods*. Fifth Edition (Terjemahan Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan). Homewood, IL: Richard D. Irwin. Inc.
- Darussalam, Wan. 2005. *Pengaruh Peruntukan Lahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Sektorial serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pulau Batam*. Disertasi. Surabaya : Progam Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Davey, K.J. 1988. (Penerjemah Amanullah). *Pembiayaan Pemerintah Daerah. Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : Penerbit UI-Press.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum*. Jakarta : Penerbit UI-Press.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Djumiati, 1996. *Analisis Kesempatan Kerja dan Efisiensi Penggunaan Tenaga Kerja*. Disertasi . Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Firman, Tommy. 1985. *Perspektif Neo-Klasik, Depedensi dan Humanitarian Dalam Teori-Teori Pembangunan, Keterbelakangan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Fitriadi. 1999. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Pajak (Tax Capacity) dan Usaha Pajak (Tax Effort) Daerah Tingkat II di Provinsi*

- Kalimantan Timur*. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Bandung:Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang:BP UNDIP.
- , 2005. *Model Persamaan Struktural*. Semarang : BP UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa. Sumarno Zain. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gwartney, D.James. Richard L.Stroup. Russel S.Sobel. David A.Macpherson. 2003. *Economics:Private and Public Choice*. USA:South-Western. Thomson Learning.
- Haidy A. H Pasay dan Salman Taufik. 1990. *Prospek Ekonomi Indonesia 1990-1991 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit EKONISIA.
- Halim, Abdul. 2001. Penyunting. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Harmini. 1997. *Hubungan Struktur Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Harry W. Richardson. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional Pertengahan*. Paul Sihotang, Jakarta : LPFE V.I.
- Hirawan, Susiyati B., 1992. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Dalam M. Arsyad Anwar (editor). “*Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*”. Kerjasama FE-UI – Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP FEUI
- Kartasmita, Ginandjar. 1986, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Kerlinger, F.N. 1986. *Foundations of Behaviour Research*. 3th Edition. New York USA:Holt, Reinhart and Winston.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Cetakan I. Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE UNIBRAW).
- Krugman, Paul and Obstfeld. 1991. *Ekonomi Internasional:Teori dan Kebijakan*. Buku Pertama:Perdagangan. Jakarta : Radjawali Press.
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi Ke-3. UI-Jakarta : Press.

- Kuznets, Simon. 1993. *Modern Economics Growth : Structure and Spread*. Yale University Press.
- Leibenstein, H. 1976. *History of Economic Theory*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Luthfi Muta'ali 1997. *Masalah dan Prospek perekonomian Indonesia Menuju Persaingan Bebas*. Paper Seminar Nasional HIMASEPA UPN Veteran Yogyakarta. 11 September.
- Machmud, Amir. 1996. *Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Daerah Tk I di Indonesia Pada Periode 1979-1993*. Tesis. Bandung : PPS-Universitas Padjadjaran.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Cetakan Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Manfield, Charles Y., 1972. Elasticity and Bouyancy of a Tax System: A Method Applied to Paraguay. Dalam *IMF Staff Papers*. Vol. XIX. No.2. July.
- Mulyadi, Hadi. 2004. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur*. Tesis. Makassar:Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Musgrave, Richard A. & Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nafziger, E. Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*. Third Edition. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nersiwad. 1997. *Analisis Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Di Indonesia*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Bandung:Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Prest, A.R. 1978. *The Taxable Capacity of a Country*, Dalam J.F.J. Toye (ed). *Taxation and Economic Development*. London : Frank-Cass & Co. Ltd.
- Priyagus. 2007. *Pengaruh Investasi Swasta dan Tenaga kerja serta Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Rahmadi, Selamat. 1999. *Pengaruh Perbedaan Elastisitas Penerimaan Dan Elastisitas Pengeluaran Pembangunan Terhadap Ketergantungan Bantuan Pembangunan Pusat (Studi Kasus Daerah Tingkat I Jambi Periode 1980-1995)*. Tesis. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Rahma, Hania. 2006. Pengembangan Ekonomi Lokal, Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, Volume 1 No. 3*. MPKP FE UI. Jakarta. Hal.1-3.
- Rochaida, Eny. 2005. *Pengaruh Disparitas Pembangunan Daerah Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Daerah Kalimantan Timur*. Disertasi. Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

- Rosyidi, Suherman. 1989. *Redistribusi Pendapatan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Rozenov, Rossen. 1998. *Input-Output Tables in The Analysis of Structural Change : The Case of Bulgaria*. Center for Economic Reform and Transformation. Departement of Economics. Herriot-Watt University. Riccarton. Edinburgh : <http://www.hw.ac.uk/ecoWWW/cert/certhp.htm>
- Salvatore, Dominick. 1997. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta:Erlangga.
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sarwedi. 2001. *Implikasi Pergeseran Struktur Ekonomi Pada Perubahan Penawaran Barang Ekspor Indonesia*. Disertasi. Surabaya:Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Simanjutak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Lembaga Penerbit FE-UI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia
- Sisdjiatmo, Kusumowidho. 1981. *Angkatan Kerja, Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Soegiarto, Eddy. 2007. *Pengaruh Kinerja Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Kota Samarinda*. Disertasi. Surabaya:Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis Shift-Share Perkembangan Dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. No.1 Tahun VII 1993. hal.27-31.
- Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Solimun. 2004. *Pengukuran Variabel dan Pemodelan Statistika Aplikasi SEM-AMOS dan WaSo*. Malang : Fakultas MIPA dan Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- , 2005. *Structural Equation Modeling (SEM) Aplikasi software AMOS*. Malang : Fakultas MIPA dan Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Sulistyaningsih, Endang. 1997. *Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 1980-1993*. Disertasi. Bogor:Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko. 1996. *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE UGM.
- , 1997. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Supranto, J. 1981. *Metode Ramalan Kuantatif Untuk Perencanaan*. Jakarta : Gramedia.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat.

- Susanti, Hera. 1995. *Indikator Makro Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susetyo, Didik. 1998. *Analisis Kapasitas Pajak (Tax Capacity) Dan Usaha Pajak (Tax Effort) Daerah Tk II di Sumatera Selatan*. Tesis. Bandung : PPS-Universitas Padjadjaran.
- Swasono, Sri Edi. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Perkumpulan PraKarsa.
- Tambunan, Tulus. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia.
- , 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta : Salemba Empat.
- Thomas, Vinod. Mansoor Dailami. Ashok Dharieswar. Daniel Kaufmann. Nalin Kishor. Ramon Lopez dan Yan Wang. 2000. *Sustaining Natural Capital*. World Bank Report. New York : Oxford Univesity Press..
- Todaro, M.P., dan Stephen C. Smith. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid I, Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- Udjianto, Didit Welly. 1999. *Pembangunan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan antar Daerah Tk II di Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta (1975-1995)*. Disertasi. Bandung:PPS-Universitas Padjadjaran.
- Wahab, Solichin Abdul., Fadillah Putra., Saiful Arif. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah. Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. Penerbit SIC.
- Widodo, Hg Suseno Tryanto. 2000. *Indikator Ekonomi:Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Wilford, D. Sykes dan W.T. Wilford. 1978. *Estimates of Revenue Elasticity and Bouyancy in Central America, 1955-1974*. Dalam J.F.J. Toye (ed). *Taxation and Economic Development*. London : Frank-Cass & Co. Ltd.
- Wirasmita, Yuyun. 1982. *Elasticity of a Tax System : A Model Applied to Indonesia For the Period 1974/1975 – 1979/1980*. Dalam *Universitas Padjadjaran Pemberitaan* No.13 Agustus.
- Yantu, Marwan. 1991. *Transformasi Struktur Ekonomi Wilayah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara*. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Zadjuli, Suroso Imam. 1986. *Pola Pembangunan Berimbang Dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Zagler, Martin. 2000. *Economic Growth, structural Change and Search Unemployment*. European University Institute. San Domenico di Fiesole (FI). Italy. <http://www.wu-wien.ac.at/vwl/zagler/>. 5 April 2000.
- Zweimuller, Josef. 2002. *Structural Change ang The Kaldor Fact of Economic Growth*. *IZA Discussion Paper No. 472*. IEW. University of Zurich. Email: <http://www.zweim@iew.unizh>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Fitriadi,S.E., M.Si
NIM : 090114491 D
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Alamat/No.Telpon : Jl. Pramuka Perum P&K B.17 Samarinda
0541 – 765519 dan 0811588717

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 23 Juli 2008

nembuat pernyataan



Fitriadi,S.E., M.Si
NIM. 090114491 D

LAMPIRAN 2

PETA TEORI

Lampiran 2.1.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
1.	Chenery H.B. and Syrquin. Oxford University Press. 1975	Patterns of Development 1950 – 1970.			Hasil studi tentang pertumbuhan ekonomi antar negara, terlihat bahwa pola pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang diteliti, yaitu <i>pertama</i> , kebutuhan akan modal fisik dan modal manusia; <i>kedua</i> , perubahan yang sama dalam permintaan konsumen dalam permintaan akibat meningkatnya pendapatan; <i>ketiga</i> , akses dari semua negara teknologi yang sama; <i>keempat</i> , akses terhadap perdagangan internasional atau luar daerah; dan <i>kelima</i> , peningkatan spesialisasi.
2.	Suroso Imam Zadjuli Disertasi PPS Universitas Airlangga Surabaya 1985	Pola Pembangunan Berimbang Dalam Struktur Ekonomi Daerah JawaTimur	Pertumbuhan ekonomi sektoral	Analisis Shift Share, Location Qoutient	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sektor industri di Jawa Timur merupakan sektor yang menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap industri secara nasional. Kemudian terjadi pergeseran struktur yang meloncat, tidak berurutan dari sektor primer ke sekunder dan tersier.

dilanjutkan

Lampiran 2.2.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
3.	Marwan Yantu Tesis.PPS Institut Pertanian Bogor. 1991	Transformasi Struktur Ekonomi Wilayah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara.	Struktur Ekonomi Sektoral		Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Sulawesi Utara. Dengan terjadi perubahan struktur ekonomi, maka terjadi perubahan dalam efek pengganda dari 22 subsektor, sebagian memberikan dampak kenaikan dan sebagian menurun.

dilanjutkan

Lampiran 2.3.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
4.	Rossen Rozenov Center for Economic Reform and Transformation. Departement of Economics. Herriot-Watt University. Riccarton. Edinburgh : http://www.hw.ac.uk/ecoWW/cert/certhp.htm 1998	Input-Output Tables in The Analysis of Structural Change : The Case of Bulgaria.			Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa ekonomi Bulgaria telah mengalami sejumlah perubahan struktural, pada umumnya disebabkan reorientasi perdagangan luar negeri sebagai komposisi dari permintaan domestik.
5.	Didit Welly Udjianto Disertasi PPS-Universitas Padjadjaran Bandung 1999	Pembangunan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan antar Daerah Tk II di Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta (1975-1995).	Pendapatan per kapita	Regresi Koefisien Williamson	Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan struktural telah merubah pola komposisi PDRB di Jawa Tengah, dari daerah agraris menjadi daerah semi industri. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya sebagai daerah agraris menjadi daerah yang didominasi sektor jasa.

dilanjutkan

Lampiran 2.4.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
6.	Martin Zagler European University Institute. San Domenico di Fiesole (FI). Italy. http://www.wu-wien.ac.at/vwl/zagler/ . 5 April 2000.	Economic Growth, structural Change and Search Unemployment.			Pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dan kontribusi yang tetap dari pekerja, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara orang yang bekerja pada sektor jasa.
7.	Josef Zweimuller Discussion Paper No. 472. IEW. University of Zurich. Email: http://www.zweim@iew.unizh 2002.	Structural Change ang The Kaldor Fact of Economic Growth.			Dalam jangka panjang terdapat perubahan mengenai struktur produksi dan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi model Kaldor. Perubahan struktural sesuai dengan realokasi dari tenaga kerja yang disebabkan perbedaan elastisitas pendapatan antar sektor dan interaksi sektoral
8.	Sutri Cahyono Tesis PPS Universitas Hasanuddin Makassar.	Analisis Mengenai Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan Timur.		Shift Share Location Qoutien	Perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2 persen per tahun. Penyerapan tenaga kerja telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier, meski sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja.

dilanjutkan

Lampiran 2.5.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
9.	Roy W. Bahl IMF Staf Papers. Vol. XVIII. No.3 November 1978. Washington.	A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis	Pendapatan per kapita, sektor pertanian, sektor perdagangan	Regresi	Determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak antara lain pendapatan per kapita serta sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan dan perdagangan. determinan dari sektor pertanian dan pertambangan adalah signifikan.
10.	A.R. A.R. Prest Dalam J.F.J. Toye (ed). Taxation and Economic Development. London : Frank-Cass & Co. Ltd. 1978	The Taxable Capacity of a Country.	Pendapatan per kapita, sektor pertanian, sektor perdagangan	Regresi	Hasil analisisnya menempatkan, Brasil kedalam kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak tinggi; sedangkan, Sudan kedalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi, kemudian Trinidad dengan kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak rendah, dan Pakistan memiliki kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak juga rendah.
11.	Yuyun Wirasmita Dalam Universitas Padjadjaran Pemberitaan No.13 Agustus. 1982.	Elasticity of a Tax System : A Model Applied to Indonesia For the Period 1974/1975 – 1979/1980	Tax Ratio	Regresi	Koefisien elastisitas perpajakan di Indonesia sebesar 1,06 persen. bahwa penerimaan dari struktur perpajakan di Indonesia relatif masih rendah

dilanjutkan

Lampiran 2.6.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
12.	Nersiwad dkk. Makalah. PPS Universitas Padjadjaran Bandung 1997.	Analisis Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Di Indonesia	Sektor pertanian, industri dan ekspor	Regresi	Variabel kontribusi sektor pertanian, industri dan rasio ekspor bersih terhadap PDB memperlihatkan pengaruh nyata terhadap rasio pajak, dengan terjadi peningkatan kapasitas pajak, secara rata-rata sebesar 7,84 persen pada periode 1974-1978, dan menjadi 11,59 persen pada periode 1989-1993. Kemudian analisis peringkat kapasitas pajak dan usaha pajak antardaerah dikelompokkan sebagai berikut, peringkat 5 tertinggi untuk kapasitas pajak antardaerah di Indonesia adalah : DKI Jaya, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Kalimantan Tengah, dan Bali. Sedangkan peringkat 5 tertinggi untuk usaha pajak adalah: Riau, Bali, DI Yogyakarta, Jambi dan Timor Timur.

dilanjutkan

..... lanjutan

Lampiran 2.7.**PETA TEORI**

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
13.	Endang Sulistyarningsih Disertasi. PPS Institut Pertanian Bogor. 1997	Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 1980-1993.	Inter-industri ekonomi	Model dekomposisi	Perubahan struktur ekonomi telah mendorong penciptaan kesempatan kerja terutama sektor manufaktur yang menerima perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian. Perpindahan ini agak lambat karena sektor ini memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
14.	Harmini Tesis PPS Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1997.	Hubungan Struktur Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.			Bahwa semakin bersifat industrial struktur ekonomi suatu Provinsi, maka tingkat kesejahteraannya cenderung semakin meningkat.

dilanjutkan

Lampiran 2.8.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
15.	Hadi Mulyadi Tesis. PPS Universitas Hasanuddin Makassar. 2004	Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur.	Pendapatan per kapita	Regresi Koefisien Williamson	Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, yang ditunjukkan dengan elastisitas perubahan struktural sektor sekunder sebesar 0,958 lebih besar dari elastisitas sektor primer 0,366. Elastisitas perubahan struktural telah merubah pola komposisi PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya sebagai daerah agraris (sektor primer), sekarang menjadi daerah semi industri dan jasa.
16.	Eny Rochaida Disertasi. PPS Unair. 2005	Pengaruh Disparitas Pembangunan Daerah Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Daerah Kalimantan Timur	Disparitas pembangunan daerah, Tenaga kerja Daerah, dan Kesejahteraan sosial Ekonomi	Structural Equation Modeling (SEM)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa disparitas pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap struktur penyerapan tenaga kerja daerah dan kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,625 dengan probabilitas $p=0,000$; kemudian nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas untuk kesejahteraan sosial ekonomi sebesar 0,214 dengan prob. 0,000.

dilanjutkan

Lampiran 2.9.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
17	Wan Darussalam Disertasi. PPS Unair. 2005	Pengaruh peruntukan lahan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah sektoral serta kesejahteraan sosial masyarakat pulau Batam	peruntukan lahan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan nilai tambah sektoral, kesejahteraan sosial	<i>Path analysis</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peruntukan lahan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembentukan nilai tambah sektoral serta kesejahteraan sosial masyarakat pulau Batam. Data yang digunakan adalah <i>pooling data</i>.</p> <p>Hasil studi menyimpulkan bahwa peruntukan lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembentukan nilai tambah. Penyerapan tenaga kerja sektoral berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan nilai tambah dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pembentukan nilai tambah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Batam.</p>

dilanjutkan

..... lanjutan

Lampiran 2.10.**PETA TEORI**

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
18	Hania Rahma Makalah. Jurnal Kebijakan Ekonomi. 2006	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia	Pengembang ekonomi lokal Pertumbuhan ekonomi Lapangan pekerjaan Kesejahteraan masyarakat		Tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah semakin tajam. Krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai startegi bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyataan dalam rangka meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dilanjutkan

..... lanjutan

Lampiran 2.11.**PETA TEORI**

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
19.	Eddy Soegiarto. Disertasi. PPS Univ.17 Agustus 1945 Surabaya	Pengaruh kinerja usaha terhadap tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil Kota Samarinda	kinerja usaha, tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil. Kesimpulan penelitian ini, secara garis besar semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur dan nilai probabilitas yang positif dan lebih kecil.

dilanjutkan

..... lanjutan

Lampiran 2.12.**PETA TEORI**

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
20.	Priyagus Disertasi. PPS Unair.2007	Pengaruh investasi swasta dan tenaga kerjaserta pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.	Investasi swasta, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan rakyat.	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menyebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah tenaga kerja dan pengeluaran pembangunan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi swasta berpengaruh tidak langsung, positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, serta pengeluaran pembangunan berpengaruh langsung, positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

dilanjutkan

..... lanjutan

Lampiran 2.13.

PETA TEORI

No.	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil Pembahasan
21.	Fitriadi Disertasi. PPS Unair.2008	Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur	Perubahan Struktur Ekonomi, PAD, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi.	<i>PLS Analysis</i>	<p>Perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).</p> <p>Perubahan struktur ekonomi sektor primer dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK), sedangkan Perubahan struktur ekonomi sektor sekunder berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Selanjutnya Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK). Perubahan struktur ekonomi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE). Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE), dan penyerapan tenaga kerja (PTK) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi (KSE).</p>

LAMPIRAN 3

DATA

Lampiran 3. Data

Tahun	Kab_Kota	x1	x2	x3	y1	y2.1	y2.2	y2.3	y3.1	y3.2	y3.3
2001	Pasir	1.93	0.71	0.96	0.98	4.81	4.35	4.47	1.09	1.81	1.96
2001	Kubar	1.86	1.11	1.17	0.42	4.7	3.73	3.91	0.96	1.82	1.97
2001	Kukar	1.96	0.55	0.65	1.21	4.95	4.55	4.74	1.2	1.82	1.97
2001	Kutim	1.95	0.43	0.87	0.47	4.6	4.13	3.95	1.51	1.82	1.97
2001	Berau	1.77	1.22	1.38	1.02	4.45	3.9	4.29	0.61	1.81	1.97
2001	Malinau	1.89	0.19	1.3	1.06	4.22	2.26	3.15	0.86	1.83	1.94
2001	Bulungan	1.66	1.44	1.42	1.34	4.36	3.52	3.98	0.4	1.83	1.97
2001	Nunukan	1.9	0.77	1.16	0.64	4.32	3.12	3.96	0.91	1.84	1.93
2001	Balikpap	0.42	1.78	1.57	1.57	3.91	4.58	5.06	1.14	1.85	1.99
2001	Samarind	0.79	1.56	1.76	1.48	4.25	4.86	5.1	1.04	1.84	1.98
2001	Tarakan	1.3	1.19	1.81	0.97	4.04	4.02	4.33	0.88	1.86	1.99
2001	Bontang	-0.58	1.99	0.31	0.99	3.53	4.23	4.2	2.41	1.85	1.99
2002	Pasir	1.93	0.7	0.97	1.39	4.79	4.19	4.53	1.09	1.81	1.95
2002	Kubar	1.86	1.11	1.15	0.76	4.63	3.87	4.15	1	1.83	1.97
2002	Kukar	1.96	0.61	0.66	1.18	4.87	4.61	4.78	1.21	1.82	1.98
2002	Kutim	1.95	0.62	0.88	0.76	4.61	4.09	3.99	1.56	1.82	1.98
2002	Berau	1.78	1.21	1.38	1.31	4.52	3.86	4.27	0.56	1.81	1.97
2002	Malinau	1.88	0.64	1.31	1.05	4.21	2.49	3.07	0.87	1.83	1.96
2002	Bulungan	1.67	1.43	1.43	1.27	4.35	3.64	4.03	0.96	1.83	1.97
2002	Nunukan	1.89	0.82	1.18	1.07	4.39	3.27	3.91	0.94	1.85	1.97
2002	Balikpap	0.43	1.77	1.59	1.69	3.61	4.61	5.04	1.14	1.85	1.98
2002	Samarind	0.84	1.54	1.77	1.66	4.19	4.84	5.11	1.08	1.84	1.99
2002	Tarakan	1.25	1.22	1.82	1.12	4.09	4.05	4.3	0.9	1.85	1.99
2002	Bontang	-0.6	1.99	0.35	1.06	3.31	4.21	4.26	2.38	1.84	1.99
2003	Pasir	1.93	0.7	0.97	1.54	4.83	4.25	4.58	1.1	1.85	1.96
2003	Kubar	1.86	1.14	1.16	1.41	4.65	3.66	4.29	1.03	1.84	1.96
2003	Kukar	1.96	0.65	0.69	1.53	4.9	4.64	4.78	1.72	1.82	1.97

dilanjutkan

lanjutan

Tahun	Kab_Kota	x1	x2	x3	y1	y2.1	y2.2	y2.3	y3.1	y3.2	y3.3
2003	Kutim	1.95	0.56	0.9	0.8	4.68	4.01	3.98	1.53	1.83	1.95
2003	Berau	1.78	1.2	1.37	1.35	4.46	4.09	4.26	0.62	1.84	1.98
2003	Malinau	1.84	0.92	1.36	1.47	4.25	2.59	3.44	0.84	1.83	1.96
2003	Bulungan	1.65	1.42	1.45	1.32	4.53	3.43	3.76	0.95	1.86	1.95
2003	Nunukan	1.89	0.91	1.16	1.2	4.34	3.58	4.22	0.95	1.84	1.96
2003	Balikpap	0.46	1.74	1.62	1.78	4.13	4.61	5.02	1.15	1.85	1.99
2003	Samarind	0.89	1.52	1.77	1.74	4.34	4.82	5.12	1.11	1.84	1.99
2003	Tarakan	1.24	1.22	1.82	1.2	4.19	4.1	4.33	0.93	1.85	1.99
2003	Bontang	-0.57	1.99	0.37	1.21	3.51	4.16	4.37	2.34	1.85	2
2004	Pasir	1.93	0.7	0.97	1.45	4.53	4.03	4.37	1.12	1.85	1.96
2004	Kubar	1.85	1.16	1.19	1.28	4.6	3.51	4.13	1.05	1.84	1.95
2004	Kukar	1.95	0.7	0.71	1.42	4.86	4.69	4.76	1.77	1.82	1.98
2004	Kutim	1.95	0.47	0.85	1.27	4.55	4.18	4.12	1.61	1.83	1.97
2004	Berau	1.78	1.2	1.38	1.37	4.37	4.04	4.33	1.18	1.84	1.96
2004	Malinau	1.8	1.1	1.39	0.92	4.17	3.06	3.6	0.83	1.83	1.96
2004	Bulungan	1.65	1.43	1.46	1.25	4.35	3.65	4.04	0.96	1.86	1.97
2004	Nunukan	1.89	0.89	1.17	1.21	4.32	3.52	4.1	0.97	1.85	1.97
2004	Balikpap	0.46	1.75	1.61	1.83	3.85	4.61	5.06	1.17	1.85	1.99
2004	Samarind	0.9	1.51	1.77	1.73	4.22	4.81	5.16	1.14	1.84	1.98
2004	Tarakan	1.2	1.25	1.82	1.23	4.14	4.08	4.47	0.94	1.85	1.99
2004	Bontang	-0.54	1.99	0.4	1.24	3.45	4.16	4.31	2.33	1.85	1.99
2005	Pasir	1.93	0.69	0.96	1.42	4.55	4.01	4.31	1.14	1.86	1.97
2005	Kubar	1.84	1.18	1.18	0.99	4.64	3.74	4.23	1.09	1.84	1.96
2005	Kukar	1.95	0.74	0.72	1.63	4.93	4.63	4.78	1.84	1.83	1.97
2005	Kutim	1.96	0.39	0.82	1.32	4.7	4.01	4.09	1.68	1.83	1.97
2005	Berau	1.79	1.19	1.37	1.44	4.46	3.88	4.3	1.18	1.84	1.98
2005	Malinau	1.76	1.22	1.41	1.09	4.15	3.07	3.61	0.83	1.83	1.96
2005	Bulungan	1.63	1.44	1.47	1.36	4.42	3.49	3.93	0.97	1.86	1.96

dilanjutkan

Lanjutan

Tahun	Kab_Kota	x1	x2	x3	y1	y2.1	y2.2	y2.3	y3.1	y3.2	y3.3
2005	Nunukan	1.89	0.86	1.18	1.22	4.36	3.35	4.21	1	1.85	1.95
2005	Balikpap	0.43	1.74	1.62	1.85	3.97	4.61	5.05	1.18	1.85	1.98
2005	Samarind	0.89	1.5	1.78	1.85	4.23	4.79	5.15	1.15	1.85	1.98
2005	Tarakan	1.18	1.25	1.83	1.43	4.1	4.18	4.55	0.96	1.85	1.98
2005	Bontang	-0.51	1.99	0.4	1.34	3.54	4.15	4.34	2.32	1.86	1.99

Keterangan :

x1 = Perkembangan Struktur Sektor Primer**x2** = Perkembangan Struktur Sektor Sekunder**x3** = Perkembangan Struktur Sektor Tersier**y1** = Pendapatan Asli Daerah**y2.1** = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer**y2.2** = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder**y2.3** = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier**y3.1** = Pendapatan Perkapita**y3.2** = Usia Harapan Hidup**y3.3** = Angka Melek Huruf

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

Lampiran 4. Hasil Analisis Deskriptif

Perkembangan Struktur Sektor Primer * Kabupaten/Kota
Perkembangan Struktur Sektor Primer

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	.42	.46	.4400	.01871
Berau	5	1.77	1.79	1.7800	.00707
Bontang	5	-.60	-.51	-.5600	.03536
Bulungan	5	1.63	1.67	1.6520	.01483
Kubar	5	1.84	1.86	1.8540	.00894
Kukar	5	1.95	1.96	1.9560	.00548
Kutim	5	1.95	1.96	1.9520	.00447
Malinau	5	1.76	1.89	1.8340	.05459
Nunukan	5	1.89	1.90	1.8920	.00447
Pasir	5	1.93	1.93	1.9300	.00000
Samarind	5	.79	.90	.8620	.04658
Tarakan	5	1.18	1.30	1.2340	.04669
Total	60	-.60	1.96	1.4022	.76062

Perkembangan Struktur Sektor Primer * Tahun
Perkembangan Struktur Sektor Primer

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	-.58	1.96	1.4042	.80147
2002	12	-.60	1.96	1.4033	.80189
2003	12	-.57	1.96	1.4067	.78618
2004	12	-.54	1.95	1.4017	.77651
2005	12	-.51	1.96	1.3950	.77239
Total	60	-.60	1.96	1.4022	.76062

Perkembangan Struktur Sektor Sekunder * Kabupaten/Kota
Perkembangan Struktur Sektor Sekunder

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.74	1.78	1.7560	.01817
Berau	5	1.19	1.22	1.2040	.01140
Bontang	5	1.99	1.99	1.9900	.00000
Bulungan	5	1.42	1.44	1.4320	.00837
Kubar	5	1.11	1.18	1.1400	.03082
Kukar	5	.55	.74	.6500	.07450
Kutim	5	.39	.62	.4940	.09450
Malinau	5	.19	1.22	.8140	.41156
Nunukan	5	.77	.91	.8500	.05612
Pasir	5	.69	.71	.7000	.00707
Samarind	5	1.50	1.56	1.5260	.02408
Tarakan	5	1.19	1.25	1.2260	.02510
Total	60	.19	1.99	1.1485	.46396

Perkembangan Struktur Sektor Sekunder * Tahun
Perkembangan Struktur Sektor Sekunder

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	.19	1.99	1.0783	.55915
2002	12	.61	1.99	1.1383	.47415
2003	12	.56	1.99	1.1642	.44514
2004	12	.47	1.99	1.1792	.44858
2005	12	.39	1.99	1.1825	.45790
Total	60	.19	1.99	1.1485	.46396

Perkembangan Struktur Sektor Tersier * Kabupaten/Kota
Perkembangan Struktur Sektor Tersier

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.57	1.62	1.6020	.02168
Berau	5	1.37	1.38	1.3760	.00548
Bontang	5	.31	.40	.3660	.03782
Bulungan	5	1.42	1.47	1.4460	.02074
Kubar	5	1.15	1.19	1.1700	.01581
Kukar	5	.65	.72	.6860	.03050
Kutim	5	.82	.90	.8640	.03050
Malinau	5	1.30	1.41	1.3540	.04827
Nunukan	5	1.16	1.18	1.1700	.01000
Pasir	5	.96	.97	.9660	.00548
Samarind	5	1.76	1.78	1.7700	.00707
Tarakan	5	1.81	1.83	1.8200	.00707
Total	60	.31	1.83	1.2158	.42366

Perkembangan Struktur Sektor Tersier * Tahun
Perkembangan Struktur Sektor Tersier

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	.31	1.81	1.1967	.44486
2002	12	.35	1.82	1.2075	.44009
2003	12	.37	1.82	1.2200	.43620
2004	12	.40	1.82	1.2267	.43290
2005	12	.40	1.83	1.2283	.43892
Total	60	.31	1.83	1.2158	.42366

Pendapatan Asli Daerah * Kabupaten/Kota
Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.57	1.85	1.7440	.11524
Berau	5	1.02	1.44	1.2980	.16239
Bontang	5	.99	1.34	1.1680	.14132
Bulungan	5	1.25	1.36	1.3080	.04658
Kubar	5	.42	1.41	.9720	.39896
Kukar	5	1.18	1.63	1.3940	.19655
Kutim	5	.47	1.32	.9240	.36226
Malinau	5	.92	1.47	1.1180	.20729
Nunukan	5	.64	1.22	1.0680	.24692
Pasir	5	.98	1.54	1.3560	.21755
Samarind	5	1.48	1.85	1.6920	.13664
Tarakan	5	.97	1.43	1.1900	.16778
Total	60	.42	1.85	1.2693	.31731

Pendapatan Asli Daerah * Tahun
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	.42	1.57	1.0125	.36499
2002	12	.76	1.69	1.1933	.29500
2003	12	.80	1.78	1.3792	.26651
2004	12	.92	1.83	1.3500	.24166
2005	12	.99	1.85	1.4117	.26412
Total	60	.42	1.85	1.2693	.31731

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer * Kabupaten/Kota
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	3.61	4.13	3.8940	.18995
Berau	5	4.37	4.52	4.4520	.05357
Bontang	5	3.31	3.54	3.4680	.09497
Bulungan	5	4.35	4.53	4.4020	.07727
Kubar	5	4.60	4.70	4.6440	.03647
Kukar	5	4.86	4.95	4.9020	.03834
Kutim	5	4.55	4.70	4.6280	.06140
Malinau	5	4.15	4.25	4.2000	.04000
Nunukan	5	4.32	4.39	4.3460	.02966
Pasir	5	4.53	4.83	4.7020	.14873
Samarind	5	4.19	4.34	4.2460	.05683
Tarakan	5	4.04	4.19	4.1120	.05630
Total	60	3.31	4.95	4.3330	.38522

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer * Tahun
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Primer

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	3.53	4.95	4.3450	.39958
2002	12	3.31	4.87	4.2975	.46215
2003	12	3.51	4.90	4.4008	.37357
2004	12	3.45	4.86	4.2842	.36899
2005	12	3.54	4.93	4.3375	.37119
Total	60	3.31	4.95	4.3330	.38522

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder * Kabupaten/Kota
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	4.58	4.61	4.6040	.01342
Berau	5	3.86	4.09	3.9540	.10383
Bontang	5	4.15	4.23	4.1820	.03564
Bulungan	5	3.43	3.65	3.5460	.09607
Kubar	5	3.51	3.87	3.7020	.13142
Kukar	5	4.55	4.69	4.6240	.05079
Kutim	5	4.01	4.18	4.0840	.07470
Malinau	5	2.26	3.07	2.6940	.35921
Nunukan	5	3.12	3.58	3.3680	.18674
Pasir	5	4.01	4.35	4.1660	.14519
Samarind	5	4.79	4.86	4.8240	.02702
Tarakan	5	4.02	4.18	4.0860	.06066
Total	60	2.26	4.86	3.9862	.58925

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder * Tahun
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Sekunder

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	2.26	4.86	3.9375	.71603
2002	12	2.49	4.84	3.9775	.64057
2003	12	2.59	4.82	3.9950	.61534
2004	12	3.06	4.81	4.0283	.52554
2005	12	3.07	4.79	3.9925	.52889
Total	60	2.26	4.86	3.9862	.58925

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier * Kabupaten/Kota
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	5.02	5.06	5.0460	.01673
Berau	5	4.26	4.33	4.2900	.02739
Bontang	5	4.20	4.37	4.2960	.06731
Bulungan	5	3.76	4.04	3.9480	.11389
Kubar	5	3.91	4.29	4.1420	.14464
Kukar	5	4.74	4.78	4.7680	.01789
Kutim	5	3.95	4.12	4.0260	.07436
Malinau	5	3.07	3.61	3.3740	.25185
Nunukan	5	3.91	4.22	4.0800	.14160
Pasir	5	4.31	4.58	4.4520	.11145
Samarind	5	5.10	5.16	5.1280	.02588
Tarakan	5	4.30	4.55	4.3960	.10854
Total	60	3.07	5.16	4.3288	.48155

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier * Tahun
 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Tersier

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	3.15	5.10	4.2617	.54344
2002	12	3.07	5.11	4.2867	.55135
2003	12	3.44	5.12	4.3458	.48821
2004	12	3.60	5.16	4.3708	.44336
2005	12	3.61	5.15	4.3792	.44461
Total	60	3.07	5.16	4.3288	.48155

Pendapatan Perkapita * Kabupaten/Kota
Pendapatan Perkapita

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.14	1.18	1.1560	.01817
Berau	5	.56	1.18	.8300	.32031
Bontang	5	2.32	2.41	2.3560	.03782
Bulungan	5	.40	.97	.8480	.25054
Kubar	5	.96	1.09	1.0260	.04930
Kukar	5	1.20	1.84	1.5480	.31602
Kutim	5	1.51	1.68	1.5780	.06834
Malinau	5	.83	.87	.8460	.01817
Nunukan	5	.91	1.00	.9540	.03362
Pasir	5	1.09	1.14	1.1080	.02168
Samarind	5	1.04	1.15	1.1040	.04506
Tarakan	5	.88	.96	.9220	.03194
Total	60	.40	2.41	1.1897	.45062

Pendapatan Perkapita * Tahun
Pendapatan Perkapita

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	.40	2.41	1.0842	.50347
2002	12	.56	2.38	1.1408	.45566
2003	12	.62	2.34	1.1892	.46621
2004	12	.83	2.33	1.2558	.43498
2005	12	.83	2.32	1.2783	.43975
Total	60	.40	2.41	1.1897	.45062

Usia Harapan Hidup * Kabupaten/Kota
Usia Harapan Hidup

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.85	1.85	1.8500	.00000
Berau	5	1.81	1.84	1.8280	.01643
Bontang	5	1.84	1.86	1.8500	.00707
Bulungan	5	1.83	1.86	1.8480	.01643
Kubar	5	1.82	1.84	1.8340	.00894
Kukar	5	1.82	1.83	1.8220	.00447
Kutim	5	1.82	1.83	1.8260	.00548
Malinau	5	1.83	1.83	1.8300	.00000
Nunukan	5	1.84	1.85	1.8460	.00548
Pasir	5	1.81	1.86	1.8360	.02408
Samarind	5	1.84	1.85	1.8420	.00447
Tarakan	5	1.85	1.86	1.8520	.00447
Total	60	1.81	1.86	1.8387	.01408

Usia Harapan Hidup * Tahun
Usia Harapan Hidup

Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	1.81	1.86	1.8317	.01642
2002	12	1.81	1.85	1.8317	.01467
2003	12	1.82	1.86	1.8417	.01115
2004	12	1.82	1.86	1.8425	.01138
2005	12	1.83	1.86	1.8458	.01165
Total	60	1.81	1.86	1.8387	.01408

Angka Melek Huruf * Kabupaten/Kota
Angka Melek Huruf

Kabupaten/Kota	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Balikpap	5	1.98	1.99	1.9860	.00548
Berau	5	1.96	1.98	1.9720	.00837
Bontang	5	1.99	2.00	1.9920	.00447
Bulungan	5	1.95	1.97	1.9640	.00894
Kubar	5	1.95	1.97	1.9620	.00837
Kukar	5	1.97	1.98	1.9740	.00548
Kutim	5	1.95	1.98	1.9680	.01095
Malinau	5	1.94	1.96	1.9560	.00894
Nunukan	5	1.93	1.97	1.9560	.01673
Pasir	5	1.95	1.97	1.9600	.00707
Samarind	5	1.98	1.99	1.9840	.00548
Tarakan	5	1.98	1.99	1.9880	.00447
Total	60	1.93	2.00	1.9718	.01467

Angka Melek Huruf * Tahun
Angka Melek Huruf

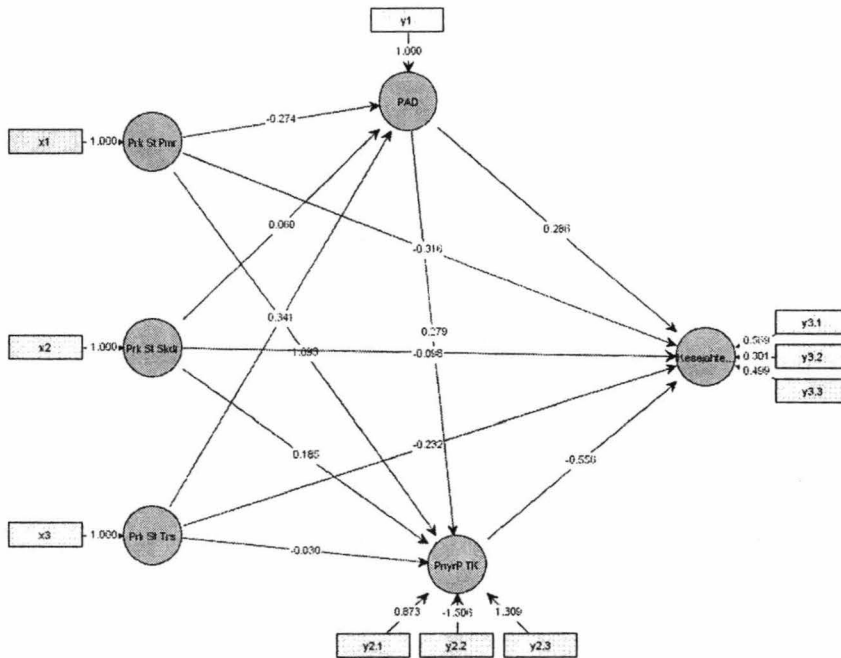
Tahun	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2001	12	1.93	1.99	1.9692	.01881
2002	12	1.95	1.99	1.9750	.01243
2003	12	1.95	2.00	1.9717	.01749
2004	12	1.95	1.99	1.9725	.01357
2005	12	1.95	1.99	1.9708	.01165
Total	60	1.93	2.00	1.9718	.01467

LAMPIRAN 5

HASIL ANALISIS PLS

Lampiran 5. Hasil Analisis PLS

A. Tahap Awal



R-square
[CSV-Version]

	R-square
PAD	0.211
PnyrP TK	0.810
Kesejahteraan	0.793

results for outer weights
[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
PnyrP TK					
y2.1	0.873	0.401	0.496	1.955	0.026
y2.2	-1.506	-0.678	0.709	2.122	0.017
y2.3	1.309	0.613	0.603	1.930	0.027
Kesejahteraan					
y3.1	0.569	0.500	0.123	4.616	0.000
y3.2	0.301	0.347	0.073	4.135	0.000
y3.3	0.499	0.522	0.060	8.371	0.000

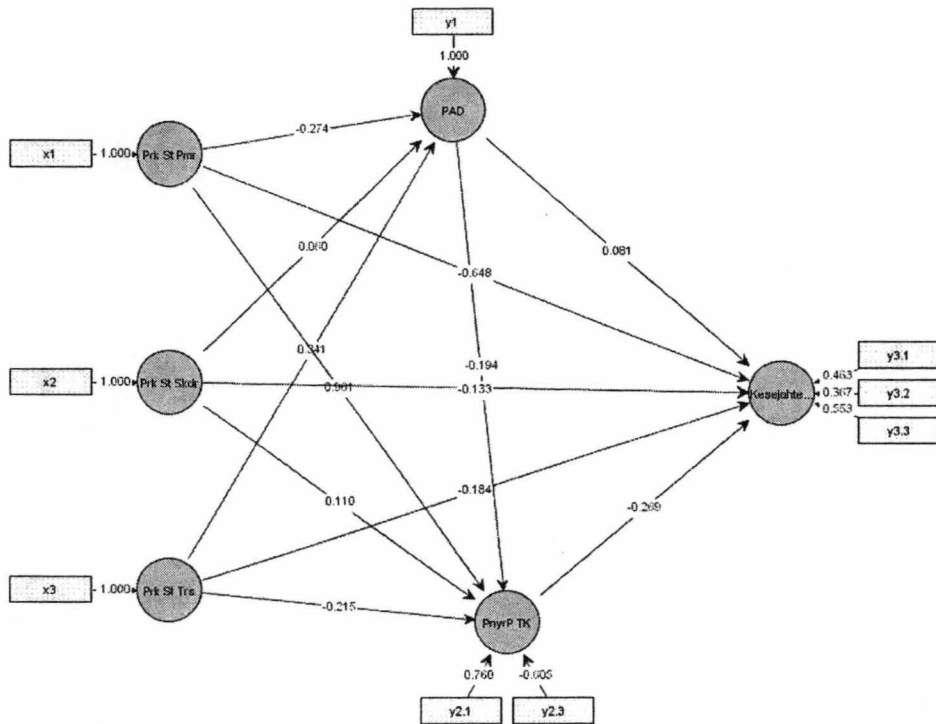
results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Prk St Pmr -> PAD	-0.274	-0.280	0.113	2.428	0.016
Prk St Skdr -> PAD	0.060	0.054	0.116	0.519	0.604
Prk St Trs -> PAD	0.341	0.344	0.066	5.158	0.000
Prk St Pmr -> PnyrP TK	1.093	0.509	0.866	1.262	0.208
Prk St Skdr -> PnyrP TK	0.185	0.097	0.124	1.487	0.138
Prk St Trs -> PnyrP TK	-0.030	-0.014	0.167	0.177	0.860
PAD -> PnyrP TK	0.279	0.138	0.205	1.361	0.175
Prk St Pmr -> Kesejahteraan	-0.316	-0.549	0.263	1.204	0.230
Prk St Skdr -> Kesejahteraan	-0.098	-0.123	0.102	0.960	0.338
Prk St Trs -> Kesejahteraan	-0.232	-0.179	0.097	2.393	0.017
PAD -> Kesejahteraan	0.286	0.178	0.095	2.995	0.003
PnyrP TK -> Kesejahteraan	-0.556	-0.251	0.336	1.654	0.099

Indikator $Y_{2.2}$ (penyerapan tenaga kerja sektor sekunder) adalah tidak valid sebagai pengukur variabel Penyerapan tenaga kerja, dimana *outer weight* bernilai negatif. Oleh karena itu, dilakukan reevaluasi dengan cara membuang indikator tersebut.

B. Tahap Reevaluasi



R-square
[CSV-Version]

	R-square
PAD	0.211
PnyrP TK	0.905
Kesejahteraan	0.714

results for outer weights
[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
PnyrP TK					
y2.1	0.76	0.762	0.031	24.485	0.000
y2.3	-0.605	-0.602	0.033	18.079	0.000
Kesejahteraan					
y3.1	0.463	0.452	0.088	5.242	0.000
y3.2	0.367	0.371	0.046	7.917	0.000
y3.3	0.553	0.555	0.043	12.742	0.000

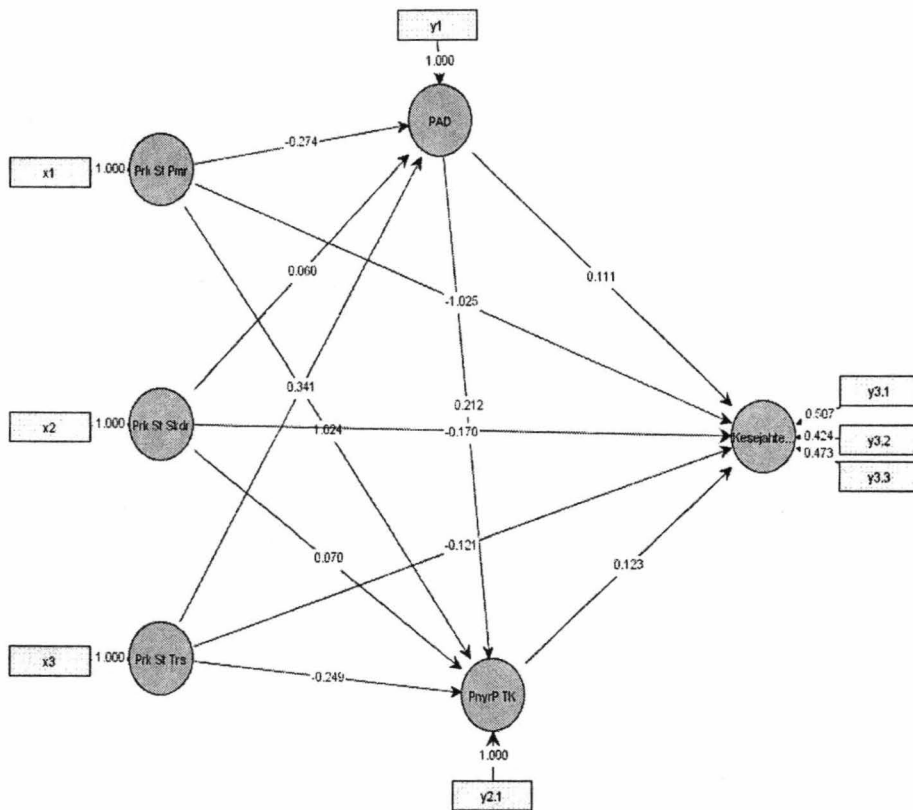
results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Prk St Pmr -> PAD	-0.274	-0.282	0.089	3.069	0.002
Prk St Skdr -> PAD	0.06	0.054	0.095	0.637	0.525
Prk St Trs -> PAD	0.341	0.343	0.054	6.311	0.000
Prk St Pmr -> PnyrP TK	0.961	0.958	0.059	16.282	0.000
Prk St Skdr -> PnyrP TK	0.11	0.107	0.054	2.057	0.041
Prk St Trs -> PnyrP TK	-0.215	-0.215	0.022	9.79	0.000
PAD -> PnyrP TK	-0.194	-0.192	0.022	8.816	0.000
Prk St Pmr -> Kesejahteraan	-0.648	-0.639	0.161	4.027	0.000
Prk St Skdr -> Kesejahteraan	-0.133	-0.126	0.094	1.414	0.158
Prk St Trs -> Kesejahteraan	-0.184	-0.176	0.071	2.568	0.011
PAD -> Kesejahteraan	0.081	0.082	0.045	1.791	0.074
PnyrP TK -> Kesejahteraan	-0.269	-0.27	0.111	2.417	0.016

Indikator $Y_{2.3}$ (penyerapan tenaga kerja sektor tersier) adalah tidak valid sebagai pengukur variabel Penyerapan tenaga kerja, dimana *outer weight* bernilai negatif. Oleh karena itu, dilakukan reevaluasi dengan cara membuang indikator tersebut.

C. Tahap Reevaluasi (Akhir)



R-square
[CSV-Version]

	R-square
PAD	0.211
PnyrP TK	0.829
Kesejahteraan	0.711

results for outer weights
[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Kesejahteraan					
y3.1	0.507	0.498	0.07	7.199	0.000
y3.2	0.424	0.427	0.044	9.606	0.000
y3.3	0.473	0.475	0.041	11.658	0.000

results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value
Prk St Pmr -> PAD	-0.274	-0.275	0.085	3.238	0.001
Prk St Skdr -> PAD	0.060	0.063	0.090	0.669	0.504
Prk St Trs -> PAD	0.341	0.339	0.050	6.806	0.000
Prk St Pmr -> PnyrP TK	1.024	1.020	0.046	22.289	0.000
Prk St Skdr -> PnyrP TK	0.070	0.068	0.049	1.424	0.155
Prk St Trs -> PnyrP TK	-0.249	-0.251	0.022	11.591	0.000
PAD -> PnyrP TK	0.212	0.212	0.025	8.400	0.000
Prk St Pmr -> Kesejahteraan	-1.025	-1.023	0.098	10.437	0.000
Prk St Skdr -> Kesejahteraan	-0.170	-0.170	0.086	1.986	0.048
Prk St Trs -> Kesejahteraan	-0.121	-0.112	0.052	2.342	0.020
PAD -> Kesejahteraan	0.111	0.110	0.032	3.489	0.001
PnyrP TK -> Kesejahteraan	0.123	0.122	0.057	2.152	0.032